



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERDAYAAN PULAU TERLUAR TIDAK BERPENGHUNI
DI SEKITAR SELAT MALAKA
DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN NEGARA
(PERSPEKTIF STRATEGIS KETAHANAN NASIONAL)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional

Oleh

MOHAMMAD ALI NUGROHO
0806449046

**PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
Juli 2011**



**PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MOHAMMAD ALI NUGROHO
NPM : 0806449046
Tahun Masuk : 2008/PKN 27
Program : PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
Judul Tesis : PEMBERDAYAAN PULAU TERLUAR TIDAK
BERPENGHUNI DI SEKITAR SELAT MALAKA
DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN NEGARA
(PERSPEKTIF STRATEGIS KETAHANAN
NASIONAL)

Telah setuju untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Wan Usman, MA

Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi

ii

Universitas Indonesia

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Mohammad Ali Nugroho, ST.
NPM : 0806449046
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : **PEMBERDAYAAN PULAU TERLUAR TIDAK
BERPENGHUNI DI SEKITAR SELAT MALAKA
DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN NEGARA
(PERSPEKTIF STRATEGIS KETAHANAN
NASIONAL)**

Tesis berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Dewan Penguji :

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Tb Ronny R Nitibaskara

Sekretaris/Penguji : Dr. Amirsyah Sahil, SE, M.Si

Pembimbing I/Penguji : Prof. Dr. Wan Usman, MA

Pembimbing II/Penguji : Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
Hari/Tanggal : Rabu/ 22 Juni 2011
Pukul : 15.30 s/d 17.00 WIB.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan tesis dengan judul **“Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka Dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif Strategis Ketahanan Nasional)”** dapat diselesaikan, sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pasca Sarjana Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa pemberdayaan pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni merupakan hal yang harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan nilai strategis yang terdapat di pulau-pulau terluar tersebut, sebagai titik dasar penentuan batas wilayah negara dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Dengan pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar tersebut dapat meningkatkan ketahanan negara sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak memvantu, baik pada saat penelitian hingga selesainya penyusunan tesis ini, terutama kepada :

1. Prof. DR. Tb Ronny R Nitibaskara, selaku Ketua Program Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
2. Prof. DR Wan Usman, MA, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
3. DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah banyak memberikan arahan dan bantuan dalam pengerjaan tesis ini.

4. DR. Amirsyah Sahil, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, yang juga telah memberikan masukan yang membantu dalam tesis ini.
5. Seluruh Dosen PKN UI yang telah dengan sabar memberikan kuliah serta memberikan masukan yang tak terlupakan sebagai bekal penulis dalam menjalani kegiatan selanjutnya.
6. Bapak Rahman Ibrahim, selaku nara sumber dari BNPP, atas waktu dan arahan yang diberikan untuk penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Bagus dan Bapak Jaka Prasetya, selaku nara sumber dari Wilhan, Kemenhan, atas waktu dan arahannya.
8. Letkol Laut (P) Fauzi, Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, atas bantuannya sehingga penulis dapat meninjau langsung ke pulau-pulau terluar.
9. Letkol Laut (P) Kusmayadi, Letkol Laut (P) Ribus, Letkol Laut (P) Eko Wahyono, dan seluruh jajaran Staf Operasi di Mabes TNI AL Cilangkap.
10. Mayor Laut (T) Made Suanika, Mayor Laut (P) Yudi Kuncoro, Mayor Laut (E) Ferry Johansyah, Mayor Laut (T) Hendi Kitris, Mayor Laut (P) Lukman Kharis, Mayor Laut (P) Hariyo Purnomo, Mayor Laut (P) Jimmy, Mayor Laut (T) Arie Setiawan, Mayor Laut (T) Rudi Ahmad, Mayor Laut (P) Yudi Prayitno, Kapten Laut (T) Eko Arie Kurniawan, Kapten Laut (T) Oki Pranata, Lettu Laut (T) I Gede Purwa, Lettu Laut (P) Edvan, dan seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu baik moril maupun materil, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Seluruh staf karyawan PKN UI yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan perkuliahan di PKN UI.
12. Rekan-Rekan PKN UI angkatan 27 yang telah memberi semangat dan masukan dalam memperkaya tesis ini, terutama kepada rekan seperjuangan Sirwani, Sri Handayani dan Sunarjo Slamet Widodo.

13. Orang tua dan keluarga, terutama kepada Istriku tercinta dan anak-anakku, sebagai motivator dalam penyelesaian studi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah banyak membantu penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banya kekurangan, untuk itu penulis berharap permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan selanjutnya.

Akhir kata, semoga tulisan tesis ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pengkajian Ketahanan Nasional.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

Mohammad Ali Nugroho, ST.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Ali Nugroho, ST.
NPM : 0806449046.
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional.
Fakultas : Pascasarjana.
Jenis Karya : Tesis.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBERDAYAAN PULAU TERLUAR TIDAK BERPENGHUNI
DI SEKITAR SELAT MALAKA DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN NEGARA
(Perspektif Strategis Ketahanan Nasional)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penunlis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal : Juli 2011

Yang Menyatakan,

Mohammad Ali Nugroho, ST

ABSTRAK

Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka. Tekanan penelitian ini adalah berupaya menggambarkan kondisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, bagaimana pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar tidak yang berpenghuni dan peran stake holder yang berperan dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni untuk meningkatkan ketahanan nasional, khususnya segi kesejahteraan dan keamanan.

Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa pulau-pulau terluar yang menjadi objek penelitian merupakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dan mempunyai peran strategis dalam menjaga tetap utuhnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dilihat kenyataannya, bahwa masih banyak permasalahan yang terdapat di pulau-pulau terluar tersebut. Kerawanan terhadap tindak kejahatan, pelanggaran batas wilayah, aktivitas ilegal maupun pengklaiman sepihak oleh pihak asing masih terjadi di pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau terluar di sekitar selat Malaka. Selain itu, pulau-pulau terluar rawan hilang akibat abrasi air laut dan efek dari pemanasan global.

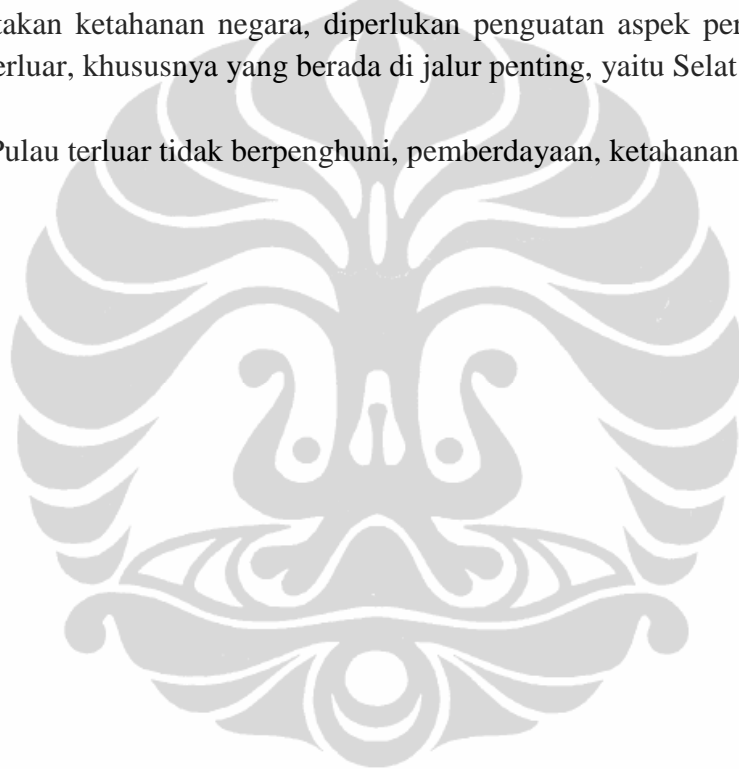
Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan dari Ife, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kieffer bahwa pemberdayaan memerlukan adanya unsur partisipatif pada pemberdayaan. Dijelaskan juga oleh Parson *et al* bahwa pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Penelitian tentang pemberdayaan pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka ini juga tidak terlepas dengan bagaimana untuk memberdayakan ruang yang ada. Khususnya ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, dan juga kekayaan alam yang terdapat di wilayah nusantara. Dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni, yang merupakan ruang negara juga didukung dengan bagaimana partisipasi masyarakat, peran lembaga, pembangunan berkelanjutan, untuk memberdayakan pulau-pulau tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan kondisi alamiah yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendukung penelitian ini, dilaksanakan penelitian studi literatur didapat dari berbagai sumber dan juga tinjauan langsung di lapangan. Dari hasil yang diperoleh ternyata masih banyak kekurangan dan tidak tersedianya sarana

prasarana yang dapat menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan. Kondisi real dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar yang mempunyai peran strategis ini.

Dalam penelitian ini terdapat pulau-pulau yang berpotensi untuk diberdayakan, baik secara ekonomi maupun pertahanan, yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai kewenangan besar dan dapat melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah pulau. Untuk menciptakan ketahanan negara, diperlukan penguatan aspek pertahanan di pulau-pulau terluar, khususnya yang berada di jalur penting, yaitu Selat Malaka.

Kata kunci : Pulau terluar tidak berpenghuni, pemberdayaan, ketahanan negara.



ABSTRACT

This thesis attempts to give an idea of empowerment of the uninhabited outer islands around the Straits of Malacca. The pressure of this research is to attempt to describe the condition of the uninhabited outer island in the vicinity of the Strait of Malacca, how the empowerment of the uninhabited outer islands and the role stakeholder play a role in the empowerment of the uninhabited outer islands to enhance national resilience, particularly in terms of welfare and security.

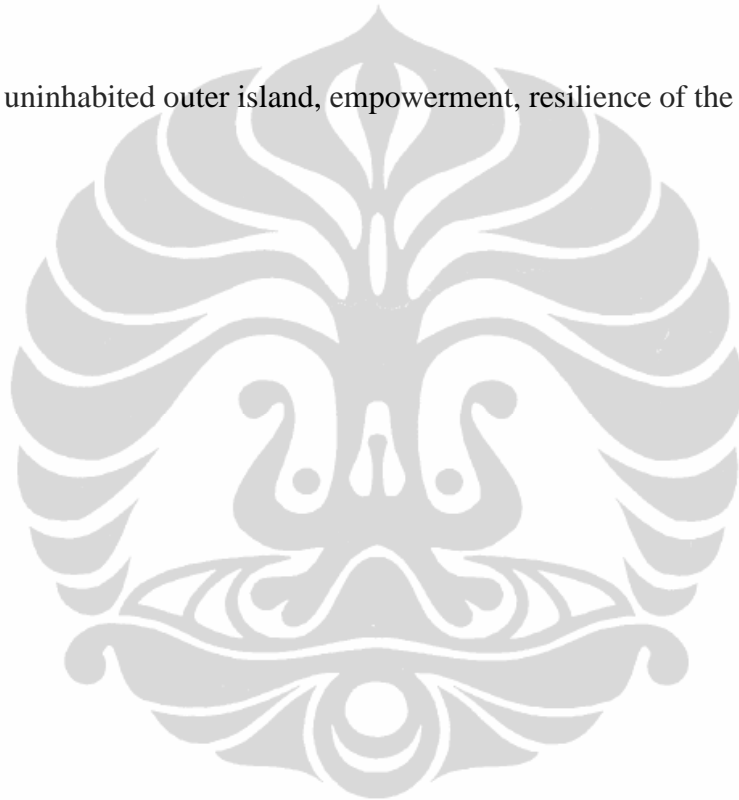
In this research can be drawn that the outer island that became the object of research is the outer island are uninhabited and have a strategic role in maintaining the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia. But seen in reality, that there there are still many problems in the outer islands. Vulnerability to crime, border violations, illegal activity and its biggest claim unilaterally by foreign parties are still happening on the outer islands, particularly the outer islands around the Strait of Malacca. In addition, the vulnerable lost due to abrasion and the effects of global warming.

Some supporters of the theory used in this research is the theory of empowerment of the Ife, which explains that empowerment is a concept to achieve the goal. Meanwhile, according to Kieffer that empowerment requires a participatory element in empowerment. Also described by Parson *et al* that empowerment is a process that began with the development of individual growth which then develop into a larger social change. Research on the empowerment of the uninhabited outer islands in the vicinity of the Straits of Malacca is also not free with how to empower existing space. In particular the space of the Unitary Republic of Indonesia is an archipelago which is the unity of container covering land space, sea and air space, and also natural riches contained in the archipelago. In the empowerment of the outer islands are uninhabited, which is the state space is also supported by how the public participation, the role of institutions, sustainable development, to empower these islands.

This study uses qualitative research seeking to describe the state of nature which is descriptive analysis. To support this research, conducted research study of literature obtained from various sources and also direct review in the field. From the results obtained are still many shortcomings and lack of infrastructure that can support in improving the welfare and security. Real field conditions indicate that there is still a lack of empowerment to the outer islands that have a strategic role.

In this study, there are islands that have the potential to be empowered, bot economically an defense, they are Pulau Berhala and Pulau Nipa. This study provides recommendations for the empowerment of the outer islands are uninhabited around the Straits of Malacca, should be implemented by stakeholders who have great authority and can execute various programs according to the character of each area of the island. To create resilience countries need to strengthen the aspects of defense in the outer islands, particularly in an important point, the Straits of Malacca.

Keywords: uninhabited outer island, empowerment, resilience of the country.



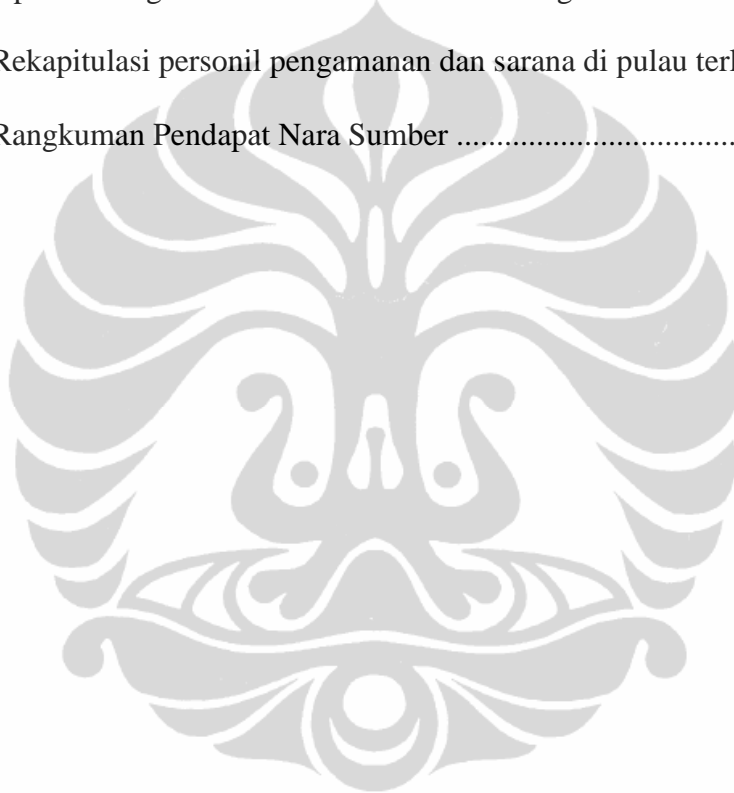
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	18
1.3 Pembatasan Masalah	19
1.4 Perumusan Masalah	20
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
1.5.1 Tujuan Penelitian	20
1.5.2 Manfaat Penelitian	21
1.6 Sistematika Penelitian	21
2. KAJIAN PUSTAKA	23
2.1 Pemberdayaan	23
2.1.1 Pemberdayaan Ruang Negara	28
2.1.2 Partisipasi Masyarakat	33
2.1.3 Peran Kelembagaan	40
2.1.4 Pembangunan Berkelanjutan	44
2.2 Pulau Terluar Tidak Berpenghuni	51
2.3 Konsep Pengamanan Pulau Terluar dalam Konteks Geostrategis	55
2.4 Pendekatan Teori Geopolitik dan Wawasan Nusantara	60
2.5 Pendekatan Teori Ketahanan Nasional	65
3. METODE PENELITIAN	69
3.1 Desain Penelitian	69
3.2 Instrumen Penelitian	70
3.3 Lokasi Penelitian	71
3.4 Sumber-Sumber Data	71
3.5 Teknik Pengumpulan Data	71
3.6 Metode Analisis Data	72
3.7 Alur Penelitian	73

4. PULAU-PULAU TERLUAR TIDAK BERPENGGHUNI DI SEKITAR SELAT MALAKA	76
4.1 Gambaran Fisik Pulau	76
4.1.1 Pulau Berhala	76
4.1.2 Pulau Batu Mandi	80
4.1.3 Pulau Iyu Kecil	82
4.1.4 Pulau Karimun Kecil	85
4.1.5 Pulau Nipa	86
4.1.6 Pulau Palompong	91
4.1.7 Pulau Batu Berhanti	93
4.1.8 Pulau Nongsa	95
4.2 Gambaran Aspek Pemberdayaan Pulau-Pulau di Sekitar Selat Malaka	97
4.2.1 Kebijakan Umum Tata Ruang Negara	97
4.2.2 Partisipasi Masyarakat Sekitar	100
4.2.3 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah	101
4.2.4 Pembangunan Berkelanjutan (Aspek Ekonomi, Lingkungan dan Perubahan Iklim)	109
4.2.5 Pertahanan dan Keamanan	118
5. PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI, KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN	126
5.1 Strategi Pembangunan Wilayah	126
5.2 Pemberdayaan Ruang Negara sebagai Potensi Pertahanan	131
5.3 Partisipasi Masyarakat untuk Kepentingan Ekonomi	142
5.4 Peran Pemerintah yang Responsif terhadap Pulau Terluar	147
5.5 Aktualisasi Konsepsi Ketahanan Nasional	151
5.6 Tabel Rangkuman Pendapat Nara Sumber	155
6. KESIMPULAN DAN SARAN	160
6.1 Kesimpulan	160
6.2 Saran	161
DAFTAR REFERENSI	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5	Data kegiatan illegal di wilayah Selat Malaka tahun 2009 –Maret 2011	17
Tabel 4.1	Operasi Pengamanan Pulau Terluar oleh Satgasmar	118
Tabel 5.1	Rekapitulasi personil pengamanan dan sarana di pulau terluar.....	139
Tabel 5.2	Rangkuman Pendapat Nara Sumber	155

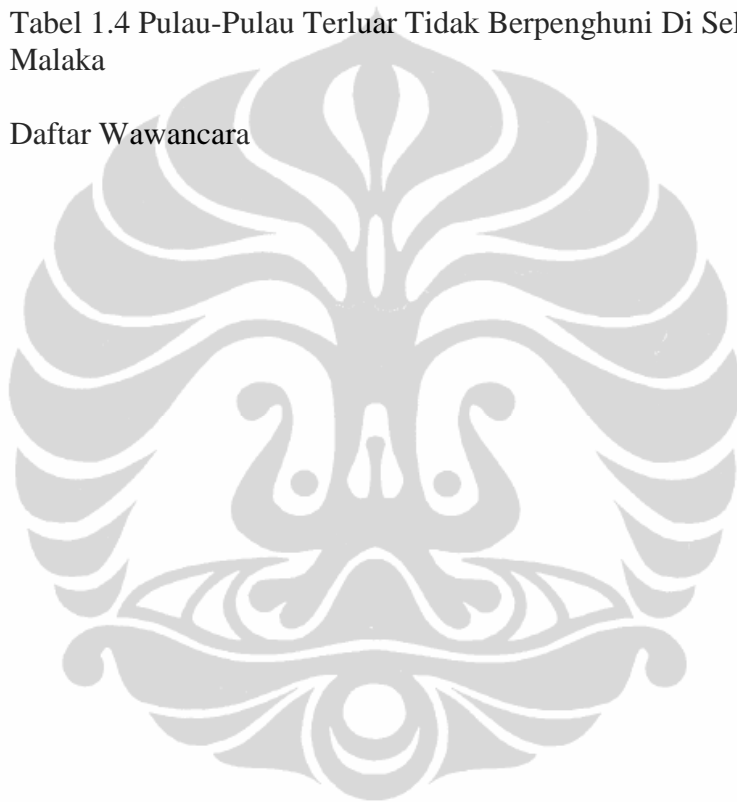


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia	3
Gambar 1.2	12 Pulau Terluar Rawan dengan Negara Tetangga	4
Gambar 1.3	Peta Batas Laut Teritorial Indonesia – Singapura	9
Gambar 1.4	Peta Perbatasan Wilayah Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka	9
Gambar 4.1	Posisi geografis Pulau Berhala	76
Gambar 4.2	Pulau Berhala diapit Pulau Sokong Nenek dan Pulau Sokong Siembang	77
Gambar 4.3	Pembangkit listrik, mess pam pulau terluar dan sarana dermaga di Pulau Berhala	80
Gambar 4.4	Posisi geografis Pulau Batumandi	81
Gambar 4.5	Pulau Batumandi	82
Gambar 4.6	Posisi geografis Pulau Iyu Kecil	83
Gambar 4.7	Pulau Iyu Kecil	84
Gambar 4.8	Posisi geografis Pulau Karimun Kecil	85
Gambar 4.9	Pulau Karimun Kecil	86
Gambar 4.10	Posisi geografis Pulau Nipa	87
Gambar 4.11	Pulau Nipa	88
Gambar 4.12	Beberapa sarana yang terdapat di Pulau Nipa. Pembangkit listrik tenaga surya, mess prajurit, mercusuar, dermaga beton, pos pengamatan, dan lahan tanaman cemara dan trembesi	91
Gambar 4.13	Posisi geografis Pulau Palompong	92
Gambar 4.14	Pulau Palompong	93
Gambar 4.15	Posisi geografis Pulau Batu Berhanti	94
Gambar 4.16	Pulau Batu Berhanti	94
Gambar 4.17	Posisi geografis Pulau Nongsa	95
Gambar 4.18	Pulau Nongsa	96
Gambar 4.19	Penampungan air hujan yang airnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh pasukan penjaga pulau Nipa	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel 1.1 Daftar Pulau Indonesia yang sudah lepas dari NKRI
- Lampiran 2 Tabel 1. 2 Daftar Pulau Indonesia yang hilang secara fisik
- Lampiran 3 Tabel 1.3 Daftar Pulau Terluar Indonesia beserta Titik Koordinat
- Lampiran 4 Tabel 1.4 Pulau-Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka
- Lampiran 5 Daftar Wawancara



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan 17.480¹ pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut dan selat-selat di nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 km dan lebarnya 1.888 km, luas perairan sekitar 3.205.908 km², luas laut teritorial sekitar 300.000 km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.707.092 km², panjang garis pantai 81.290 km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 km².² Dari 17.480 pulau tersebut, yang sudah terinventarisasi sebanyak 7.349 pulau bernama, sisanya belum terinventarisasi dan tak bernama di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.³ Negara kepulauan menurut ketentuan pokok Konvensi Hukum Laut 1982 adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, pasal 25 A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya

¹ Numberi, Freddy, *Perubahan Iklim, Implikasinya Terhadap Kehidupan Di Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta, Fortuna, 2009, hal: 56. Jumlah 17.480 pulau ini dari hasil 17.508 pulau hasil survei Dishidros TNI AL tahun 1982 dikurangi 4 pulau yang lepas dari NKRI (lihat tabel 1.1) dan hilangnya 24 pulau secara fisik (lihat tabel 1.2).

² Agoes, Ety R, *Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara dalam Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis UI Ke 53*, Jakarta, FHUI, 2003

³BPN RI, *Tata Cara Kerja Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011*, Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu, 2010, hal : 2

ditetapkan dengan undang-undang⁴. Dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia⁵. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia sebagai negara kepulauan pertama kali melalui konsep Negara Kepulauan dalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Setelah melalui perjuangan cukup panjang akhirnya pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS)*) 1982, yang selanjutnya diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *UNCLOS* 1982⁶. Dengan pengakuan negara kepulauan maka perairan antar pulau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya Negara Indonesia berhak penuh atasnya⁷.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, maka Indonesia mempunyai beberapa pulau yang berada pada perbatasan atau garis batas dengan negara lain. Dari 7.349 pulau yang sudah bernama, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai pulau terluar, 12 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus,

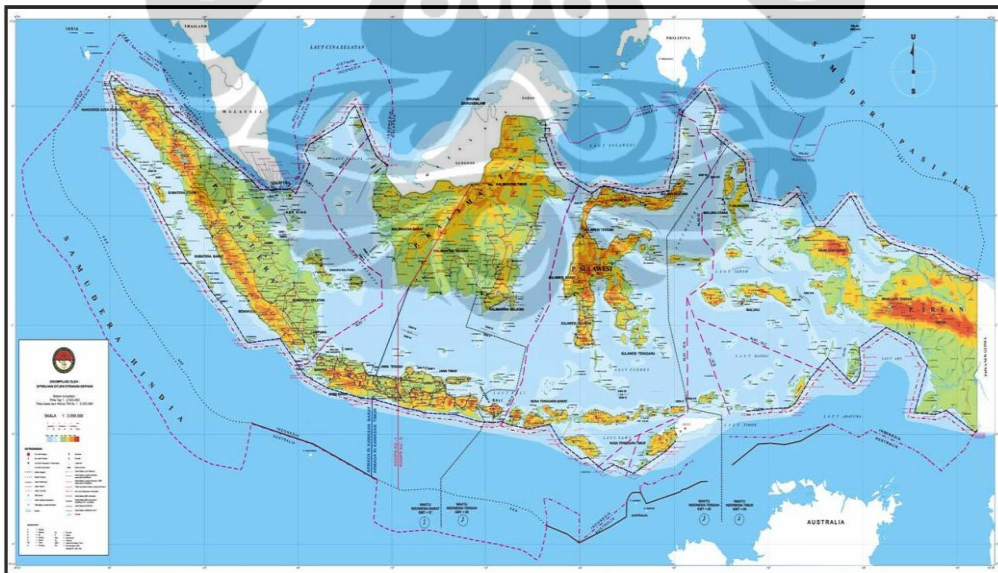
⁴Lihat artikel Pulau-pulau Terluar dan Batas NKRI dalam <http://geomatika.its.ac.id/archives/pulau-pulau-terluar-dan-batas-nkri/> , published 18 Januari 2006, diunduh 12 Juli 2010.

⁵ Investor Daily, *Peringatan Hari Nusantara ke-11 Tahun 2010: Peran Transportasi Laut Dalam Perwujudan Wawasan Nusantara*, Senin 13 Desember 2010. Lihat juga *Laut Belum Jadi Mainstream Pembangunan*, dalam <http://www.investor.co.id/agribusiness/fadel-laut-belum-jadi-mainstream-pembangunan-nasional/1546>, diunduh 16 Desember 2010.

⁶ Investor Daily. *Op cit.*

⁷Lihat pada Rusdi, Siswanto, *Catatan Kecil Hari Nusantara*, Rabu, 15 Desember 2010, <http://oase.kompas.com/read/2010/12/15/01091092/Catatan.kecil.Hari.Nusantara> Diunduh: 16 Desember 2010, pukul 23.30 WIB.

karena terletak di perbatasan terluar. Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat⁸. Daerah perbatasan adalah daerah daratan, laut dan udara di atasnya sepanjang perbatasan bersama kedua negara, yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara⁹. Dengan adanya perbatasan negara Indonesia dengan negara lain, diantaranya adalah Malaysia dan Singapura maka akan terdapat perbedaan kepentingan dan adanya masalah di wilayah perbatasan. Secara garis besar dimaksudkan bahwa bila ada wilayah di perbatasan negara Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara lain, sebagai contoh berbatasan dengan wilayah Malaysia dan Singapura dan wilayah tersebut mengandung potensi termasuk sumber daya alam di dalamnya maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan kepentingan dan instabilitas di wilayah tersebut. Dengan melihat gambaran tersebut, maka wilayah perbatasan harus mendapat perhatian yang serius untuk menjaga tetap utuhnya kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 1.1. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: Dephan RI, Maret 2011

⁸ Suyatno, *Globalisasi, Perbatasan Indonesia-Malaysia Dan Local Governance*, dalam *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal: 138.

⁹ Kartikasari, Wahyuni, *Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia* dalam *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal: 106

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, terdapat 92 buah pulau yang merupakan pulau terluar¹⁰ (Lihat Tabel. 1.3). Yang dimaksud pulau terluar dalam Peraturan Presiden ini adalah pulau yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional¹¹. Dari 92 buah pulau terluar yang disebutkan dalam Peraturan Presiden, terdapat 12 pulau terluar yang merupakan pulau terluar yang berpotensi konflik yang cukup besar (gambar 1.2).



Gambar 1.2. 12 Pulau Terluar rawan dengan Negara Tetangga.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

¹⁰ Lihat dalam lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, dapat didownload dari www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=a6jI1zR6t9Y%3D...59...

¹¹ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 2.

Keduabelas pulau tersebut adalah Pulau Rondo di Nangroe Aceh Darussalam, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Pulau Sekatung di Riau, Pulau Marore, Pulau Marampit dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fanildo, Pulau Fani dan Pulau Bras di Papua, Pulau Batek dan Pulau Dana di Nusa Tenggara Timur. Menurut Kadispenal TNI Angkatan Laut, yang saat itu dijabat Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, kedua belas pulau terluar yang rawan konflik karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Timur Leste dan Australia, berfungsi sebagai titik referensi untuk penetapan dasar pada penarikan batas wilayah Indonesia dengan negara lain¹².

Indonesia sudah mempunyai pengalaman pahit setelah lepasnya Sili (Sipadan dan Ligitan) dan dikuasai oleh Malaysia. Apabila tidak mendapat perhatian yang khusus terhadap pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain tersebut, tidak menutup kemungkinan pulau-pulau lainnya akan bernasib sama dengan kejadian Sili. Menurut Prof. DR. Ono Kurnaen Sumadiharga, sebanyak 92 pulau terluar di Indonesia saat ini perlu diamankan karena sangat berpeluang diambil pihak asing. Kalau tidak diamankan, nasib 92 pulau itu akan sama dengan Pulau Sipadan dan Ligitan¹³. Kasus dimenangkan Sili oleh Malaysia menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Putusan dari Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag Belanda pada bulan Desember 2002 tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai putusan yang sah tidak dapat diganggu gugat lagi, bahwa kedua pulau tersebut sekarang resmi menjadi milik Malaysia. Putusan tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan apabila kita mempelajari jauh sebelumnya atas status kedua pulau itu. Dibalik kenyataan itu, nampaknya Indonesia tidak pernah menghitung berapa nilainya kalau suatu obyek yang disengketakan itu telah

¹² Lihat Saifullah, Muhammad, *12 Pulau Terluar Indonesia Rawan Picu Konflik*, Selasa, 29 Desember 2009, 18:25 wib, dalam <http://news.okezone.com/read/2009/12/29/337/289225/12-pulau-terluar-indonesia-rawan-picu-konflik> diunduh 12 Juli 2010, pukul 11.30 wib.

¹³ Lihat rubrik Politik dan Hukum tentang *Pemerintah Harus Tunjukkan Keseriusan Jaga Pulau Terluar*, Rabu, 27 Mei 2009 – by admin dalam www.koraninternet.com, diunduh tanggal 12 Juli 2010, pukul 14.21 WIB.

dibina, dipelihara, walaupun kedua pulau itu dinyatakan status quo. Penggalangan dan pembinaan atas kedua pulau tersebut sudah dilakukan pihak Malaysia selama lebih dari 30 tahun, sehingga wajar pula kalau pihak Malaysia berdaya upaya untuk memperjuangkan kepemilikannya, sehingga faktor inilah yang nampaknya mempunyai kredit point yang tinggi dalam pengambilan keputusan sidang MI¹⁴. Terdapat tiga alasan Indonesia kalah oleh Malaysia pada perebutan kedua pulau tersebut yaitu, Malaysia secara terus-menerus berada di pulau tersebut, adanya penguasaan efektif pulau, dan perlindungan serta pelestarian ekologis. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan mungkin masih membekas dalam ingatan seluruh bangsa Indonesia bahwa betapa pentingnya memelihara pulau-pulau perbatasan, baik yang berpenghuni maupun tidak. Seperti dikutip dari *tempointeraktif.com*, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah mencanangkan pemberdayaan pulau terluar untuk mencegah terjadinya kembali kasus Sipadan Ligitan terhadap pulau-pulau Indonesia. Pulau kecil terluar harus mendapat perhatian khusus karena merupakan pulau yang sangat strategis dikarenakan pulau kecil terluar sebagai beranda paling depan yang langsung berhubungan dengan negara luar¹⁵.

Pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain tersebut merupakan pulau terluar kepulauan Indonesia. Pulau-pulau terluar tersebut pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. Namun kalau dilihat kenyataannya saat ini, pulau-pulau terluar tersebut masih belum diberdayakan dengan baik oleh Negara Indonesia. Hal ini dapat menjadi ancaman potensial yaitu penguasaan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni terutama di daerah perbatasan¹⁶. Disadari bahwa wilayah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain adalah penanda batas teritorial Nusantara

¹⁴ Suburi, Juni, *Konsepsi Bela Negara Dan Ancaman Keutuhan Wilayah Kedaulatan RI*, 22 April 2009 dalam <http://belanegarari.wordpress.com/2009/04/22/konsepsi-bela-negara-dan-ancaman-keutuhan-wilayah-kedaulatan-ri/>, diunduh pada 22 Maret 2011, pukul 19.41 WIB..

¹⁵ Lihat Wiguna dan Badriah, *Presiden Canangkan Pemberdayaan Pulau Kecil Terluar*, dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/11/17/brk,20061117-87881,id.html>, Jum'at, 17 November 2006, diunduh 11 Juli 2010, pukul 12.30 wib

¹⁶ Connie, Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal: 72.

yang menjadi garis depan kedaulatan Indonesia dan merupakan pintu atau halaman dari keseluruhan wilayah negara yang paling mudah diakses dan paling rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi maupun yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya:

1) Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia¹⁷. Hilangnya pulau secara fisik ini dapat juga terjadi akibat bencana alam seperti tsunami ataupun akibat dari pemanasan global yang terjadi saat ini. Tercatat sebanyak 24 pulau-pulau kecil di Indonesia hilang disebabkan oleh tsunami, abrasi dan kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali¹⁸. Selanjutnya menurut Numberi, kehilangan pulau-pulau kecil di Indonesia akan terus terjadi bila tidak segera dilakukan kegiatan antisipasi dan penanganan dengan baik. Pada masa mendatang kehilangan pulau-pulau kecil bisa juga disebabkan oleh dampak pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang selanjutnya mempengaruhi kenaikan permukaan laut, sehingga pulau-pulau kecil terutama yang topografinya datar yang memiliki ketinggian rata-rata satu meter di atas permukaan laut akan menjadi sangat rentan, sehingga dapat tenggelam atau hilang secara fisik¹⁹. Hilangnya pulau secara fisik didapat dari kecenderungan peningkatan suhu bumi sudah mulai terlihat sejak abad 20, sedangkan peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) di Indonesia mulai mengalami peningkatan berarti sejak tahun 1949. Dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menghadapi dampak perubahan iklim yang kian parah, berupa krisis air, kekeringan, banjir, kekurangan pangan, berkurangnya daratan serta **tenggelamnya ribuan pulau**. Hal ini timbul

¹⁷Lihat artikel Pulau-pulau Terluar dan Batas NKRI dalam <http://geomatika.its.ac.id/archives/pulau-pulau-terluar-dan-batas-nkri/>, published 18 Januari 2006, diunduh 12 Juli 2010.

¹⁸Numberi, Freddy, *Perubahan Iklim, Implikasinya Terhadap Kehidupan Di Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta, Fortuna, 2009, hal: 56

¹⁹*Ibid*, hal 56-57.

akibat meningkatnya suhu rata-rata di Indonesia yang diproyeksikan akan mencapai 4,2 derajat celsius pada tahun 2050 akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca²⁰.

2) Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia²¹,

3) Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain²². Penting pula untuk diingat bahwa pulau atau karang terkecil sekalipun, yang mungkin tampak tak berarti itu, sebenarnya memegang peranan besar dalam penentuan batas wilayah negara dan ratusan mil pemanfaatannya²³.

Di kawasan di sekitar Selat Malaka sendiri, terdapat beberapa pulau yang berada pada wilayah perbatasan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dalam hal mengakui dan berusaha memiliki pulau-pulau yang pada dasarnya dimiliki oleh NKRI. Selat Malaka merupakan selat yang mempunyai lalu lintas pelayaran yang cukup ramai. Demikian pentingnya selat ini, maka banyak pihak yang berusaha untuk mempunyai peran yang besar di Selat Malaka. Di sekitar Selat Malaka, Indonesia mempunyai beberapa pulau kosong, yang merupakan pulau terluar. Pulau-pulau yang terdapat di Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan negara tetangga diantaranya (Tabel. 1.4), yaitu Pulau Berhala, Pulau Batu Mandi, Pulau Iyu

²⁰ Lihat artikel Ribuan Pulau di Indonesia Akan Tenggelam , 15 Oktober 2002, Jakarta , Kompas diambil dari website perpustakaan.bappenas.go.id/, juga lihat Ribuan Pulau di Indonesia Akan Tenggelam , , <http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T73T3AT9SDTSANN1M>, 8 Oktober 2008.

²¹Lihat artrikel Pulau-pulau Terluar dan Batas NKRI didownload dari website dalam <http://geomatika.its.ac.id/archives/pulau-pulau-terluar-dan-batas-nkri/> , published 18 Januari 2006, diunduh 12 Juli 2010.

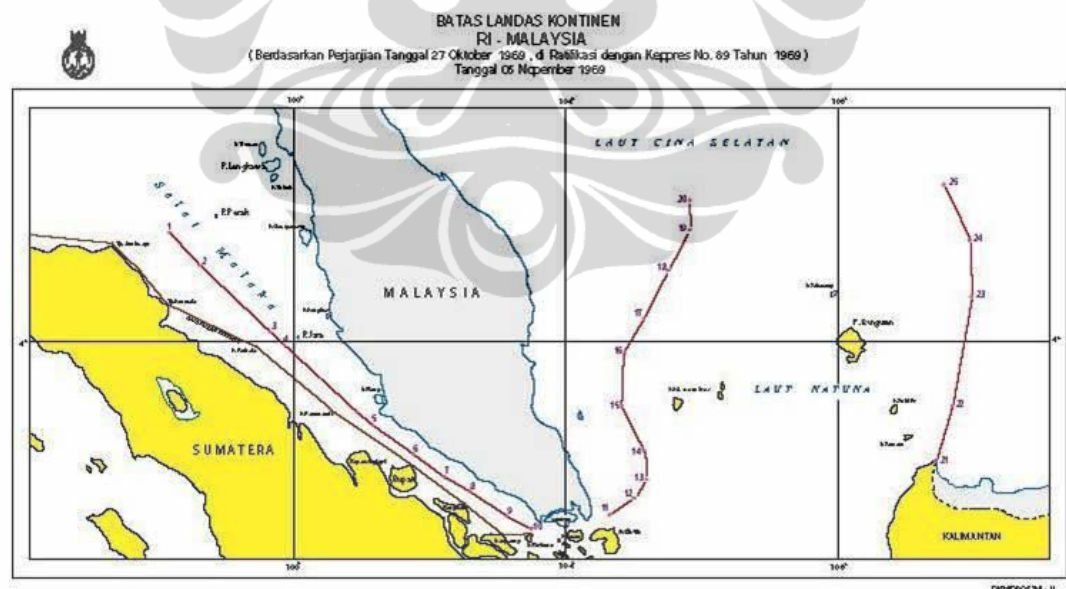
²² *Ibid*, Pulau-pulau Terluar dan Batas NKRI.

²³Andi Iqbal Burhanuddin, *Ambalat dan Pemberdayaan Pulau Perbatasan*, Rabu 10 juni 2009, <http://kendariexpress.com>, diunduh 17 Februari 2010.

Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Palompong, Pulau Batu Berhanti dan Pulau Nongsa²⁴.



Gambar 1.3. Peta Batas Laut Teritorial Indonesia - Singapura.
Sumber: www.google.com



Gambar 1.4. Peta Perbatasan Wilayah Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka
Sumber: Dishidros TNI AL.

²⁴ Markas Besar TNI Angkatan Laut, *Pulau-Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Dishidros TNI AL, 2003, hal: 85-92.

Menurut Freddy Numberi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan **pengelolaan pulau-pulau kecil perbatasan** dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan²⁵. Sudah saatnya Negara Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap pulau-pulau terluar ini untuk memberikan keuntungan maksimal bagi negara. Menurut Juwono Sudarsono, sebagai Menteri Pertahanan saat itu, pengamanan Pulau terluar wilayah Republik Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 2,5 hingga Rp 3 triliun pertahun²⁶.

Sebagian besar daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang masih sangat terbatas. Daerah perbatasan banyak yang tidak diperhatikan tingkat kesejahteraan warganya dan tidak tergarap dengan baik. Menurut Syarifuddin dalam Sunit dan Sri, menyebutkan ada empat indikator empirik yang dapat menjadi tolok ukur rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu²⁷:

- 1). Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah pendidikan dan ketrampilan produktif, dan tingkat sosial ekonomi yang rendah.
- 2). Potensi sumberdaya alam yang belum dikembangkan.
- 3). Lokasi geografi tidak terjangkau/terisolir/tidak ada akses.
- 4). Keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi. Bahkan sebagian dari pulau terluar tersebut merupakan daerah yang tidak berpenghuni. Ini adalah kelemahan paling mendasar Indonesia bila bertarung di sidang internasional²⁸.

²⁵ Abubakar, Mustafa, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*, Jakarta, Kompas, 2006, hal xi-xii.

²⁶ Artikel, *Pengamanan Pulau Terluar RI Butuh Dana Rp. 3 Triliun*, diunduh dari <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7237>

²⁷ Sunit Agus dan Sri Wahyuni, *Integrasi Pelayanan Sosial Sebagai Upaya Pemberdayaan Penduduk Miskin di Pedalaman Pesisir*, Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2008, hal: 298.

²⁸ www.tandef.net, *12 Pulau Terluar Rentan Diambil Negara Asing*

Pandangan dimasa lalu bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah mengakibatkan kawasan perbatasan di beberapa daerah menjadi daerah yang kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan khususnya bidang sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat di daerah perbatasan pada umumnya miskin dan akibatnya banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Di lain pihak negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya.

Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan pembangunan di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan adalah dengan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 (Keppres No.7 tahun 2005) dan Perpres No. 78 tahun 2005, yaitu²⁹:

- 1). Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
- 2). Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- 3). Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Presiden No 78 tahun 2005 menyebutkan bahwa pengelolaan pulau-pulau terluar harus mengandung prinsip Wawasan Nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan mengacu kepada tata ruang wilayah³⁰. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pengamanan dan peningkatan kehadiran Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatannya terhadap pulau-

²⁹Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, pada BAB II Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pasal 2.

³⁰*Ibid*, pasal 3.

pulau terluar di perbatasan antar negara guna mewujudkan itikad sebagai pemilik kedaulatan yang sah dan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi penduduk yang berada di daerah perbatasan dan menegaskan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsepsi Wawasan Nusantara³¹.

Peraturan Presiden masih dianggap tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan masih adanya pihak-pihak yang berusaha melepas pulau-pulau kecil yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam situs *www.privateislandsonline.com*³², dikatakan bahwa ada tiga pulau di kawasan Mentawai yang akan dijual dengan harga yang berbeda sesuai dengan luas wilayah dan potensi yang terdapat di pulau tersebut. Salah satunya ditawarkan dengan harga sekitar Rp. 136 miliar rupiah. Begitu juga dengan Pulau Panjang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan luas sekitar 33 hektare dan Pulau Meriam Besar dengan luas lima hektare yang diiklankan akan dijual melalui situs *www.karangasemproperty.com*³³. Kalau dilihat dari lokasi pulau-pulau tersebut, pulau-pulau yang akan dijual masih berada dalam wilayah NKRI dan bukan merupakan pulau-pulau terluar. Usaha penjualan pulau-pulau tersebut merupakan usaha untuk mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menyebabkan berkurangnya wilayah negara. Dengan sulitnya aksesibilitas ke pulau-pulau tersebut dan rendahnya tingkat pengawasan, maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi dengan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di wilayah Selat Malaka.

³¹Lihat dalam artikel www.deplu.go.id/pages/News.aspx?IDP=38&I=id, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2003.

³²Dalam situs tersebut ditampilkan pulau-pulau yang akan dijual namun dengan dali hanya menjual fasilitas resort yang ada di pulau tersebut. Namun saat ini apabila membuka situs tersebut, maka peta lokasi pulau yang akan di jual yang termasuk wilayah Indonesia, sudah tidak dapat diakses lagi. Hanya terdapat pulau-pulau yang berada di wilayah Thailand, Philipina, India, Malaysia, Srilangka, Maldiva dan Vietnam.

³³Situs tersebut merupakan milik warga negara Belanda bernama Naauw, tinggal di Jl Dharmawangsa, Kerta Sari, Padang Kerta, Karangasem, Bali, dan merupakan markas Karangasem Property. Pada saat ini, laman tersebut tidak dapat diakses. Namun berita terkait dapat dilihat di <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/11/time/131632/idnews/865313/idkanal/10>.

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu adanya pemberdayaan yang berdampak juga terhadap peningkatan kesejahteraan. Dalam suatu teori Ketahanan Nasional menurut Wan Usman, bahwa suatu Ketahanan Nasional itu pada prinsipnya merupakan keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik itu berupa gangguan dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya dikatakan bahwa Ketahanan Nasional tersebut dapat dipandang sebagai mata uang dengan dua sisi yaitu keamanan dan kesejahteraan. Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yaitu partisipasi masyarakat yang demokratis dalam hal ini adalah upaya pemberdayaan³⁴. Pemberdayaan dengan menghadirkan kegiatan ekonomi, di pulau-pulau terluar RI merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif agar negara lain tidak mudah mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk penangkalan dan usaha menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penangkalan ditujukan untuk meniadakan keinginan pihak lain untuk berbuat sesuatu yang merugikan, apapun juga akibatnya. Perkataan merugikan dapat saja berbentuk sebagai akibat serangan fisik, pendudukan, ataupun berupa infiltrasi, subversi, sabotase dan semacamnya³⁵

Posisi Indonesia terletak dipersimpangan jalan politik dan perdagangan dunia, membentang panjang dari Timur ke Barat serta melebar dari Utara ke Selatan. Posisi ini menempatkan Indonesia, secara geopolitik, menjadi penting bagi kawasan regional dan global, serta secara geostrategi, menjadikan Indonesia teramat vital bagi pertahanan negara-negara kawasan dan global untuk mengawal kepentingan nasionalnya masing-masing. Di sisi Indonesia, geopolitik dituangkan dalam suatu doktrin nasional yang disebut wawasan nusantara dengan politik luar negeri yang bebas aktif, dan geostrategi diwujudkan menjadi suatu konsep ketahanan nasional (kesatuan ideologi,

³⁴ Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pangkajian Ketahanan Nasional UI, 2003, hal: 95.

³⁵ Sunardi, RM, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, Jakarta, PT Kuarternita Adidarma, 2004, hal: 64.

politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan). Sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, maka Indonesia harus menjaga keutuhan wilayahnya. Pulau-pulau terluar biasanya merupakan daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau ini batas negara ditentukan. Untuk itu maka seharusnya pulau-pulau ini mendapat perhatian serius serta pengawasan yang lebih ketat lagi agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah NKRI, secara khusus pengawasan dan perhatian terhadap pulau-pulau yang berpotensi kuat sengketa dengan negara tetangga.

Pulau-pulau perbatasan mempunyai beberapa macam permasalahan, diantaranya adalah:³⁶

- 1). Daerahnya merupakan daerah tertinggal, terisolasi penduduknya.
- 2). Penduduknya sedikit bahkan ada yang tidak berpenduduk dan umumnya aksesibilitas sulit / sulit dijangkau karena keterbatasan sarana dan prasarana.
- 3). Bisa dijadikan tempat singgah bagi pelaku kejahatan seperti penyelundupan narkoba, senjata, perdagangan manusia, dan lain-lainnya.
- 4). Dapat diklaim sebagai milik negara lain.
- 5). Pengawasan dan pengamanannya sulit.
- 6). Mahalnya pembangunan sarana dan prasarana³⁷.

Kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang terisolir juga menjadi beban bagi pemerintah daerah di wilayah tersebut. Dukungan dana dari pusat yang terbatas, maraknya aktifitas ilegal yang dapat mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak, termasuk rawannya tingkat kriminalitas di wilayah

³⁶ Kamaludin, L. M, *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*, Malang, UMM, 2005 hal: 82.

³⁷ Agoes, Eddy R, *Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara* dalam Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis UI Ke 53, Jakarta, FHUI, 2003

perbatasan menyebabkan tugas mereka mengamankan wilayah perbatasan menjadi cukup sulit. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat di wilayahnya semakin sulit karena tidak diimbangi dengan peningkatan tingkat perekonomian secara nyata. Langkah yang akhirnya ditempuh kebanyakan yang dapat dilihat adalah pemerintah daerah sering mengambil kebijakan parsial yang hanya menguntungkan daerahnya sendiri dan mengesampingkan keuntungan menyeluruh demi kepentingan nasional. Hal ini seringkali menimbulkan friksi dengan daerah lain ataupun dengan pemerintah pusat yang melihat masalah perbatasan ini dari kepentingan yang lebih luas³⁸.

Kesan kurangnya perhatian dari Pemerintah terhadap kawasan perbatasan selalu dikaitkan dengan pendekatan pembangunan yang digunakan dimasa lampau, yang lebih menekankan pada keamanan (*security*) dibanding dengan peningkatan kesejahteraan (*prosperity*). Apabila kita memperhatikan kondisi sosial, politik, dan keamanan pada masa itu, terdapat kesan kuat bahwa dalam pengembangan kawasan perbatasan lebih menekankan aspek pertahanan dan pendekatan keamanan. Namun pada saat ini dimana situasi keamanan yang semakin kondusif dan adanya proses globalisasi yang ditandai dengan berbagai kerjasama ekonomi baik regional maupun subregional, maka pendekatan keamanan perlu disertai dengan pendekatan kesejahteraan secara seimbang. Dipihak lain, beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia telah mengembangkan daerah perbatasannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang telah maju dengan berbagai sarana dan prasarana fisik yang lengkap serta sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dari berbagai masalah tersebut sudah tentu harus menjadi prioritas dalam menangani masalah pulau-pulau terluar yang berada diperbatasan. Apalagi keberadaan pulau-pulau terluar tersebut sangatlah strategis. Namun banyak pihak yang merasa berkepentingan terhadap pulau terluar tersebut

³⁸ Nainggolan, Poltak Partogi, *Batas Wilayah Dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta, Tiga Putra Utama, 2004, hal: 76.

yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya operasionalnya dan tidak efektifnya pemberdayaan dan pengelolaan pulau-pulau terluar tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri dimana Indonesia mempunyai dana yang hanya sedikit dan juga masih sedikitnya sarana yang dapat digunakan dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar. Banyak pihak yang merasa berkompeten dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar. Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Perhubungan Laut, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan kemungkinan masih ada pihak lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan siaran pers dalam website www.dkp.go.id mengatakan bahwa KKP mempunyai andil yang penting dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar dengan mengacu kepada UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, dan Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2005. Selanjutnya KKP, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menetapkan kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang didasarkan pada pendekatan konservasi, ekonomi, politik dan keamanan.

Dalam hal menjaga pulau terluar, pihak TNI AL misalnya melakukan penjagaan dengan patroli disekitar pulau-pulau terluar dalam rangka pengamanan pulau-pulau terluar dimana TNI AL mengacu pada peran universalnya yaitu peran militer, diplomasi dan polisionil³⁹. TNI AD melaksanakan fungsi teritorialnya dengan pengamanan pulau-pulau terluar dimana pasukan marinir masuk dibawah komandonya. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sistem *border management*nya menyatakan bahwa konsep sistem pengamanan terpadu atau *border management* merupakan sistem pengamanan yang melibatkan seluruh komponen untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga bagian perbatasan dari suatu negara. Pengamanan bertujuan untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang biasa

³⁹ Markas Besar TNI Angkatan Laut, *Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya dan Pokok-Pokok Pikiran TNI Angkatan Laut Tentang Keamanan Di Laut*, Jakarta, Mabes TNI AL, 2002.

dilakukan di daerah perbatasan, meliputi penyelundupan, *illegal logging*⁴⁰, *illegal fishing*⁴¹, imigran gelap dan sebagainya⁴². Dari data yang didapat⁴³, menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan yang dilakukan secara ilegal yang terjadi di sekitar Selat Malaka, yang dapat menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit.

No	Kegiatan	Jumlah Kejadian		
		Th. 2009	Th. 2010	Th.2011
1	Illegal Logging	3	2	1
2	Illegal Fishing	11	1	Belum ada data
3	Penyelundupan	42	21	Belum ada data
4	Imigran Gelap	5	4	Belum ada data
5	Perompakan dan Pembajakan	3	6	3

Tabel 1.5. Data kegiatan ilegal di wilayah Selat Malaka tahun 2009–Maret 2011

Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Pengambilan penelitian tesis di pulau-pulau terluar yang berada di sekitar Selat Malaka karena peneliti melihat betapa pentingnya pemberdayaan dan pemanfaatan yang seharusnya dilakukan di Selat Malaka yang merupakan selat dengan aktivitas tinggi, sehingga kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai serta dapat meningkatkan Ketahanan Negara.

⁴⁰ Dalam pendekatan kata-kata, Illegal logging adalah pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin, <http://my.opera.com/andikosutanmancayo/blog/2006/12/07/illegal-logging>.

⁴¹ Illegal fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu Negara. Artinya kegiatan penangkapan yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari Negara bersangkutan. Praktek terbesar dalam IUU fishing, pada dasarnya adalah poaching atau pirate fishing. Yaitu penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain pencurian ikan oleh pihak asing

⁴² <http://www.detiknews.com/read/2010/02/18/220757/1302455/10/AmankanPulauTerluarPolriAkanBentukBorderManagement>

⁴³ Wawancara dengan Paban II Sopsal, Letkol Laut (P) Ribut Eko, di ruang Paban II Ops, Gedung B2, Lantai 6, tanggal 23 Maret 2011.

1.2. Identifikasi Permasalahan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut:

1.2.1 Dengan melihat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apakah sudah dapat menjangkau pulau-pulau terluar Indonesia, khususnya pulau-pulau terluar di sekitar Selat Malaka. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui kondisi terkini pulau-pulau terluar yang berada di Selat Malaka.

1.2.2 Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia belum mampu dalam mengantisipasi dan memanfaatkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan untuk dapat menjadi bagian NKRI. Pemerintah Indonesia harus mempunyai langkah antisipasi agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali terhadap pulau-pulau terluar yang lain.

1.2.3 Terdapat 92 pulau terluar yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini dapat menyebabkan terkikisnya rasa nasionalisme penduduk yang ada di pulau terluar dan memungkinkan untuk terlepas seperti halnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

1.2.4 Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah. Namun kenyataannya sumber daya alam tersebut masih kurang dimanfaatkan terutama sumber daya maritim.

1.2.5 Dengan adanya pulau-pulau terluar yang mempunyai nilai strategis bagi negara Indonesia, maka diperlukan usaha-usaha untuk memberdayakan pulau-pulau tersebut untuk meningkatkan ketahanan nasional. Untuk itu maka haruslah dilakukan pembangunan terhadap pulau-pulau terluar tersebut.

1.2.6 Pulau-pulau terluar, terutama yang ada di sekitar Selat Malaka, masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan pulau-pulau tersebut dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan ataupun diambil oleh negara tetangga yang berusaha untuk memanfaatkan pulau-pulau terluar tersebut untuk kegiatan tertentu. Untuk itu perlu adanya pengamanan yang lebih baik terhadap pulau-pulau terluar tersebut.

1.2.7 Melihat jarak dan letak geografi yang jauh, maka pulau-pulau terluar di sekitar Selat Malaka diharapkan dapat dengan mudah dijangkau sehingga dapat dipantau dengan mudah. Hal ini dapat dicapai apabila pemerintah meningkatkan sarana transportasi atau perhubungan ke pulau terluar yang ada di wilayah selat Malaka.

1.2.8 Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi kejadian Sipadan Ligitan terulang kembali, perlu melakukan pemberdayaan pulau-pulau terluar di sekitar Selat Malaka dengan memperhatikan pertahanan militer dan non militer.

1.2.9 Pulau-pulau terluar di wilayah Selat Malaka sangatlah perlu dikelola dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan keamanan.

1.3. Pembatasan Masalah.

Pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi pemberdayaan yang dilakukan terhadap delapan pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka yang menjadi objek penelitian pada tesis ini, peran lembaga dan masyarakat dalam meningkatkan Ketahanan Negara.

1.4. Perumusan Masalah.

Pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dalam penelitian ini merupakan pulau-pulau terluar yang mempunyai titik dasar dalam penentuan batas wilayah negara. Dengan berpatokan kepada titik dasar tersebut, maka kedaulatan wilayah teritorial Indonesia ditentukan, dan menjadi perbatasan wilayah laut dengan negara tetangga. Dengan adanya fungsi strategis penentu kedaulatan negara maka pemberdayaan pulau-pulau terluar khususnya yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, harus dilakukan dengan melihat dari latar belakang permasalahan yang ada. Untuk itu, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dan menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 1.4.1 Bagaimana kondisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka?
- 1.4.2 Bagaimana memberdayakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka?
- 1.4.3 Apa yang seharusnya menjadi strategi pemberdayaan di pulau-pulau terluar yang tidak berpenduduk untuk mempertahankan pulau-pulau tersebut dari ancaman terhadap keutuhan NKRI dan dalam meningkatkan Ketahanan Negara?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.5.1 Tujuan Penelitian.

Terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran tentang kondisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni yang berada di sekitar Selat Malaka.

- 2) Memberikan analisa tentang peranan pemerintah dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka.
- 3) Menentukan alternatif strategi pertahanan baik militer maupun non militer untuk mempertahankan pulau-pulau tersebut dari ancaman terhadap keutuhan NKRI dan dalam meningkatkan Ketahanan Nasional.

1.5.2 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat digunakan dalam mencari informasi terkini terhadap pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka.
- 2) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan pemberdayaan pulau-pulau terluar khususnya pulau-pulau yang tidak berpenghuni.
- 3) Menjadi media informasi kepada khalayak luas mengenai betapa pentingnya pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan meningkatkan Ketahanan Negara.

1.6. Sistematika Penulisan.

Dalam melakukan kegiatan penelitian maka tulisan ini akan dibagi dalam lima bab, yang meliputi:

Bab 1 : Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2 : Kajian Pustaka, menguraikan berbagai teori, yaitu konsep pemberdayaan, konsep pulau terluar tidak berpenghuni, konsep pengamanan pulau terluar dalam konteks geostrategis, pendekatan teori geopolitik dan wawasan nusantara serta pendekatan teori ketahanan nasional.

Bab 3 : Metode Penelitian, menguraikan tentang penentuan lokasi penelitian, sumber-sumber data, variabel-variabel pemberdayaan, pengumpulan data, pengolahan data dan alur penelitian.

Bab 4 : Pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, menguraikan kondisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka dan memberikan gambaran aspek pemberdayaan pulau-pulau terluar di sekitar Selat Malaka.

Bab 5 : Pemberdayaan, partisipasi, kelembagaan dalam pembangunan, menguraikan strategi pembangunan wilayah, pemberdayaan ruang negara sebagai potensi pertahanan, partisipasi masyarakat untuk kepentingan ekonomi, peran pemerintah yang responsif terhadap pulau terluar, dan aktualisasi konsepsi ketahanan nasional.

Bab 6 : Kesimpulan dan Saran, menguraikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap dapat dijadikan masukan dalam rangka pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu:⁴⁴

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan serta mampu

⁴⁴Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hal: 58.

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka⁴⁵.

Menurut Rappaport, pemberdayaan merupakan konsep yang muncul setelah adanya perencanaan advokasi dan perencanaan komunikatif. Sehingga pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau mekanisme dimana sekelompok orang, organisasi atau masyarakat memiliki penguasaan atas masalah yang dialami. Dalam hal ini dikemukakan bahwa suatu pemberdayaan dapat dikatakan berdaya apabila dapat menemukan hasil yang dicapai yaitu dapat memecahkan suatu permasalahan dan mendapatkan hasil yang dapat bermanfaat bagi kelompok orang tersebut atau suatu organisasi⁴⁶.

Menurut Ife⁴⁷, yang berkenaan dengan pemberdayaan didefinisikan sebagai berikut:

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use ini lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to work the system and so on.

Lebih lanjut menurut Ife, pemberdayaan mengandung dua arti inti, yaitu yang mempunyai kuasa (kekuasaan) dan yang dikuasai (kelompok lemah). Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup merupakan kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan merupakan kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

⁴⁵ *Ibid*, Suharto, hal: 210 – 224.

⁴⁶ Rappaport, J, *Studies in Empowerment: Introducing to the Issue, Prevention In Human Issue*, USA, 1987, hal: 122.

⁴⁷ Ife, Jim, *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*, Australia, Longman, 1995, hal: 61-64.

3. Ide atau gagasan merupakan kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga merupakan kemampuan menjangkau, menggunakan dan memperngaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Sumber-sumber merupakan kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi merupakan kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas tugas kehidupannya.

Menurut Kieffer dalam Suharto⁴⁸, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif. Selanjutnya Parson *et.al.* dalam Suharto juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan, yang merujuk pada⁴⁹ :

⁴⁸ *Locit*, Suharto, hal 63.

⁴⁹ *Ibid.*

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Menurut Mely G Tan⁵⁰, pemberdayaan bisa diberi batasan luas sebagai penguasaan atas aset material, sumber-sumber intelektual dan ideologi. Aset material mencakup aset fisik, manusiawi atau finansial, seperti tanah, air, tubuh manusia, pekerjaan dan uang atau akses kepada uang. Sumber-sumber intelektual mencakup pengetahuan, informasi dan gagasan (ide), sedangkan penguasaan atas ideologi berarti kemampuan untuk mengembangkan, menyebarkan, mempertahankan dan mempranatakan perangkat tertentu dari kepercayaan, nilai, sikap dan perilaku.

Pengertian pemberdayaan menurut Pranaka⁵¹, secara garis besar pengertian pemberdayaan adalah mengamanatkan perlunya power atau kekuasaan dan menekankan keberpihakan kepada *the powerless*, yang pada intinya ingin semua memiliki kekuatan yang menjadi dasar dari proses aktualisasi eksistensi atau memberikan *power* kepada *the powerless* untuk dapat melaksanakan proses aktualisasi eksistensi. Menurutnya penekanan pemberdayaan ada dua yaitu penekanan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kemudian adanya kecenderungan menekankan proses menstimulasi,

⁵⁰ Tan, Mely G, *Perempuan dan Pemberdayaan dalam Kumpulan Karangan tentang Perempuan*, Program Studi Kajian Wanita, Pascasarjana UI, 1997, hal: 9.

⁵¹ Pranaka, AMW, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS, 2002, hal: 56-57.

mendorong, memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Menurut Narayan⁵², pemberdayaan (*empowerment*) adalah memperluas kebebasan dalam memilih dan bertindak, yang berarti meningkatkan otoritas yang dimiliki dan melaksanakan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya (*resources*) yang dimiliki dan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam hal ini dikemukakan bahwa pemberdayaan merupakan nilai intrinsik yang juga mempunyai nilai-nilai instrumen. Pemberdayaan adalah relevan baik untuk individu maupun kolektif dan juga dapat dipergunakan dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik sekalipun. Terminologi pemberdayaan juga dapat digunakan untuk karakteristik rumah tangga, masyarakat miskin dan aktor-aktor lainnya pada tingkat global.

Menurut Amri Jahi, pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai upaya untuk memimpin orang-orang agar belajar memimpin diri mereka sendiri. Pemberdayaan selalu berhubungan dengan kekuasaan untuk mengatur seseorang atau sesuatu. Respon pada kekuasaan ini bisa berupa kepatuhan, penolakan atau manipulasi. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan ialah suatu proses dimana stake holder dapat berubah dari tidak berdaya menjadi percaya diri secara kolektif untuk mampu. Selain adanya faktor kekuasaan, maka menurut Amri Jahi bahwa pemberdayaan juga melibatkan aspek kognitif, psikologis, ekonomi dan politik. Aspek kognitif menunjukkan kemampuan stake holder untuk memahami situasi subordinasi dalam masyarakat pada tingkat mikro maupun makro dan juga kemampuan membuat keputusan untuk mengubah kebudayaan dan norma yang menghambat perkembangan mereka. Aspek psikologis menunjukkan kemampuan stake holder untuk mengembangkan sikap bahwa mereka mampu memperbaiki situasi dan akan berhasil. Aspek ekonomi menunjukkan bahwa stake holder harus memiliki aktivitas yang produktif agar

⁵² Narayan, Deepa, *Empowerment and Poverty Reduction*, Washington DC, The World Bank, 2002, hal: 14.

memiliki penghasilan dan otonomi keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Aspek politik menunjukkan kapasitas stake holder untuk menganalisis situasi sosial politik dan kemampuan mereka mengorganisasi dan memobilisasi rekan-rekannya untuk melakukan perubahan sosial.⁵³

Sesuai dengan beberapa pengertian diatas dan dihubungkan dengan Tesis ini yaitu tentang Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar yang Tidak Berpenghuni di Sekitar Selat Malaka maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses atau mekanisme dimana sekelompok orang, organisasi atau masyarakat memiliki penguasaan atas masalah yang dialami dan juga merupakan sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Dalam hal ini dikemukakan bahwa suatu pemberdayaan dapat dikatakan berdaya apabila dapat menemukan hasil yang dicapai yaitu dapat memecahkan suatu permasalahan dan mendapatkan hasil yang dapat bermanfaat bagi kelompok orang tersebut atau suatu organisasi. Obyek yang dijadikan sasaran pemberdayaan bisa bersifat fisik maupun non fisik atau segala aspek, bisa berupa sumberdaya manusia maupun organisasi atau lembaga.

2.1.1 Pemberdayaan Ruang Negara.

Ruang didefinisikan sebagai tempat atau wadah bagi manusia atau makhluk lainnya yang hidup dalam rangka melakukan kegiatan untuk melangsungkan kehidupan di dunia.⁵⁴ Apabila di analisa lebih lanjut definisi tersebut mengandung makna antara lain, *pertama* sebagai wadah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, *kedua* ruang dapat dipakai untuk kegiatan dalam

⁵³Jahi, Amri, *Pemberdayaan: Dari Teori Ke Praktek*, diunduh dari Eeqbal.blogspot.com hari Jumat, tanggal 27 Maret 2009

⁵⁴Supriyatno, Budi, *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional (suatu strategi dan Pemikiran)*, dalam Supriyatno, Budi, *Manajemen Tata Ruang*, Tangerang, CV. Media Berlian, 2009, hal: 26 - 27.

rangka melangsungkan kehidupan. Dengan demikian ruang hidup lainnya untuk melakukan kegiatan kelangsungan hidupnya.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikatakan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.⁵⁶

Menurut Supriyatno, ruang merupakan satu wadah yang mengandung atau menerima kegiatan materi yang merupakan alat untuk menempatkan kegiatan dengan memberikan struktur-struktur dan batas-batas dimana kegiatan itu berlangsung. Ruang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas hidup dan makhluk lainnya untuk melangsungkan hidupnya yang terdiri dari darat, laut dan udara termasuk di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah.⁵⁷

Penelitian tentang pemberdayaan pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka ini tidak terlepas dengan bagaimana untuk memberdayakan ruang yang ada. Khususnya ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, dan juga kekayaan alam yang terdapat di wilayah nusantara⁵⁸, perlu dilakukan pemberdayaan yang dilakukan dengan tujuan agar berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan wilayah ruang negara tersebut dapat menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁵⁹

⁵⁵ *Ibid*, hal: 27.

⁵⁶ Lihat Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bab I pasal 1 ayat (1).

⁵⁷ *Op cit*.

⁵⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Bab I, pasal 1 ayat 2.

⁵⁹ Lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, alenia keempat.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara yang kesemuanya termasuk ruang di dalam bumi termasuk sumberdaya alam yang ada, merupakan milik bangsa Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁶⁰

Di Indonesia berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti wilayah, kawasan, daerah regional, area, ruang dan istilah-istilah sejenis, banyak dipergunakan dan saling dapat dipertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda. Secara teoritik, tidak ada perbedaan nomenklatur antara istilah wilayah, kawasan dan daerah. Semuanya dikatakan sebagai region atau wilayah. Oleh sebab itu definisi konsep wilayah adalah adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Menurut Rustiadi, wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis⁶¹.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional⁶².

⁶⁰Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶¹Lihat Mulyawan, Iwan, dalam Konsep Wilayah dan Pusat Pertumbuhan Pengembangan Wilayah yang dapat diunduh dari <http://moeljawan.blogspot.com/2010/03/konsep-wilayah-dan-pusat-pertumbuhan.html>.

⁶²Lihat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 point 17.

Pemanfaatan wilayah negara harus dapat dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan tata ruang⁶³ yang harus disusun secara komprehensif, sistematis dan integral.⁶⁴ Adanya tata ruang akan menjamin kelestarian ekosistem dan daya dukung lingkungan, di samping terdukungnya kepentingan kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan negara. Oleh karena itu penyusunan tata ruang harus mempertimbangkan secara serasi, selaras dan seimbang, kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dalam kaitannya dengan tata ruang wilayah negara Indonesia, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁶⁵

- 1) Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
- 2) Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- 3) Kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, hankam, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan dan geostrategi, geopolitik dan geoekonomi.

Menurut Glasson dalam Tarigan⁶⁶ ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar kita bisa membedakan lokasi yang satu dari lokasi yang lainnya. Hal ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis.

⁶³ Dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

⁶⁴ Wahyono, *Geopolitik Dan Geostrategi RI Untuk PJPT II Dalam Rangka Implementasi Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional*, Kertas Karya Perorangan, Lemhanas, 1991, hal: 59.

⁶⁵ Supriyatno, Budi, *Manajemen Tata Ruang*, Tangerang, CV. Media Berlian, 2009, hal: 53.

⁶⁶ Tarigan, R, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.

Pandangan objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri atau gejala alam di setiap wilayah. Wilayah bisa dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimilikinya atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari ciri-ciri diatas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 25A, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Apabila pengertian wilayah ini mengacu pada pengertian unit geografis, maka wilayah ini didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponennya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya. Dengan demikian batasan wilayah tidaklah selalu berbentuk fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Dengan kata lain bahwa wilayah menekankan interaksi antarmanusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu⁶⁷.

Menurut Isard dalam Rustandi, menganggap pengertian suatu wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu. Menurutnya wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (*meaningful*) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalamnya menangani permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial-ekonomi. Pengertian wilayah sangat penting untuk diperhatikan apabila berbicara tentang program-program pembangunan yang terkait dengan pembangunan wilayah dan pengembangan kawasan. Pembangunan wilayah terkait dengan pengembangan fungsi tertentu dari suatu unit wilayah, mencakup fungsi sosial, ekonomi, budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan⁶⁸.

⁶⁷ Rustandi, E, et al, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, edisi pertama, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009.

⁶⁸ *Ibid.*

2.1.2 Partisipasi Masyarakat.

Pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di wilayah Selat Malaka tidak terlepas dari partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat terdekat dari pulau-pulau tersebut. Masyarakat terdekat pulau dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakatlah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai idea atau aspirasi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut. Peran serta masyarakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang dinyatakan bahwa dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar yang terdapat di wilayah perbatasan, peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk mengembangkan pembangunan dan menjaga serta mempertahankannya.⁶⁹

Mengenai partisipasi atau peran serta masyarakat, dinyatakan bahwa partisipasi menurut Soerjono Soekanto dalam Sismarni merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu⁷⁰.

Sedangkan menurut Midgley dikatakan, *participation is not only one of the goals of social development but an integral part of the social development process.*⁷¹ Bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan social.

⁶⁹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pada Bab VII, pasal 19.

⁷⁰Sismarni, *Teori Partisipasi Dalam Dinamika Sosial*, di download dari <http://lppbi-fiba.blogspot.com/2009/03/teori-partisipasi-dalam-dinamika-sosial.html>, pada tanggal 2 Mei 2011.

⁷¹ Midgley, James, *Community Participation, Social Development, And The State*, by Methuen & Co.Ltd, 11 New Fetter Lane, London, first published in 1986, hal. 3

Menurut Wazir, *et al.*,⁷² partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Sedangkan Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁷³ Pengamatan di lapangan menunjukkan dengan jelas bahwa salah satu unsur penting yang ikut menentukan jenis dan intensitas dampak *local capture* terhadap kesejahteraan masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Aziz⁷⁴, dari aktivitas pembangunan infrastruktur, keamanan, penyediaan, sampai kegiatan yang menyangkut masalah lingkungan, semua memberi hasil lebih baik bila dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Hal ini menuntut peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mendukung usaha pemerintah dalam melakukan pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di wilayah Selat Malaka.

Dalam melakukan pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di wilayah Selat Malaka maka dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada

⁷² Wazir, A.W, *et al.*, ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project, hal: 29.

⁷³ Pengertian ini diberikan Isbandi Rukminto, dapat dilihat dalam website <http://aj-belajar.blogspot.com/2011/02/defenisi-partisipasi-masyarakat.html>.

⁷⁴ Aziz, Iwan J, *Unsur Kelembagaan Menentukan*, dalam *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Aziz, J Iwan, *et al*, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta, PT Gramedia, 2010, hal: 68-69.

masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.⁷⁵

Menurut Kartasasmita⁷⁶, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemandirian adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai suatu bangsa sehingga bangsa itu dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berlandaskan kekuatannya sendiri. Ini berarti untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan. Kemandirian juga tercermin pada kemampuan bangsa untuk memenuhi sendiri kebutuhan yang paling pokok. Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu⁷⁷:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan

⁷⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

⁷⁶ Kartasasmita, Ginanjar, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Makalah pada sarasehan DPD Golkar Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 1997.

⁷⁷ *Ibid.*

(*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksplitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”⁷⁸. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu⁷⁹.

Untuk dapat mencapai tujuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut maka pemerintah harus berusaha memahami masyarakat dengan tujuan agar dapat melakukan tindakan yang tepat sehingga mampu memahami konteks dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan, mengevaluasi sistem pelayanan kemanusiaan yang ada dan mengerti struktur pengambilan keputusan yang ada di wilayah tersebut⁸⁰. Dalam hal ini menurut Suharto, bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama

⁷⁸ Chambers, Robert, *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press, 1995.

⁷⁹ Kartasasmita, Ginanjar, *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah pidato pada Peringatan Hari Jadi ke-28 Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 1996.

⁸⁰ Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.

atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama.

Untuk dapat mempelajari dan memahami masyarakat, lebih lanjut menurut Suharto, harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya yaitu⁸¹:

- 1) Nama dan batas wilayah serta jarak dari kota atau masyarakat lain.
- 2) Demografi yaitu jumlah penduduk, distribusi usia, jumlah anggota keluarga maupun status keluarga.
- 3) Sejarah wilayah yaitu tentang kapan, mengapa dan oleh siapa daerah tersebut dikembangkan, kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan wilayah, perubahan karakteristik penduduk, alasan-alasan mengapa orang datang dan pergi di daerah tersebut.
- 4) Geografi dan pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap masyarakat yaitu pengaruh cuaca, interaksi sosial, pembangunan ekonomi, suplai air, listrik dan sebagainya.
- 5) Ekonomi dan bisnis lokal yaitu dilihat dimana industri utama, bisnis, produksi wilayah, jenis pekerjaan yang ada, keterampilan kerja yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dan prospek pertumbuhan ekonomi daerah tersebut selanjutnya.
- 6) Distribusi pendapatan yaitu pendapatan rata-rata bagi penduduk, kelompok minoritas, jumlah orang dan keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah orang dan keluarga yang menerima bantuan sosial dan sebagainya.
- 7) Fasilitas publik dan program-program pendidikan yaitu ketersediaan fasilitas publik dan lokasi serta jenis sekolah yang ada.
- 8) Keamanan publik, sumber informasi dan opini publik yaitu kelengkapan akan fasilitas keamanan publik, adanya sumber informasi yang memberikan informasi kepada masyarakat serta dapat memberikan

⁸¹ *Ibid.*

informasi khususnya dari pembicara-pembicara utama dari berbagai kelompok masyarakat.

Dengan melihat beberapa aspek yang telah disebutkan diatas maka dalam usaha pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan terarah dan tepat sasaran. Dapat disesuaikan dengan karakter masyarakat yang akan diberdayakan tersebut. Pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran harus mempunyai prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial, yaitu⁸²:

- 1) Pemberdayaan merupakan proses kolaboratif dimana pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen terpenting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- 5) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif karena permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- 6) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembanguna ekonomi secara paralel.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep

⁸² Suharto, Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung, Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997.

demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut⁸³:

- 1) Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- 2) Program pemberdayaan masyarakat harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Keikutsertaan masyarakat dapat mengeliminasi beberapa faktor yang tidak diinginkan, yaitu⁸⁴:

- 1) Keikutsertaan masyarakat akan memperkecil faktor resistensi masyarakat terhadap kebijakan daerah yang telah diputuskan. Ini dapat terjadi karena sejak proses inisiasi, adopsi, hingga pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan secara intensif.
- 2) Keikutsertaan masyarakat akan meringankan beban pemerintah daerah (dengan artian pertanggung jawaban kepada publik) dalam mengimplementasikan kebijakan daerahnya. Ini disebabkan karena masyarakat merasa sebagai salah satu bagian dalam menentukan keputusan tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak dengan serta merta

⁸³ *ibid*

⁸⁴ Wiranto, Tatag, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*, Makalah pada Sosialisai Nasional Program MFCDP, September, 2004, hal: 4-5.

menyalahkan pemerintah daerah bila suatu saat ada beberapa hal yang dipandang salah.

3) Keikutsertaan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair dalam implementasi kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan upaya menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.

2.1.3 Peran Kelembagaan.

Dalam pemberdayaan pulau terluar sudah ditekankan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Di dalam peraturan ini dikatakan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi

sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam peraturan Presiden ini dikatakan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:⁸⁵

- 1) Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
- 2) Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Dalam hal kelembagaan, dalam peraturan Presiden ini juga dikatakan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kelembagaan diatur bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh tim koordinasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, yang selanjutnya disebut tim koordinasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai beberapa wewenang, yaitu:⁸⁶

- 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan.
- 2) Mengadakan perundingan dengan Negara lain mengenai penetapan batas wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- 3) Membangun atau membuat tanda batas wilayah Negara.

⁸⁵Lihat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Bab II, pasal 2

⁸⁶Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Bab V, pasal 10

- 4) Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya.
- 5) Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- 8) Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- 9) Membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- 10) Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang, yaitu:⁸⁷

- 1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- 3) Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan

⁸⁷ *Ibid*, pasal 11.

- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pemerintah berusaha untuk menyempurnakan pengelolaan pulau terluar dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2010. Perpres ini dibuat untuk memperhatikan daerah perbatasan secara khusus. Perpres Nomor 12 tahun 2010 ini ditetapkan oleh presiden pada 28 Januari 2010 yang diberi nama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.⁸⁸

BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.⁸⁹

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNPP menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Selain itu BNPP memiliki fungsi pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. BNPP juga berfungsi untuk menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lain di kawasan perbatasan. Serta, menyusun anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

⁸⁸ Lihat Perpres Pengelolaan Daerah Perbatasan Akhirnya Terbit Selasa, 23 Februari 2010 | 05:36 WIB, dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/02/23/05365795/Perpres.Pengelolaan.Daerah.Perbatasan.Akhirnya.Terbit>

⁸⁹Lihat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bab II, pasal 3.

Susunan keanggotaan BNPP ini terdiri dari Ketua Pengarah yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Ketua Pengarah I yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan selaku Kepala BPP adalah Mendagri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP dibantu oleh sekretariat tetap yang terdiri dari Sekretaris BNPP dan tiga deputi yakni bidang pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan deputi bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.⁹⁰

2.1.4 Pembangunan Berkelanjutan.

Definisi konsep pembangunan berkelanjutan diinterpretasikan oleh beberapa ahli secara berbeda-beda. Namun demikian pembangunan berkelanjutan sebenarnya didasarkan kepada kenyataan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat. Kondisi yang demikian ini membutuhkan suatu strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien. Disamping itu perhatian dari konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya tanggungjawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat mengalokasikan sumberdaya secara adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraannya.

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam *World Conservation Strategy* (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*

⁹⁰ *Opcit*, alenia 8.

(IUCN), dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) pada 1980. PBB memilih PM Norwegia Nyonya Harlem Brundtland dan mantan Menlu Sudan Mansyur Khaled, masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua WCED. Menurut Brundtland Report dari PBB, Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “*memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan*”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial⁹¹.

Menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Our Common Future*, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai berikut:⁹²

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs.

(pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya).

Pada tahun 1991, *International Union for Conservation of Nature*, IUCN memberikan juga sebuah definisi tentang pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:⁹³

Improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. A sustainable economy is the product of sustainable development. It maintains its natural resources base, it

⁹¹Lihat *Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* dalam <http://bulletin.penataanruang.net/> edisi Januari – Februari 2009 oleh Dewan Redaksi alenia 1, diunduh pada tanggal 26 Nov 2010, pukul 16.17 WIB.

⁹²Santosa, M Achmad, *Greener Constitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Aziz, J Iwan, et al, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta, PT Gramedia, 2010, hal: 125.

⁹³ *Ibid*, Santosa, hal: 126.

can continue to develop by adapting, and through improvements in knowledge, organization, technical, efficiency and wisdom.

(Meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang hidup sementara dalam kapasitas ekosistem pendukung. Ekonomi berkelanjutan adalah sebuah produk dari pembangunan berkelanjutan. Dimana didalamnya terdapat sumberdaya alam yang dipelihara dan dapat dikembangkan dengan mengadaptasi melalui peningkatan pengetahuan, organisasi, efisiensi teknis dan kebijaksanaan).

Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai berikut:⁹⁴

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Sebabnya karena pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting. Pembangunan yang tidak berkelanjutan telah merusak dan mencemari lingkungan sedemikian rupa sehingga bersama-sama ketimpangan sosial, keduanya menjadi kendala bagi upaya meraih pertumbuhan secara berkelanjutan. Menurut Emil Salim, dalam pembangunan yang berkelanjutan

⁹⁴Lihat UU Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I, Pasal 1 ayat 3.

diperlukan tiga hal yang harus tumbuh secara bersama-sama yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.⁹⁵

Adanya kesadaran kritis tentang semakin terbatasnya sumberdaya alam yang tersedia dan kebutuhan manusia yang terus meningkat mengharuskan pendekatan sumberdaya alam yang efisien. Lebih dari itu, pemanfaatan sumberdaya tidak boleh mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam perspektif konsep keberimbangan, pendekatan pemberdayaan yang berbasis berkelanjutan ini dituntut untuk memperhatikan keberimbangan dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*). Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Namun demikian, selain sumberdaya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

⁹⁵Salim, Emil, *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Aziz, J Iwan, et al, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta, PT Gramedia, 2010, hal: 22-23.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional, yaitu:⁹⁶

- 1) Pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang. Hal ini dijelaskan bahwa pembangunan konvensional selalu mengejar keuntungan jangka pendek yang dilakukan lewat eksploitasi sumberdaya alam secara intensif. Sehingga dapat menyebabkan tidak berfungsinya sumberdaya alam yang dieksploitasi secara intensif tersebut di kemudian hari. Dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya alam sampai dengan kemudian hari dan dapat diambil manfaatnya oleh generasi akan datang.
- 2) Pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan penambahan kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pekerjaan, infrastruktur, dan perumahan. Degradasi dan kerusakan lingkungan telah semakin parah. Sumberdaya alam musnah, rusak, hancur atau tercemar. Pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan dan teknologi baru membutuhkan eksploitasi sumberdaya dalam jumlah yang lebih banyak lagi, sehingga konsumsi sumberdaya alam bertambah dan meningkatkan polusi serta berdampak negatif bagi pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus ditempatkan di bawah faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan kebijakan secara fundamental agar kepentingan publik dapat ditempatkan di atas kepentingan pribadi yaitu dengan menggunakan instrumen fiskal dan moneter yang tepat dalam sebuah kerangka kebijakan yang lebih kondusif.

⁹⁶ *Ibid*, Salim, hal: 23 – 28.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan yang berkelanjutan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup mendapat perhatian khusus dalam Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup⁹⁷.

Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur:⁹⁸

- 1) Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
- 2) Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.

Sedangkan Budimanta menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam

⁹⁷ Sudarmadji, *Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*, Published On Wednesday, June 04, 2008 diunduh dari Nop
16.21 WIB.

⁹⁸ *Ibid*, Sudarmadji.

proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat⁹⁹.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Djajadiningrat dalam buku *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu*, Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat, menyatakan bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu: keberlanjutan ekologis, keberlanjutan di bidang ekonomi, keberlanjutan sosial dan budaya, keberlanjutan politik, dan keberlanjutan pertahanan keamanan.¹⁰⁰

Selanjutnya Budimanta menyatakan, untuk suatu proses pembangunan berkelanjutan, maka perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut.
- 2) Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka pikir jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan.

⁹⁹Lihat *Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* dalam <http://bulletin.penataanruang.net/> edisi Januari – Februari 2009 oleh Dewan Redaksi alenia 4, diunduh pada tanggal 26 Nov 2010, pukul 16.17 WIB.

¹⁰⁰ *Ibid*, Dewan Redaksi, alenia 6.

¹⁰¹ *Ibid*, Dewan Redaksi, alenia 14.

- 3) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang.
- 4) Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

2.2. Pulau Terluar Tidak Berpenghuni.

Pulau-pulau terluar yang berada di sekitar Selat Malaka merupakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini merupakan pulau-pulau kecil yang terpisah dari pulau induk. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.¹⁰² Sedangkan pulau-pulau terluar merupakan pulau-pulau yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.¹⁰³

Pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka terdiri dari Pulau Berhala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Palompong, Pulau Batu Berhanti dan Pulau Nongsa. Tidak berpenghuni atau *uninhabited* dalam *Webster's Revised Unabridged Dictionary* (1913),¹⁰⁴ mengandung artian *not having inhabitants; not lived in*

¹⁰²Lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, pasal 1 ayat 3.

¹⁰³Lihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

¹⁰⁴<http://www.babylon.com/definition/Uninhabited>

(tidak memiliki penduduk, bukan tinggal di tempat tersebut), sedangkan pulau yang tidak berpenghuni (*uninhabited island*) adalah *currently not permanently populated by humans. The staff of a lighthouse/scientific station/warden's house or sea resort tourists etc. do not count as population.*¹⁰⁵ Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pulau yang tidak berpenghuni merupakan sebuah pulau yang tidak ditempati secara permanen oleh manusia. Apabila ada petugas yang berdiam disana, yang bertugas sebagai penjaga keamanan, petugas navigasi ataupun nelayan yang singgah, tidak dapat dikatakan sebagai penduduk tetap di pulau tersebut.

Dengan melihat pengertian dari pulau tidak berpenghuni, maka dapat dikatakan bahwa pulau tersebut tidak terdapat suatu kegiatan ataupun aktivitas. Sehingga apabila tidak terpantau, maka bisa jadi pulau-pulau tersebut akan hilang ataupun dapat diklaim oleh pihak asing yang menginginkannya. Apalagi pulau-pulau yang tidak berpenghuni tersebut terletak sangat jauh (terluar) dari pusat pemerintahan ataupun pulau induk dan berada di wilayah perbatasan dengan negara lain. Sangat mungkin pulau tersebut terlepas dari pantauan, dikarenakan letaknya yang sangat jauh dan terisolir.¹⁰⁶

Pulau-pulau terluar mempunyai peran strategis dalam penarikan wilayah laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif bagi Negara Indonesia. Pulau-pulau terluar merupakan titik dasar untuk pengukuran wilayah teritorial laut kedaulatan Indonesia. Apabila tidak diberdayakan akan dapat diambil pihak asing yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dan menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Beberapa pulau terluar yang sudah diklaim kepemilikannya oleh warga negara asing dapat dilihat pada tabel 2.1.

¹⁰⁵Lihat dalam http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Uninhabited_islands.

¹⁰⁶ Abubakar, Mustafa, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006, hal : 11

Tabel 2.1 Beberapa Pulau Kecil Dikelola/Dimiliki Warga Negara Asing

No	Nama Pulau	Lokasi	Pengelola/Pemilik
1	Pulau Sture	Nusa Tenggara Timur	Haji Faizal, pejabat Konsul Jenderal Malaysia di Denpasar Bali
2	Pulau Kukusan	Nusa Tenggara Timur	Warga Selandia baru
3	Pulau Bidadari	Nusa Tenggara Timur	Lewan Dosky, Kewarganegaraan Inggris
4	Pulau Mangudu	Nusa Tenggara Timur	David James Willie, warga negara Australia

Sumber : Abubakar, Mustafa, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*, Kompas.

Selain itu, pulau-pulau terluar juga dapat digunakan sebagai penguasaan sumberdaya alam yang terdapat di sekitarnya. Seperti kepulauan Spratly yang diperebutkan oleh 6 negara yang berbatasan di wilayah laut dengan kepulauan Spratly, yaitu China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Filipina. Negara-negara yang mengklaim, sudah menempatkan satuan militer di tiap-tiap pulau yang diklaim masuk dalam wilayah teritorialnya masing-masing. Dalam satu referensi dikatakan bahwa *The Spratly Islands lie in the South China Sea, adjacent to strategically important sea lines of communication in an area possibly rich in hydrocarbon deposits. Six proximate states have made overlapping claims to territorial sovereignty over all or part of the islands, the bases for which are complex with little commonality. The prospect of the law of the sea providing the key to resolution of the dispute is limited, even though each of the protagonists variously refers to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea to support its claims.*¹⁰⁷ Kepulauan Spratly merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang berupa atol dengan luas pulau hanya sekitar 4 km². Namun sumberdaya gas

¹⁰⁷Lee G. Corder, *The Spratly Islands Dispute And The Law Of The Sea Ocean Development & International Law*, Journal Ocean Development & International Law, Volume 25, Issue 1, Taylor & Francis, 1994, Pages 61 - 74

yang terkandung di dalamnya, menyebabkan banyak pihak berusaha untuk mengklaim kepemilikan gugus pulau ini. Selain itu panorama yang bagus dengan terumbu karang dan gunung laut menjadi daya tarik tersendiri untuk berusaha menguasai kepulauan dengan luas area 425.000 km² ini. Selain itu sumberdaya ikan dan penyu hijau juga banyak terdapat di kepulauan ini¹⁰⁸. Walaupun hanya berupa pulau-pulau kecil, namun dengan jumlah sumberdaya yang tersedia akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Pada Mei 2011, kapal angkatan laut Cina menembaki kapal penangkap ikan Vietnam yang beroperasi dari Da Dong Island.¹⁰⁹ Dengan melihat kejadian tersebut, maka Cina mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk dalam wilayah kedaulatannya sedangkan Vietnam juga mempunyai anggapan yang sama dan mempunyai kedaulatan di wilayah tersebut.

Kasus lainnya adalah Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia tahun 2002. Sipadan dan Ligitan merupakan pulau terluar bagi Indonesia dan Malaysia. Pada perpu No.4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia, tidak mencantumkan kedua pulau tersebut kedalam wilayah Republik Indonesia. Sementara Malaysia berdasarkan peta tahun 1970, juga tidak mencantumkan kedua pulau tersebut. Kedua masalah ini menjadi keuntungan bagi masing-masing pihak. Penyelesaian masalah ini dibawa ke meja perundingan, dengan ketentuan untuk tidak melaksanakan aktivitas di kedua pulau tersebut. Indonesia mematuhi ketentuan tersebut, namun pihak Malaysia, tetap melaksanakan aktivitas dan memberdayakan pulau tersebut. Sehingga terdapat tiga alasan Indonesia kalah oleh Malaysia pada perebutan kedua pulau tersebut yaitu, Malaysia secara terus-menerus berada di pulau tersebut, adanya penguasaan efektif pulau, dan perlindungan serta pelestarian ekologis. Berdasarkan penguasaan efektif terhadap kedua pulau maka pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional

¹⁰⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands

¹⁰⁹ *Ibid.*

memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah menjadi milik Malaysia.¹¹⁰

2.3. Konsep Pengamanan Pulau Terluar dalam Konteks Geostrategis.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Bentuk negara kepulauan, beserta masyarakatnya yang sangat beragam, dan keberadaannya di posisi silang antara dua benua dan dua samudera, serta kekayaan sumber daya alamnya, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika berbagai aspek kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantara aspek penting yang dipengaruhi kondisi geografi Indonesia termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat dijelaskan dengan pandangan geopolitik, geoekonomi dan geososial budaya, serta secara keseluruhan menjelaskan geostrategi pertahanan negara Indonesia. Dengan demikian, strategi pertahanan negara berkenaan dengan geopolitik dan geoekonomi, diarahkan kepada upaya menjaga kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kondisi geografi Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara bahwa penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kemudian peraturan presiden ini disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014. Dalam peraturan presiden ini

¹¹⁰ *Lo cit*, 83-91

dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Melihat perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara, yang dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman maka sifat ancaman tidak lagi didominasi oleh ancaman militer tetapi juga oleh nonmiliter, serta tidak terbatas hanya pada ancaman tradisional tapi juga ancaman nontradisional.

Dengan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi, semua komponen pertahanan negara dan unsur-unsur di luar bidang pertahanan dituntut untuk saling mendukung dan bersinergi satu dengan yang lain, dengan senantiasa mengindahkan tataran dan lingkup kewenangan yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Diantara ancaman aktual yang menuntut sinergisme yang tinggi dan harus mendapat perhatian yang serius pada lima tahun ke depan¹¹¹, adalah ancaman terhadap **konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar**, ancaman separatisme, terorisme, bencana alam, konflik horizontal, radikalisme, kelangkaan energi dan ragam kegiatan ilegal baik di darat maupun di laut **yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa**. Kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman potensial, antara lain pencemaran lingkungan, pandemik, *cyber crime*, pemanasan global, krisis finansial, agresi militer, serta berbagai kemungkinan

¹¹¹Lihat pada lampiran Peraturan Presiden no 41 tahun 2010.

ancaman yang muncul di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia tetap menjadi perhatian pembangunan pertahanan negara dalam jangka panjang.

Ancaman-ancaman yang muncul dewasa ini tidak lagi bersifat konvensional namun sudah bersifat multidimensional. Sektor keamanan tidak lagi dipandang sebagai ranah militer semata, akan tetapi telah menjadi ranah multisektor. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia. Karenanya konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani (*human security*).¹¹² Hal ini sebagian besar akibat pergeseran kekuatan dunia dari bipolar menjadi multipolar yang sangat berpotensi menciptakan benturan kepentingan yang bersifat global, regional maupun nasional. Pergeseran kekuatan dunia tersebut telah menciptakan situasi tidak menentu melalui perubahan yang sangat cepat dan sulit untuk diprediksi, sehingga secara tidak langsung memaksa setiap negara untuk berupaya semaksimal mungkin mengamankan kepentingannya.¹¹³

Berdasarkan berbagai literatur, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kepentingan nasional kemudian menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi

¹¹²Darmono, Bambang, et al, *Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010, hal : 2,

¹¹³ Connie, Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal: 5

integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut.¹¹⁴

Mengambil pendapat Liddle dalam Connie¹¹⁵ bahwa ada dua unsur fisik mendasar dalam membangun kekuatan bangsa yaitu faktor ekonomi dan militer. Hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila negara tidak memiliki ekonomi dan militer yang kuat, maka pertahanan negara pun akan menjadi lemah. Maka dalam membangun pertahanan negara yang kuat harus diperhatikan kondisi kedua faktor tersebut. Mengingat bahwa jumlah anggaran pertahanan sangat ditentukan oleh besaran pendapatan domestik bruto, akibatnya tingkat ekonomi menjadi faktor yang menentukan di balik kekuatan militer. Tapi sebaliknya dengan memiliki militer yang kuat, maka hal tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dilihat dari segi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki potensi konflik dengan negara lain yang berbatasan harus mendapat perhatian dan prioritas penanganan, mengingat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum di wilayah perbatasan yang dapat berpengaruh terhadap pertahanan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan faktor penentu dalam menjaga dan mengawal NKRI yang harus selalu dibangun, dipupuk, dan digelorakan. Indonesia dengan karakteristik geografi yang terdiri atas gugusan Kepulauan Nusantara, yang terletak di posisi silang dengan aneka ragam sumber daya alam dan demografi yang majemuk wajib dilindungi dan dipertahankan. Kondisi Indonesia tersebut di satu sisi mengandung kekuatan besar untuk didayagunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi di sisi lain juga mengisyaratkan suatu tantangan yang besar bagi pengelolaan dan pengamanannya yang berimplikasi terhadap diperlukannya pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara yang handal.

Dalam Doktrin Pertahanan Negara yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dalam menghadapi setiap ancaman dengan

¹¹⁴ *Opcit*, hal: 9

¹¹⁵ *opcit*, Connie, hal: 125-126.

memadukan seluruh kekuatan bangsa, baik kekuatan militer maupun nirmiliter.¹¹⁶ Keterpaduan kekuatan militer dan nirmiliter merupakan pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta. Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintah. Agar penyelenggaraan fungsi pertahanan negara terlaksana secara efektif sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan sebagai negara demokrasi yang merdeka, berdaulat, dan berdasarkan hukum, diperlukan suatu doktrin untuk menuntun setiap unsur yang terlibat. Atas dasar itu, Doktrin Pertahanan Negara ditetapkan sebagai pengejawantahan tekad, prinsip, dan kehendak untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Doktrin Pertahanan Negara selanjutnya dijadikan sebagai salah satu perangkat utama dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pertahanan negara.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan

¹¹⁶ Lihat *Doktrin Pertahanan Negara*, Copyright © 2007, Dephan Republik Indonesia, hal: 71 – 73, diunduh dari <http://strahan.dephan.go.id/ditjakstra/doktrin.pdf>.

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ini Indonesia melaksanakan pengamanan terhadap pulau-pulau terluar yang memiliki fungsi strategis sebagai penentu batas wilayah dengan negara tetangga. Pengamanan dilaksanakan dengan menghadirkan pasukan penjaga pengamanan pulau yang dilaksanakan pasukan TNI.

2.4. Pendekatan Teori Geopolitik dan Wawasan Nusantara.

Secara alamiah tidak satu negarapun yang sejak awal kondisi wilayah dan penduduknya sudah merupakan satu kesatuan dan tinggal membentuk pemerintahan untuk mengurus pemeliharaannya. Masalah utama setiap negara yang terus menerus memerlukan perhatian adalah masalah pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayahnya.

Sebagai bangsa yang majemuk yang telah menegara (*nation state*), bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk itu penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berusaha untuk memandang Negara Indonesia dengan prinsip kesatuan. Kesatuan wilayah Republik Indonesia baru terwujud setelah mulai digunakan kata nusantara, yang kemudian melahirkan

konsepsi nusantara. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mendeklarasikan mengenai wilayah nusantaranya dan kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini sekaligus merupakan kehendak politik Republik Indonesia dalam menyatukan tanah dan air Republik Indonesia menjadi satu kesatuan. Sejak terwujudnya kesatuan wilayah Republik Indonesia itu kata Nusantara resmi digunakan dalam istilah Konsepsi Nusantara sebagai nama dari Deklarasi Djuanda.

Semenjak Deklarasi Djuanda dicetuskan, maka Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.¹¹⁷

Prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State Principle*) merupakan pengejawantahan Wawasan Nusantara yang memandang wilayah laut bukan sebagai pemisah, tetapi justru sebagai penghubung dengan wilayah darat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip ini wilayah laut Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda hanya seluas 100.000 km² menjadi kira-kira 3.000.000 km², dimana wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan atau perairan nusantara dan laut teritorial atau laut wilayah¹¹⁸.

Geopolitik berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan sekelompok manusia dengan sepotong wilayah tertentu menjadi satu kesatuan negara yang kokoh, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan

¹¹⁷ Sunaryo, *Deklarasi Djuanda Dalam Perspektif Pertahanan Dan Keamanan*, Forum Hukum, vol 4 No. 4-07, hal 76 – 78.

¹¹⁸ Kartikasari, Wahyuni, *Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal: 108.

kelangsungan hidupnya. Menurut Dauglas Jackson dalam Wahyono¹¹⁹, geopolitik mempelajari fenomena politik dalam kaitannya dengan ruang, yaitu bagaimana membina ruang negara dan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan kehidupan dalam ruang negara tersebut.

Pusat perhatian geopolitik adalah pembangunan kekuatan nasional, sebagai hasil olahan unsur-unsur politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dikaitkan dengan kondisi dan posisi geografinya. Geopolitik menjadikan unsur-unsur yang beraneka ragam itu satu kekuatan nasional yang bulat dan utuh, dalam wujud bangsa dan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Konsep Geopolitik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung pengertian bahwa geopolitik memberikan pengertian sebagai suatu pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan geografi negara dan bagaimana memanfaatkan keuntungan letak geografis Indonesia untuk kepentingan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia. Pada dasarnya geopolitik adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konstelasi geografis negara, dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis demi penyelenggaraan pemerintah dan berbagai penentuan kebijakan secara rasional berdasarkan realita yang sesuai dan sejalan dengan cita-cita nasional.¹²⁰ Geopolitik Indonesia secara eksplisit tertuang pada Wawasan Nusantara sebagai konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

¹¹⁹ Wahyono, *Geopolitik Dan Geostrategi RI Untuk PJPT II Dalam Rangka Implementasi Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional*, Kertas Karya Perorangan, Lemhanas, 1991, hal: 44.

¹²⁰ Ras, Abdul Rivai, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik, Sudut Pandang Indonesia*, Jakarta, APSINDO, 2001.

Pada tahun 1972 oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) wawasan nasional ini diteliti dikaji dan dikembangkan agar tetap tegak dan menjadi pandangan nasional terhadap wilayahnya sendiri. Sehingga akhirnya pada tahun 1973 Wawasan Nusantara diangkat dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang berbunyi sebagai berikut¹²¹:

Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam ajaran wawasan nasional, bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasionalnya serta dengan mempertimbangkan segala aspek kehidupan nasionalnya. Aspek kehidupan nasional tersebut meliputi aspek alamiah yaitu geografi, kekayaan alam dan penduduk. Sedangkan aspek sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.

Menurut Kaelan, Wawasan Nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografinya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang

¹²¹ Sumarsono, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal: 80.

menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.¹²² Dengan demikian Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Wawasan Nusantara sebagai cara pandangan juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Menurut Wan Usman, Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan melihat semua aspek kehidupan yang beragam yang bermuara dari Pancasila dan UUD 1945.¹²³ Hal ini dikarenakan negara Indonesia mempunyai beragam fauna dan flora, serta mempunyai beragam corak sosial budaya yang kesemuanya harus dipandang sebagai sesuatu yang dapat menumbuhkan kesadaran tentang wawasan nusantara. Dengan keanekaragaman itu janganlah dijadikan kendala yang dapat membuat perbedaan pendapat mengenai pandangan nasional Bangsa Indonesia. Keragaman itu seharusnya dapat meningkatkan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai corak ragam budaya tetapi dapat bersatu dengan mempunyai pandangan yaitu wawasan nusantara.

Secara konsepsional pada dasarnya Indonesia menganut Wawasan Nusantara dalam memanfaatkan konstelasi geografinya, dimana diperlukan keserasian wawasan benua, wawasan bahari dan wawasan dirgantara sebagai pengejawantahan segala dorongan dan segala rangsangan dalam usaha mencapai aspirasi-aspirasi bangsa dan tujuan negara Indonesia.¹²⁴

Dengan demikian, wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayahnya yang terdiri dari keragaman corak

¹²² Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma, 2007, hal: 124.

¹²³ Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pangkajian Ketahanan Nasional UI, 2003, hal: 85 – 90.

¹²⁴ Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut, Kumpulan Karangan*, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1985, hal: 10 – 11.

budaya serta kekayaan alam yang berlimpah dan dapat sebagai geopolitik bangsa dan negara Indonesia yang dikembangkan untuk menegakkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia guna melindungi kepentingan nasional serta mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan nusantara diharapkan dapat menjadikan seluruh rakyat Indonesia dan wilayah negara Indonesia dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

2.5. Pendekatan Teori Ketahanan Nasional.

Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi yang stabil dari Bangsa Indonesia sehingga dapat selalu bertahan dan menjadikan Bangsa Indonesia dapat melangsungkan kehidupan bernegaranya serta dapat mewujudkan tujuan nasionalnya yaitu memberikan rasa aman bagi warga negaranya dan memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsep Ketahanan Nasional Indonesia pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 dalam segala aspek kehidupan nasional secara terpadu, utuh menyeluruh¹²⁵. Konsep ini pada awalnya mulai dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) yang ketika itu diidentifikasi dengan konsep pertahanan wilayah. Seiring dengan perkembangannya dan melalui proses penyempurnaan, pada akhirnya oleh Lemhanas yang berdiri tahun 1965 merumuskan tentang pengertian ketahanan nasional tersebut sebagai kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang membahayakan bangsa. Selanjutnya pada tahun 1974, konsep Ketahanan Nasional tersebut disahkan dengan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Skep/1382/XII/1974, dengan rumusan sebagai berikut:

¹²⁵ Budisantoso, *Peran Ketahanan Nasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta, Lemhanas, 1995

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.

Sedangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978 pengertian Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut:

Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional serta untuk mengelakkan dan mengatasi secara efektif segala ancaman, gangguan dan hambatan dan tantangan yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar, baik yang bersifat fisik materiil maupun mental spirituil.

Menurut Sunardi, Konsep Ketahanan Nasional yang tercantum dalam Skep Menhankam/Pangab Nomor Skep/1382/XII/1974 merupakan penalaran dan pemahaman Ketahanan Nasional dengan pendekatan makro karena berangkat dari atau diawali oleh delapan gatra kehidupan sebagai *entity gestalt* kehidupan nasional¹²⁶. Selanjutnya menurut Sunardi, dari defenisi tersebut secara implisit didapat adanya pengakuan bahwa apabila dilihat dari dalam, ketahanan nasional tergambar dalam kualitas keuletan dan ketangguhan masyarakat bangsa, akan tetapi apabila dilihat dari luar ia akan terkesan sebagai suatu bentuk kekuatan nasional. Karena sifat lahirnya yang mengesankan sebagai kekuatan itulah maka ketahanan nasional secara strategis berperan sebagai satu sistem penangkalan

¹²⁶ Sunardi, RM, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, Jakarta, PT Kuaternita Adidarma, 2004, hal: 21.

nasional dengan maksud menangkal kekuatan lain yang membahayakan negara dan bangsa¹²⁷.

Sedangkan Ketahanan Nasional menurut Wan Usman adalah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Ketahanan Nasional tersebut dapat dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi yaitu keamanan dan kesejahteraan. Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yaitu partisipasi masyarakat yang demokratis.¹²⁸

Dalam konsepsi Ketahanan Nasional bangsa Indonesia terdapat delapan unsur yang membentuk kondisi Ketahanan Nasional, yaitu geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sesuai pengertian ilmu politik internasional, kondisi ketahanan nasional yang terbentuk berdasarkan delapan unsur tersebut tidak lain daripada kekuatan nasional juga. Ketahanan nasional tidak hanya menekankan aspek militernya, tetapi keseluruhan aspek dalam kehidupan nasional. Dengan demikian sesungguhnya kondisi ketahanan nasional justru memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kekuatan nasional bangsa Indonesia pada suatu saat tertentu.¹²⁹

Ketahanan nasional adalah konsepsi untuk menumbuhkan kemampuan yang dapat membangun kekuatan nasional dan memperkuat posisi negara dalam lingkungan pergaulan dunia, melalui cara-cara damai yang menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam hubungan antar negara.

¹²⁷ *Ibid*, Sunardi, hal: 63 – 64.

¹²⁸ Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pangkajian Ketahanan Nasional UI, 2003, hal: 93.

¹²⁹ Wahyono, *Geopolitik Dan Geostrategi RI Untuk PJPT II Dalam Rangka Implementasi Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional*, Kertas Karya Perorangan, Lemhanas, 1991, hal: 16

Ketahanan nasional merupakan penampilan wawasan nusantara terhadap dunia dan sekaligus sebagai strategi dalam melaksanakan hubungan internasional.¹³⁰

Dari beberapa rumusan atau defenisi diatas, pada intinya adalah adanya perhatian terhadap kondisi kehidupan nasional yang bercirikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Dengan demikian, Ketahanan Nasional sesungguhnya merupakan gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Berbagai aspek tersebut terdiri dari tiga aspek alamiah (trigatra) yang bersifat statis serta lima aspek yang berkaitan dengan sosial (pancagatra) yang bersifat dinamis. Penggabungan dari trigatra dan pancagatra tersebut menjadi astagatra yang merupakan satu kesatuan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan.

¹³⁰ *Ibid*, Wahyono, hal: 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (tidak diperkenankan untuk mengubah ataupun memanipulasi latar atau konstruksi penelitian)¹³¹ yang mengutamakan proses dari pada hasil, lebih bersifat deskriptif dan melakukan analisis data secara induktif.

Menurut Erickson dalam Sugiyono, menyatakan bahwa ciri-ciri kualitatif adalah:¹³²

- 1) *Intensive, long term participation in field setting.*
- 2) *Careful recording of what happens in the setting by writing field notes and interview notes by collecting other kinds of documentary evidence.*
- 3) *Analytic reflection on the documentary records obtained in the field.*
- 4) *Reporting the result by means of detailed descriptions, direct quotes from interview and interpretative commentary.*

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, dimana peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat dengan teliti apa yang terjadi, kemudian melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.¹³³

¹³¹ Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hal: 9.

¹³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2011, hal:14.

¹³³ Amirsyah Sahil, *Metodologi Penelitian*, Materi Perkuliahan, PKN Universitas Indonesia, Oktober 2009

Dalam penelitian yang kajiannya ditinjau dari perspektif Ketahanan Nasional, maka peneliti berusaha dalam proses pengumpulan data baik secara dokumen ataupun survey di lapangan dan setelah itu menganalisa pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka secara induktif berdasarkan fakta-fakta temuan dilapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi laporan penelitian. Untuk lebih mengarah pada hasil analisa yang tajam, maka peneliti akan melengkapi dengan wawancara secara mendalam kepada orang-orang yang berpengaruh terhadap pemberdayaan pulau-pulau terluar tersebut di instansi Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri (BNPP) dan Kementerian Kelautan Perikanan serta Mabes TNI dalam hal ini Mabes TNI Angkatan Laut.

3.2 Instrumen Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri.¹³⁴ Instrumen penelitian kualitatif pada umumnya lebih bersifat internal dan subyektif, yang direfleksikan dengan peneliti sebagai instrumennya. Peneliti dalam hal ini dapat menentukan fokus apa yang diteliti, memilih informan yang ahli dibidang yang sesuai dengan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisa data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Untuk berusaha membuat hasil yang dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai macam bentuk dokumen yang berhubungan dengan pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni dan mengumpulkan hasil wawancara dari orang-orang yang ahli atau berpengalaman dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar dalam penelitian ini serta yang berhubungan dengan pemberdayaan pulau-pulau terluar khususnya pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka.

¹³⁴ *Ibid*, Sugiyono, hal. 8

3.3 Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka, lokasi penelitian adalah instansi yang terkait yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, BNPP dan beberapa pulau yang dijadikan objek penelitian, yaitu Pulau Berhala, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun kecil, Pulau Nipa, Pulau Palompong dan Pulau Batu Berhanti. Sedangkan Pulau Batumandi dan Pulau Nongsa penelitian dilaksanakan berdasarkan dokumen yang sudah dimiliki sebelumnya.

3.4 Sumber-Sumber Data.

Dalam penelitian ini, data didapat dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan penelitian lapangan di pulau-pulau yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari studi literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian pemberdayaan pulau terluar yang berasal dari beberapa sumber buku, majalah ataupun internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara langsung, yaitu merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam pelaksanaan

pengumpulan data dengan wawancara langsung, peneliti melaksanakan wawancara dengan key informan sebagai berikut: Staf BNPP, Perwira staf operasi Mabes TNI AL, Staf Wilhan Kemenhan, Dan Satgas PAM Pulau Terluar Pulau Nipa, serta Dan Pos AL Pulau Iyu Kecil, Dan pos AL Pulau Nipa.

2) Wawancara telepon, yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan sarana komunikasi telepon kepada key informan yang berada di pulau terluar yang sulit dijangkau peneliti. Wawancara telepon dilakukan dengan Dan Satgas PAM Pulau Terluar Pulau Berhala.

3) Wawancara melalui surat elektronik (e-mail), hal ini dilakukan dengan melihat kesibukan koresponden dan jauhnya keberadaan koresponden. Wawancara via email dilakukan dengan nara sumber Pasops Lanal Batam dan Pasops Lanal Tanjung Balai Karimun.

4) Survei lapangan, yaitu peneliti mengamati langsung ke lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran lingkungan fisik dengan lebih detail dan mendapatkan kondisi yang sebenarnya.

5) Penelitian literatur/kepustakaan, yaitu mempelajari literatur, dokumen dan laporan lainnya sebagai pembandingan, yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan-bahan yang dicari dapat berupa bahan dari buku, jurnal, situs internet maupun dari bahan kepustakaan lainnya.

3.6 Metode Analisis Data.

Menurut Miles dan Huberman dalam Haris¹³⁵, tahapan teknik analisa data melalui tahapan:

1) Proses pengumpulan data. Proses ini dilakukan sebelum penelitian, yang berupa pengumpulan data-data awal dari dokumen-dokumen baik itu

¹³⁵Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hal: 164 - 180.

data dari Dephan, DKP, Depdagri, maupun BNPP, dan juga data dokumen yang berasal dari internet. Pada saat penelitian, peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan.

- 2) Reduksi data yaitu setelah data terkumpul dilakukan pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting.
- 3) Penyajian data, dapat berupa teks yang bersifat naratif.
- 4) Kesimpulan (verifikasi), apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila kita ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan analisa deskriptif dengan menganalisa data yang diperoleh untuk melihat kondisi di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura yang ada di Selat Malaka dan juga dalam menentukan bagaimana pemberdayaan dalam membangun kedelapan pulau tersebut.

3.7 Alur Penelitian.

3.7.1. Observasi Pendahuluan di Sekitar Selat Malaka.

Selat Malaka merupakan selat yang mempunyai lalu lintas padat akan hilir mudiknya kapal-kapal. Kapal-kapal niaga yang melalui selat ini dapat dipantau melalui pos-pos pengamatan yang berada di Pulau Iyu Kecil maupun Pulau Nipa. Dengan melihat banyaknya kapal yang melintas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Pulau-pulau di sekitar Selat Malaka mempunyai peran strategis dan penentu kedaulatan negara Indonesia.

3.7.2. Studi literatur.

Dalam studi literatur, peneliti berusaha memasukkan beberapa teori pendukung. Teori dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bekal dalam memahami konteks pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka secara lebih luas dan mendalam. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan dan dirasakan sumber data atau *key informan*. Namun peneliti juga dapat melepaskan teori yang dimiliki dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrument dan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi.¹³⁶

3.7.3. Studi Lapangan.

Penelitian tentang Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka dilaksanakan dengan melihat langsung di lapangan, yaitu melihat kondisi fisik pulau-pulau yang menjadi objek penelitian. Hal ini dilaksanakan guna mendapatkan data yang alamiah dan apa adanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan melihat kondisi yang ada, maka peneliti dapat membuat penilaian awal dalam pemberdayaan pulau-pulau tersebut.

3.7.4. Penilaian Terhadap Kerawanan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni.

1) Pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni yang letaknya jauh dan terisolasi, namun berada di perairan penting, apabila dibiarkan akan berdampak sangat merugikan bagi Indonesia, bila digunakan tindak pelaku kejahatan sebagai tempat transit atau persembunyian dalam melakukan kejahatan.

¹³⁶*Opcit*, Sugiyono, hal. 213.

- 2) Pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni merupakan pulau-pulau yang berada di wilayah terluar dan berbatasan dengan Negara lain. Dengan masih adanya konflik garis batas maka dikhawatirkan dapat memicu permasalahan politik antar negara dan mengancam kedaulatan NKRI
- 3) Pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni, apabila tidak dijaga dan dikelola dengan baik akan dapat diokupasi oleh negara lain dengan mengelola baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Apabila terjadi demikian, maka status kepemilikan pulau akan dapat diklaim milik negara lain ataupun perorangan yang dapat merugikan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun politik dengan hilangnya wilayah kedaulatan Negara Indonesia.
- 4) Pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni sangat rawan terhadap abrasi dan rusak akibat ulah manusia yang akan berdampak serius terhadap keutuhan NKRI.

3.7.5. Analisis Data dalam Pencapaian Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk mencapai tujuan pertama, yaitu gambaran pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, dilakukan deskriptif data yang di dapat dari hasil survei di lapangan, disajikan dengan sealamiah mungkin dengan menggambarkan fakta yang ada dilapangan.
- 2) Untuk mencapai tujuan kedua dan ketiga, dilakukan dengan menganalisis data yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka. Data yang didapat dari literatur maupun nara sumber, di analisa dengan metode triangulasi.

BAB IV

PULAU-PULAU TERLUAR TIDAK BERPENGHUNI DI SEKITAR SELAT MALAKA

4.1 Gambaran Fisik Pulau.

4.1.1 Pulau Berhala.

Posisi geografis Pulau Berhala berada pada posisi koordinat 03 46"38 LU dan 99 30"03 BT, dengan titik dasar 184.¹³⁷ Batas Wilayah Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Malaka (perairan kuala Tanjung), Sebelah timur berbatasan dengan Semenanjung Malaysia, Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka (Perairan Sialang Buah).



Gambar 4.1. Posisi geografis Pulau Berhala (skala: 1 : 90.000)
Sumber : diolah dari beberapa sumber.

¹³⁷Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 38 tahun 2002, pada lampiran Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, poin 168.

Pulau Berhala merupakan pulau yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai yang secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Tanjung Beringin tepatnya di Desa Bagan Kuala. Jarak antara Pulau Berhala dengan Dermaga Desa Bagan Kuala (biasa disebut Dermaga TPI) adalah ± 22 Km sedangkan jarak antara Pulau Berhala dengan Pelabuhan Belawan ± 65 Km. Pulau Berhala diapit oleh dua pulau kecil, yakni Pulau Sokong Nenek (pulau yang menyatu dengan pulau induk pada saat air surut dan memisah pada saat air pasang) yang terletak disebelah timur Pulau Berhala dan Pulau Sokong Siembang (Pulau yang berjarak ± 800 m sebelah barat Pulau Berhala). Di Pulau Berhala tidak terdapat penduduk yang menetap, yang ada hanya petugas dari Satuan Tugas Penjaga Pulau Terluar dari Marinir dan petugas Navigasi dari Departemen Perhubungan. Setelah diadakan pengukuran dengan metode Tracking dengan alat GPS Luas Pulau Berhala (pulau induk) adalah $\pm 44,57$ Ha, luas Pulau Sokong Nenek $\pm 0,5$ Ha dan luas Pulau Sokong Siembang $\pm 1,5$ Ha.¹³⁸



Gambar 4.2. Pulau Berhala diapit Pulau Sokong Nenek dan Pulau Sokong Siembang
Sumber: koleksi pribadi

¹³⁸<http://serdangbedagaikab.go.id>

Aksesibilitas menuju Pulau Berhala adalah dengan menggunakan transportasi laut, yakni dengan menggunakan Kapal Motor yang bergerak mulai dari Dermaga TPI Bagan Kuala, Tanjung Beringin yang lamanya perjalanan \pm 3 jam sedangkan jika perjalanan dimulai dari Pelabuhan Belawan lama perjalanan \pm 4 jam. Namun transportasi laut yang menuju Pulau Berhala tidak mempunyai frekuensi yang tetap dan harus melalui prosedur penyewaan yang tentunya membutuhkan biaya yang relatif mahal. Disamping itu juga disebabkan oleh pendangkalan di sekitar muara di Bagan Kuala maka kapal-kapal yang menuju ke perairan Selat Malaka yang melalui Muara Bagan Kuala sering mengalami hambatan, yakni kandasnya perahu di sekitar muara.

Pulau Berhala beriklim tropis yang dipengaruhi oleh suhu udara dan angin laut sehingga keadaan musim sering tidak menentu dimana pada musim kemarau masih diselingi hujan. Temperatur tertinggi mencapai 40 derajat celcius dan temperatur terendah mencapai 24 derajat celcius dan temperatur rata-rata 36 derajat celcius. Keadaan angin periode bulan april sampai dengan Juli adalah angin dari barat menuju timur dengan kecepatan rata-rata 2 knot sampai dengan 4 knot pada siang hari dan 3 knot sampai dengan 5 knot pada malam hari. Pada periode bulan Agustus sampai dengan Desember arah angin dari Tenggara menuju Barat Laut dengan kecepatan rata-rata 3 knot sampai dengan 5 knot pada siang hari dan 5 knot sampai dengan 7 knot pada malam hari.

Karakteristik hidrografi Pulau Berhala memiliki pada saat pasang mencapai 3 meter, saat pasang tertinggi. Sedangkan untuk surut terendah 1 meter. Kecepatan arus berkisar antara 1 knot sampai dengan 2 knot pada siang hari dan 2 knot sampai dengan 4 knot pada malam hari. Permukaan air pada umumnya bergelombang dikarenakan berada pada posisi selat Malaka dengan kedalaman berkisar antara 1 meter sampai dengan 9 meter. Kondisi dasar laut merupakan pasir dan berbatu karang.

Pulau Berhala mempunyai keadaan pantai dengan kondisi sebelah Selatan Pulau berhala landai dan lainnya curam (terutama yang berhadapan dengan Selat Malaka). Berdasarkan pengamatan megaskopis jenis sedimen permukaan dasar laut perairan sekitar pulau berhala dibedakan menjadi 2 jenis yaitu terumbu karang yang sebagian besar berada di permukaan dasar laut dan merupakan jenis tumbuhan yang dilindungi dan pasir laut yang berada di sekitar tepian sepanjang pantai di pulau berhala.¹³⁹

Sumberdaya alam yang terdapat di Pulau Berhala ada beberapa macam satwa yang dilindungi antara lain biawak, penyu, ular, napu (sejenis kancil) dan lain-lain serta merupakan tempat persinggahan penyu untuk bertelur pada akhir tahun dan menjadi tempat persinggahan burung-burung yang melakukan migrasi pada saat-saat tertentu. Pantai pasir antara Pulau Berhala dan Pulau Sokong Nenek merupakan tempat bertelurnya penyu. Pulau ini juga memiliki terumbu karang yang umumnya merupakan terumbu karang muda. Selain itu potensi yang terdapat di pulau ini adalah terdapatnya gua alami yang menembus bukit di Pulau Sokong Siembang yang sebagian lubangnya tergenang air sementara bagian atasnya menjadi tempat bersarangnya burung walet. Pulau Berhala juga memiliki taman bawah air yang banyak menyimpan biota-biota langka dan unik seperti ketam kelapa (*bigus latro*), kima raksasa (*tridacna gigas*), ikan-ikan berukuran besar untuk wisata memancing dan ikan bulu ayam (*lion fish*). Oleh karena itu Pulau Berhala memiliki potensi sumberdaya alam yang bagus yang dapat dimanfaatkan dan juga dapat sebagai pengembangan wisata bahari.¹⁴⁰

Sarana dan prasarana yang terdapat di Pulau Berhala diantaranya dermaga yang dapat digunakan untuk merapat kapal-kapal patroli dan kapal-kapal nelayan, terbuat dari beton dan kayu yang melintang dari selatan ke utara dengan panjang 50 m, lebar 4 m. Data kedalaman saat surut terendah dari ujung dermaga sebelah timur ke barat kurang lebih 5 sampai 8 meter. Di

¹³⁹Hasil wawancara dengan Dan Satgasmar Pam Pulau Terluar Pulau Berhala, Lettu Marinir Agus Mutaqin.

¹⁴⁰Op cit.

Pulau Berhala terdapat menara suar dari Departemen Perhubungan dan terdapat pos pengamatan TNI AL yang diawaki satgas pam pulau terluar berjumlah 34 personil. Selain itu terdapat sarana pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin dibangun antara bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2010 yang terletak di samping mess satgas Marinir Pulau Berhala. Bangunan ini merupakan Program dari Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral. Selain mess satgas marinir, juga terdapat mess petugas navigasi Departemen Perhubungan dan mess petugas Departemen Kelautan dan Perikanan. Sumber air tawar juga dapat ditemui di Pulau Berhala.



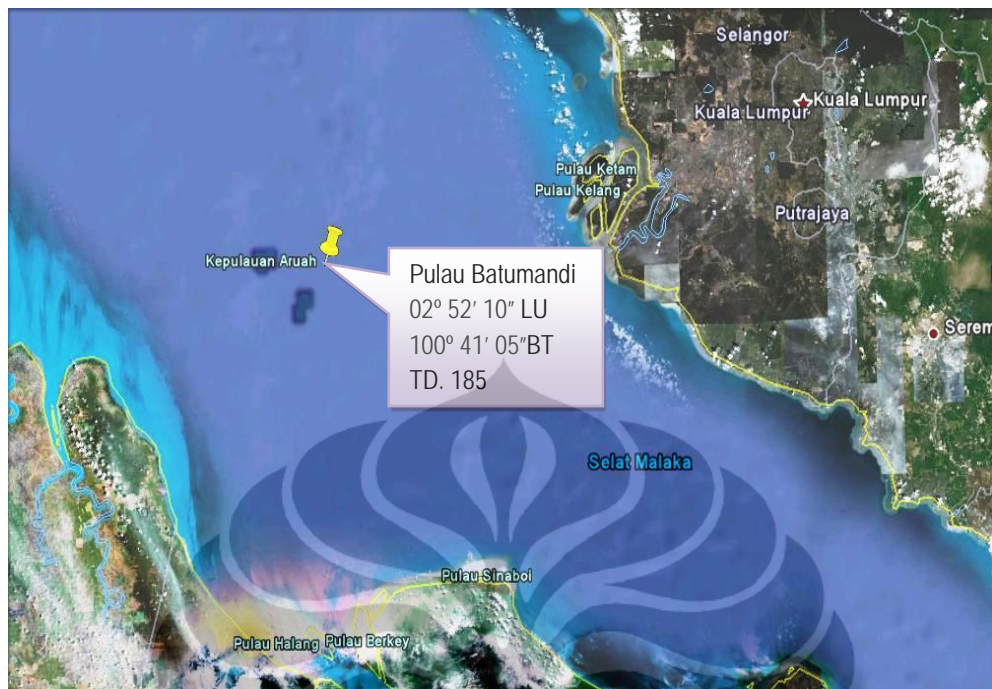
Gambar 4.3. Pembangkit listrik, mess pam pulau terluar dan sarana dermaga di Pulau Berhala.

Sumber: koleksi pribadi

4.1.2 Pulau Batu Mandi.

Posisi geografis Pulau Batumandi berada pada posisi koordinat 02 52' 10" LU 100 41' 05" BT. Pulau Batumandi mempunyai penanda wilayah hukum TD185.¹⁴¹

¹⁴¹Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 38 tahun 2002, pada lampiran Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, poin 169.



Gambar 4.4. Posisi geografis Pulau Batumandi (skala 1 : 50.000)
Sumber : diolah dari beberapa sumber.

Pulau Batumandi berciri fisik batuan karang yang terjal. Meskipun pulaunya kecil dan hanya berupa batu karang, namun pulau ini sangat strategis karena berada di jalur perairan internasional. Pulau Batu Mandi merupakan pulau terluar perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Pulau ini terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada Pulau Batu Mandi terdapat titik pangkal Indonesia yang ditandai dengan *titik dasar*¹⁴², TD.185 dan titik referensi TR.185. Letak pulau sekitar 83 km di utara Bagansiapiapi. Keseluruhan daratannya berupa karang, sehingga tidak ada vegetasi yang hidup di pulau ini. Pulau ini mempunyai luas 200 m² sehingga tidak menjadi tempat yang baik untuk tempat tinggal.¹⁴³

¹⁴²Menurut Arsana dalam Julzarika, bahwa titik dasar dipakai sebagai klaim batas maritim meliputi klaim atas zona maritim nasional yaitu perairan pedalaman (internal water), perairan kepulauan (archipelagic waters), laut teritorial (territorial sea), zona tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone), dan landas kontinen (continental shelf). Zona maritim yang bisa diklaim sebuah negara pantai diukur dari garis pangkal (baseline) ke arah laut. Pengertian ini diunduh dari Jurnal Penginderaan Jauh Vol. 6, 2009, hal: 22-31, <http://www.perpustakaan.lapan.go.id/jurnal/>

¹⁴³Prasetyono, Teo Tri, Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terluar Indonesia, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009, hal: 167-171

Pulau Batumandi merupakan pulau karang yang terjal, yang letaknya sulit dijangkau. Dengan kondisi yang demikian maka flora fauna tidak terdapat di pulau ini, sehingga tidak terdapat daya tarik yang dapat dikembangkan dari pulau batumandi. Pulau terdekat yang berada di sekitar Pulau Batumandi adalah Pulau Jemur yang merupakan tempat habitat penyu bertelur dan berkembang biak. Disini merupakan tempat patroli Lanal Dumai untuk mengawasi Pulau Batumandi sekaligus tempat check point bagi pegawai navigasi dalam mengecek mercusuar yang terdapat di Pulau Batumandi secara berkala.

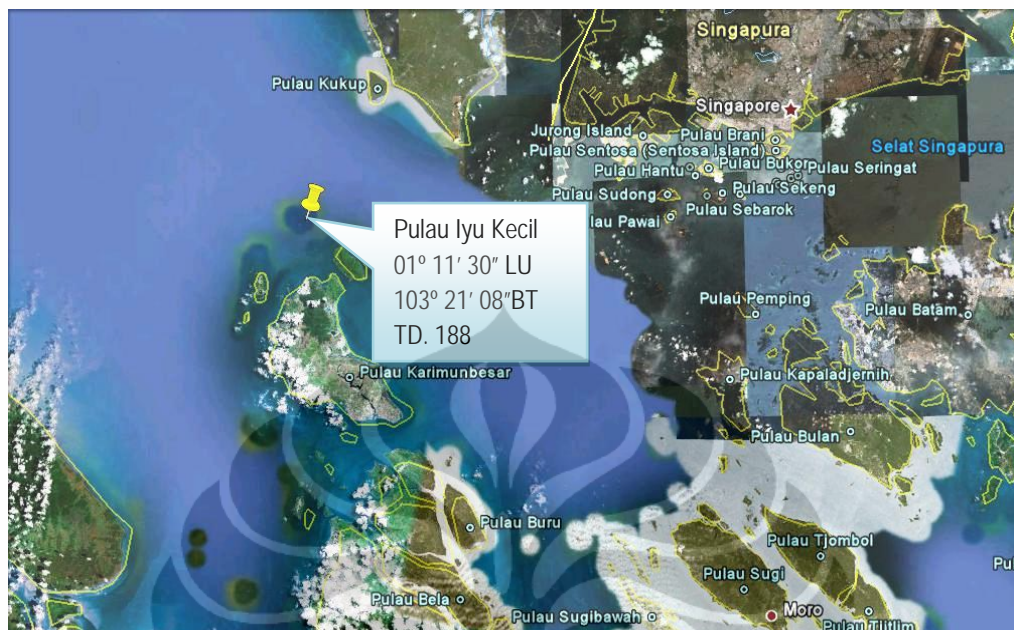


Gambar 4.5. Pulau Batu Mandi
Sumber : www.garisdepannusantara.org.

4.1.3 Pulau Iyu Kecil.

Pulau Iyu Kecil berada pada koordinat $01^{\circ} 11' 25''$ LU dan $103 21' 08''$ BT. Pulau ini mempunyai penanda wilayah hukum TD188. Pulau Iyu Kecil berbatasan dengan Negara Malaysia dan Negara Singapura. Sebelah Utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia pada zona ekonomi eksklusif dan sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Karimun Kecil.¹⁴⁴

¹⁴⁴Lo cit, poin 173.



Gambar 4.6. Posisi geografis Pulau Iyu Kecil (skala 1 : 25.000)
Sumber : diolah dari beberapa sumber.

Pulau Iyu Kecil atau biasa juga disebut Tokong Iyu merupakan pulau yang terletak di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan pulau Iyu Kecil sangat penting, mengingat pulau ini jadi penanda batas wilayah Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Lalu lintas di sekitar perairannya sangat padat dan termasuk jalur perdagangan. Pulau Iyu Kecil mempunyai luas wilayah $0,02 \text{ km}^2$ dan sebagai penanda batas wilayah NKRI dengan Negara Singapura dan Malaysia berdasarkan titik dasar nomor TD. 188.

Di pulau Iyu Kecil terdapat pohon kelapa, ketapang (*terminalia catappa*) dan semak belukar. Sudah terdapat dermaga perahu di pulau ini, namun tidak digunakan para nelayan untuk menetap di pulau iyu kecil dan juga dermaga tersebut cukup tinggi bagi kapal nelayan yang akan merapat disana. Daya tarik pulau adalah panorama perbukitan dan batuan karang serta puncak bukit yang dapat digunakan untuk rekreasi memandangi hilir mudik kapal di Selat Malaka.

Di Pulau ini terdapat pos pengamatan TNI AL yang dijaga oleh personil TNI Angkatan Laut dari Pangkalan Angkatan Laut Dumai sebanyak 5 personil. Juga terdapat mercusuar yang dijaga petugas navigasi yang berjumlah 5 orang. Dan baru-baru ini sudah dipasang radar pemantau navigasi yang selesai pembangunannya dibantu Pemerintahan Jepang yang selesai dibangun bulan April 2011. Personil yang bertugas di pulau ini mengalami kesulitan air tawar karena tidak terdapat sumber air tawar di pulau ini dan hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan petugas di pulau Iyu Kecil. Untuk sarana mess, sudah terdapat mess yang dibangun oleh masing-masing departemen yang menjalankan tugas penjagaan di pulau ini. Sarana listrik berasal dari genset milik departemen perhubungan yang dihidupkan hanya saat malam hari. Untuk melaksanakan patroli di sekitar pulau, petugas TNI AL hanya menggunakan sarana speedboat bermotor tempel 75 pk, dan sarana perahu pancung penduduk yang berada di sekitar pulau. Untuk menuju ke pulau ini menggunakan sarana tersebut dan harus mendapat izin dari Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun.



Gambar 4.7. Pulau Iyu Kecil.
Sumber : Koleksi pribadi.

4.1.4 Pulau Karimun Kecil.

Pulau Karimun Kecil berada pada koordinat $01^{\circ} 09' 59''$ LU dan $103^{\circ} 23' 20''$ BT. Pulau ini mempunyai penanda wilayah hukum TD189.¹⁴⁵



Gambar 4.8. Posisi geografis Pulau Karimun Kecil (skala 1 : 25.000)
Sumber : diolah dari beberapa sumber.

Pulau ini terletak di Selat Malaka sekitar 6 km dari pulau iyu kecil. Pulau ini mempunyai luas 7,89 km² dan tidak mempunyai penduduk tetap. Karimun kecil hanya berjarak 17 km dari daratan malaysia dan 25 km dari singapura¹⁴⁶. Pulau Karimun Kecil termasuk dalam wilayah Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Karimun Kecil berada disebelah utara Pulau Karimun. Sebagai pulau terluar kepulauan Indonesia maka Pulau Karimun Kecil mempunyai penanda wilayah hukum yaitu titik dasar No. TD 189 dan titik referensi No. TR 189.

Di Pulau Karimun Kecil terdapat sumberdaya kelapa, ketapang, bakau, dan tanaman keras. Juga terdapat fauna yaitu elang laut, biawak, dan kadal. Selain itu disekitar pulau, terdapat sumberdaya ikan dan udang yang cukup

¹⁴⁵ibid, poin 174.

¹⁴⁶Op cit, hal 182

banyak. Daya tarik pulau ini karena pantainya berpasir putih, kontur berbukit, dan pulau pulau kecil disekitar pulau. Namun akses ke pulau cukup sulit karena letaknya terpencil dan minimnya sarana transportasi. Untuk dapat menuju ke pulau ini, dapat menggunakan perahu pancung atau dengan speedboat milik patroli TNI AL Lanal Tanjung Balai Karimun dan dapat ditempuh sekitar 30 menit perjalanan.



Gambar 4.9. Pulau Karimun Kecil.
Sumber : Koleksi pribadi.

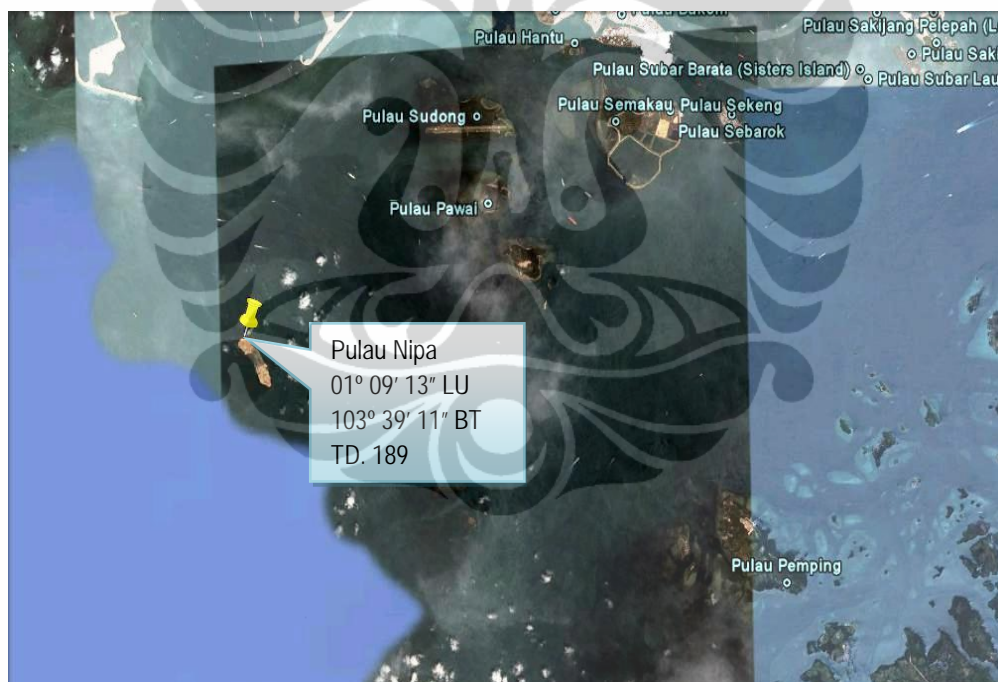
Sarana yang terdapat di Pulau Karimun Kecil yaitu menara mercusuar yang tidak berpenjaga. Tidak terdapat sarana jalan di pulau ini, hanya berupa jalan setapak. Untuk sumber air tawar berasal dari sungai-sungai kecil yang berada di tengah pulau.

4.1.5 Pulau Nipa.

Posisi geografis Pulau Nipah berada posisi koordinat $01^{\circ} 09' 13''$ LU dan $103^{\circ} 39' 11''$ BT, secara administrasi termasuk dalam desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Pulau ini berada di Selat Philip

yang sangat strategis karena merupakan pertemuan Selat Malaka dan Selat Singapura yang menjadi alur pelayaran internasional.¹⁴⁷

Batas wilayah Pulau Nipa sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura dan Singapura, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Philip dan Kec. Moro, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Sedangkan pulau-pulau terdekat dengan Pulau Nipa yaitu Pulau Pelampong di sebelah tenggara Pulau Nipah, Pulau Takong Besar di sebelah tenggara Pulau Nipah, Pulau Takong Kecil di sebelah tenggara Pulau Nipah, Pulau Pawai Singapura di sebelah timur Pulau Nipah, Pulau Sudong dan Pulau Senang Singapura di sebelah timur Laut Pulau Nipah.¹⁴⁸



Gambar 4.10. Posisi geografis Pulau Nipa (skala 1 : 7000)
Sumber : diolah dari beberapa sumber.

Pulau Nipa merupakan pulau terluar Indonesia yang dulunya merupakan pulau yang dieksploitasi pasirnya untuk kebutuhan reklamasi Singapura. Saat ini kondisi Pulau Nipa sedang mengalami proses reklamasi

¹⁴⁷ Op cit, poin 175.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Dan Satgasmar Pam Pulau Terluar Pulau Nipa, Lettu Marinir Qomaru Zaman.

akibat pengerukan pasir yang berlebihan tersebut. Pantai pulau Nipa di pasang *tetrapod*¹⁴⁹ pemecah gelombang, tanggul tanah timbunan dan pohon-pohon pelindung.



Gambar 4.11. Pulau Nipa
Sumber : www.google.co.id.

Secara administrasi Pulau Nipa termasuk dalam Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Pulau ini berada di Selat Philip yang sangat strategis karena merupakan pertemuan Selat Malaka dan Selat Singapura yang menjadi alur pelayaran internasional. Luas pulau Nipa mencapai 60 ha pada waktu air surut, tetapi saat badai dan gelombang pasang akan menyusut menjadi 0,35 ha, sehingga tampak seperti deretan pohon yang hampir tenggelam. Pada tanggal 20 Februari 2004 luas 60 Hektar ini di pertahankan dengan ditandai penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri sebagai awal pembangunan konservasi Pulau

¹⁴⁹ Fungsi dari tetrapod adalah sebagai unit pemecah ombak (breakwater). Bentuk tetrapod ini dirancang untuk mengusir kekuatan dari ombak yang datang dengan membiarkan air mengalir ke sekitarnya bukan melawan ombak tersebut, dan untuk mengurangi perpindahan (jarak) tetrapod setelah tersapu ombak maka penyusunan tetrapod biasanya disusun secara acak.

Karang Nipah¹⁵⁰. Kondisi demikian ditambah kegersangan dan ketiadaan sumber air bersih, menyebabkan pulau ini tidak dihuni oleh penduduk tetap. Pulau Nipa dapat dicapai dari Batam dari pelabuhan kapal tradisional di daerah Batu Ampar selama 1 jam perjalanan. Di Pulau Nipa terdapat dua titik dasar perhitungan batas Laut dengan Malaysia dan Singapura yaitu TD 190 dan TD 190A.¹⁵¹

Perairan Pulau Nipah dan sekitarnya mempunyai tipe pasang surut ganda, yaitu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam waktu 24 jam dengan tinggi dalam air maksimum sebesar 56 meter. Mean sea level (MSL)¹⁵² dari hitungan sementara pada kedudukan 2,525 meter. Untuk arus laut dan gelombang laut dari hasil pengukuran arus statis menggunakan current meter pada umumnya arah arus adalah ke utara dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Saat surut :
 - 1 meter maka kecepatan arusnya 0,748 m/det ke arah utara.
 - 5 meter maka kecepatan arusnya 0,582 m/det ke arah utara.
 - 10 meter maka kecepatan arusnya 0,507 m/det ke arah utara.
- 2) Saat pasang :-
 - 5 meter maka kecepatan arusnya 0,279 m/det ke arah utara.
 - 10 meter maka kecepatan arusnya 0,181 m/det ke arah utara.

Sedangkan hasil pengamatan pada arus dinamis menggunakan trayektori menunjukkan pola yang tidak beraturan. Arus di sekitar pulau nipah ini mengalami turbelensi yang diakibatkan oleh arus kuat dari barat –

¹⁵⁰Hasil wawancara dengan Dan Satgasmar Pam Pulau Terluar Pulau Nipa, Lettu Marinir Qomaru Zaman.

¹⁵¹Prasetyono, Teo Tri, Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terluar Indonesia, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009, hal: 187 – 188

¹⁵²Bila mengambil pengertian dari <http://en.wikipedia.org>, Mean sea level (MSL) is a measure of the average height of the ocean's surface (such as the halfway point between the mean high tide and the mean low tide); used as a standard in reckoning land elevation. Yang secara garis besar berarti ukuran ketinggian rata-rata permukaan laut (seperti rata-rata titik tengah antara pasang tertinggi dan surut terendah), digunakan sebagai standar perhitungan dalam elevasi permukaan tanah (daratan)

utara dan timur – selatan yang membentur di Pulau Nipa. Gelombang laut disekitar pulau bervariasi dengan ketinggian gelombang kurang lebih 0,5 meter, namun gelombang yang ditimbulkan oleh lalu lintas kapal-kapal besar cukup kuat mencapai 0,6 meter dengan periode 7 sampai 10 kali selama 15 sampai dengan 20 detik.¹⁵³

Jenis flora yang terdapat di Pulau Nipa pada umumnya jenis tanaman bakau yang hanya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) batang pohon kecil dan telah ditanam 1000 pohon waru dan cemara udang penanaman pohon oleh mantan Presiden RI pada peresmian monumen pos pengamat TNI AL pada tanggal 20 Desember 2003 namun yang tumbuh sampai sekarang kurang lebih 200 pohon, pada bulan Maret 2009 telah ditanam 1000 pohon cemara, ketapang dan kelapa namun yang hidup sampai sekarang kurang lebih hanya 100 pohon, dan pada tanggal 21 Oktober 2009 telah ditanam 3000 pohon ketapang dan mahoni oleh Lanal Batam bekerja sama dengan anggota Satgas Marinir Pulau Nipa dan masih hidup sampai sekarang. Pada tanggal 24 Desember 2009 sampai tanggal 10 Januari 2010 telah ditanam 6000 pohon trembesi oleh anggota Satgas Marinir Pam Pulau Terluar VIII dan anggota Posal Pulau Nipa. Jenis fauna yang ada di Pulau Nipa hanya ikan yang hidup di sekitar karang dan siput laut yang menempel pada batu karang dan beberapa burung bangau dan camar.¹⁵⁴

Di Pulau Nipa sudah dipasang prasasti yang diresmikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dalam prasasti ini dituliskan suatu semangat yang dapat mengobarkan semangat tugas bagi pasukan pengamanan Pulau Nipah. Fasilitas yang ada di Pulau Nipa yaitu dermaga beton yang mempunyai panjang 110,2 m dan lebar 8 m. Terdapat juga pembangkit listrik tenaga surya, pos TNI AL dan fasilitas penyulingan air laut untuk keperluan para penjaga pulau dan pengunjung yang datang. Juga terdapat mercusuar dan mess atau barak-barak yang di gunakan sebagai tempat tinggal satgas

¹⁵³Lo cit.

¹⁵⁴ibid.

pengamanan pulau dan petugas navigasi. Nipa dapat ditempuh dengan speedboat namun harus mendapat ijin dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam.



Gambar. 4.12. Beberapa sarana yang terdapat di Pulau Nipa. Pembangkit listrik tenaga surya, mess prajurit, mercusuar, dermaga beton, pos pengamatan, dan lahan tanaman cemara dan trembesi.
Sumber: koleksi pribadi.

4.1.6 Pulau Palompong.

Pulau Palompong berada pada koordinat $01^{\circ} 7' 44''$ LU dan $103^{\circ} 41' 58''$ BT.¹⁵⁵ TD 191 merupakan titik dasar penentu batas laut dengan wilayah

¹⁵⁵Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 38 tahun 2002, pada lampiran Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, poin 177.

negara tetangga, letaknya hanya berjarak 6 km di sebelah timur TD 190A Pulau Nipa.



Gambar 4.13. Posisi geografis Pulau Palompong (skala: 1 : 10.000)
Sumber : diolah dari beberapa sumber.

Pulau Palompong yang merupakan pulau terluar yang berada di wilayah Selat Malaka berada dalam wilayah administrasi Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penanda Wilayah Hukum yang terdapat di pulau ini adalah titik dasar No. TD 191 dan titik referensi No. TR 191. merupakan titik dasar penentu batas laut dengan wilayah negara tetangga. Pulau Palompong letaknya hanya berjarak 6 km di sebelah timur Pulau Nipa. Kedua pulau bertetangga ini terletak diselat Singapura yang selalu dilalui hilir mudik kapal, bahkan perairan barat Palompong sering digunakan kapal-kapal lego jangkar sebelum memasuki pelabuhan Singapura.

Pulau Palompong memiliki luas 0,23 km² dengan struktur pantai yang landai. Pulau ini memiliki arus laut yang tenang, namun dapat berubah apabila terdapat kapal yang melaksanakan manuver disekitar perairan tersebut.

Palompong yang merupakan pulau yang berkontur tanah berpasir hanya ditumbuhi kelapa, semak, bakau, dan tanaman perdu. Jenis fauna yang ada hanya elang laut dan ikan-ikan pelagis yang hidup disekitar pulau.



Gambar 4.14. Pulau Palompong
Sumber : Koleksi pribadi

Di pulau ini terdapat mercusuar yang tidak berpenjaga. Tidak terdapat sumber air tawar dan fasilitas lain, seperti dermaga, listrik dan lainnya. Kondisi pulau yang berupa tanah berpasir, dapat terkikis oleh abrasi air laut karena tidak terdapat pelindung hempasan ombak seperti yang terdapat di pulau Nipa.

4.1.7 Pulau Batu Berhanti.

Pulau Batu Berhanti merupakan pulau karang yang mempunyai luas 0,28 ha yang masuk dalam wilayah Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun hanya memiliki luas 0,28 ha, keberadaan pulau batu berhanti sangatlah penting karena sebagai garis terluar dan penanda batas wilayah kedaulatan NKRI. Pulau Batu berhanti mempunyai titik dasar penentu batas yaitu TD 192 yang dipasang dan

digunakan sebagai dasar perundingan batas wilayah laut teritorial dengan Singapura. Pulau Batu Berhanti berada pada koordinat $01^{\circ} 11' 06''$ LU- $103^{\circ} 52' 57''$ BT. Penanda hukum wilayah yaitu titik dasar TD 192.¹⁵⁶



Gambar 4.15. Posisi geografis Pulau Batu Berhanti (skala: 1 : 10.000)
Sumber : diolah dari beberapa sumber.



Gambar 4.16. Pulau Batu Berhanti
Sumber : Koleksi pribadi.

¹⁵⁶Ibid, poin 180.

Pulau Batu Berhanti terdiri dari susunan atau deretan karang yang memanjang. Rangkaian karang ini tampak jelas saat air surut, namun jika air pasang akan tenggelam dan hanya menyisakan tanda suar yang terlihat. Penjaga rambu suar dan penjaga keamanan laut Indonesia tidak tinggal di pulau ini karena melihat kondisi pulau Batu Berhanti yang berupa karang.

4.1.8 Pulau Nongsa.

Pulau Nongsa merupakan pulau yang berada di wilayah Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau nongsa berada pada koordinat 01° 12' 29" LU dan 104° 04' 47" BT. Sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga, pulau Nongsa memiliki titik dasar TD 193.¹⁵⁷



Gambar 4.17. Posisi geografis Pulau Nongsa (skala: 1 : 10.000)
Sumber : diolah dari beberapa sumber.

Pulau Nongsa merupakan pulau yang berada di wilayah Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang dapat ditempuh selama

¹⁵⁷ Ibid, poin 181.

15 menit dengan menggunakan speedboat. Pulau Nongsa memiliki luas 7,7 ha sebagai penentu batas wilayah NKRI dengan negara Singapura memiliki titik dasar penentu yaitu TD 193. Daratan Pulau Nongsa ketika air surut memanjang sampai 200 m, disaat air pasang merupakan tiga pulau kecil terpisah yang berjajar, namun cukup untuk memenuhi definisi sebuah pulau¹⁵⁸. Sebuah menara suar berkonstruksi besi dan tidak berpenjaga terdapat di pulau Nongsa. Daya tarik pulau ini terletak di pantainya yang berpasir putih serta halus. Kondisi ini bisa dikembangkan untuk pariwisata di Kepulauan Riau.



Gambar 4.18. Pulau Nongsa
Sumber : www.garisdepannusantara.org

Sumberdaya yang ada di pulau ini berupa hewan elang laut dan ikan-ikan pelagis seperti ikan kerapu, ikan selar dan ikan-ikan karang lainnya. Selain itu di pulau ini terdapat kelapa, semak, bakau, ketapang dan cemara. Daya tarik pulau ini terletak di pantainya yang berpasir putih serta halus.

¹⁵⁸ Lihat UNCLOS 82, pasal 121, hal: 66, didefinisikan bahwa “An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide” (daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi).

Kondisi ini bisa dikembangkan untuk pariwisata di Kepulauan Riau dimana akses ke pulau ini juga cukup mudah.

4.2 Gambaran Aspek Pemberdayaan Pulau-Pulau di Sekitar Selat Malaka.

4.2.1. Kebijakan Umum Tata Ruang Negara.

Kebijakan tata ruang negara yang dilaksanakan di pulau-pulau terluar dalam penelitian ini harus dilihat dari kebijakan tata ruang berdasarkan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam kaitannya dengan tata ruang wilayah negara Indonesia, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu *pertama*, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. *Ketiga*, memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. *Keempat*, keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa kebijakan tata ruang negara hanya dilaksanakan di Pulau Berhala dan Pulau Nipa, dengan dilaksanakannya beberapa program pengembangan wilayah. Diantaranya dengan memperhatikan kondisi pulau, sudah dilaksanakan reklamasi sebagai bagian dari mitigasi bencana. Sedangkan Pulau Batu Mandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Palompong, Pulau Batu Berhanti dan Pulau Nongsa, tidak mendapat perhatian seperti kedua pulau yang lain. Khususnya Pulau Batu Mandi, Pulau Batu Berhanti dan Pulau Palompong, dihadapkan ancaman akan abrasi dan tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global.

Pemanfaatan sumberdaya yang terdapat pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar masih dirasa kurang. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan, bahwa penangkapan ikan oleh nelayan di sekitar pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Palompong, Pulau Nipa, hanya menggunakan perahu kecil dan kadangkala perahu dengan mesin sederhana dengan alat jaring tradisional. Hal ini tentu kurang mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga pendapatan nelayan tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk Pulau Nongsa dan Pulau Berhala sudah dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Terutama Pulau Nongsa, yang akses menuju ke pulau relatif mudah, hanya menggunakan perahu pompong ditempuh dalam waktu 15 menit dari pantai Nongsa. Sedangkan Pulau Berhala, akses menuju ke pulau relatif sulit, dikarenakan sarana transportasi tidak setiap waktu dapat menuju pulau. Dan juga jarak pulau yang cukup jauh. Namun sumberdaya laut yang terdapat di wilayah Pulau Berhala cukup banyak, yaitu terdapat ikan-ikan dengan ukuran besar. Nelayan sekitar pulau sudah menggunakan perahu bermotor dan jaring pukat kecil. Sehingga pendapatan nelayan dapat lebih baik. Namun, banyaknya ketidaktahuan batas wilayah, maka sering terjadi penangkapan nelayan yang beroperasi di sekitar

Pulau Berhala oleh kepolisian Malaysia. Selain itu banyak nelayan di sekitar pulau terluar menggunakan peta buatan Malaysia.¹⁵⁹

Kondisi infrastruktur yang ada di pulau-pulau terluar dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Terutama fasilitas listrik dan sarana air bersih. Hal ini dikarenakan kondisi pulau yang merupakan pulau-pulau kecil yang terpisah dari pulau induk cukup jauh sehingga sarana tersebut sulit untuk disuplai dari pulau daratan. Di Pulau Berhala, kondisi infrastruktur cukup memadai, sarana prasarana yang ada sudah dapat digunakan dan dapat menunjang kegiatan pengamanan di pulau tersebut. Sudah terdapat dermaga beton, sarana listrik tenaga surya, sumber air bersih, sarana tempat tinggal, dan pos pengamatan serta alat bantu navigasi. Untuk potensi yang dapat dikembangkan adalah sebagai potensi wisata bahari.¹⁶⁰ Untuk sarana telekomunikasi, pasukan pengamanan pulau hanya berkomunikasi dengan sarana radio panggil dikarenakan tidak sampainya sinyal telepon genggam Indonesia ke pulau tersebut.¹⁶¹



Gambar 4.19. Penampungan air hujan yang airnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh pasukan penjaga pulau Nipa.
Sumber : Koleksi pribadi

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Dan Posal Tokong Hiu (Iyu Kecil) Letnan Satu (P) Edvan, di Pulau Iyu Kecil, tanggal 29 April 2011, pukul 11.30 wib.

¹⁶⁰ <http://serdangbedagaikab.go.id>.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Dan Satgasmar Pam Pulau Terluar Pulau Berhala, Lettu Marinir Agus Mutaqin.

Di Pulau Nipa, sarana yang ada yaitu dermaga beton, mercusuar, barak pasukan, pos pengamatan, sarana listrik tenaga surya, dan sarana pembuatan air tawar dari air laut. Namun alat ini dirasa kurang memadai karena hanya berkapasitas 200 liter per hari.¹⁶² Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air tawar, pasukan penjaga pulau memanfaatkan air tadah hujan yang kualitasnya jauh dari baik.

Untuk sarana di Pulau Iyu Kecil, tidak terdapat sumber air bersih (air tawar). Penghuni pulau yang merupakan personel TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Karimun yang berjumlah 5 orang dan personel navigasi berjumlah 5 orang memanfaatkan air hujan yang ditampung dalam bak penampungan. Apabila tidak turun hujan (pada saat musim kemarau), mereka dengan terpaksa membeli air tawar dari Pulau Karimun Besar.¹⁶³

Pulau Karimun Kecil, Pulau Batu Mandi, Pulau Palompong, Pulau Batu Berhanti hanya mempunyai sarana suar yang digunakan sebagai alat bantu navigasi. Tidak terdapat sarana lain. Namun Pulau Karimun Kecil terdapat sumber air tawar yang berasal dari sungai yang terdapat di tengah pulau. Untuk pulau-pulau yang lain tidak ada dikarenakan pulau-pulau tersebut hanya mempunyai dataran yang kecil. Selain itu letaknya cukup jauh dan sulit dijangkau.

4.2.2. Partispasi Masyarakat Sekitar.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berada di sekitar pulau-pulau terluar dalam proses menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pengamatan di lapangan menunjukkan

¹⁶² Hasil wawancara dengan Dan Posal P Nipa, Letda Laut (P) Philipus, di P Nipa, tanggal 26 April 2011, pukul 10.17 wib.

¹⁶³ Ibid.

bahwa dalam pemberdayaan pulau terluar memang diperlukan partisipasi masyarakat. Hal ini karena pulau-pulau terluar tersebut, terutama pulau-pulau yang mempunyai dataran yang cukup luas (P. Berhala dan P. Nipa maupun P. Karimun Kecil) memerlukan kehadiran penduduk untuk menguatkan kepemilikan pulau agar tidak diklaim oleh negara lain. Apabila melihat kebelakang tentang lepasnya Sipadan dan Ligitan, yang disebabkan minimnya kehadiran simbol negara maupun personil di pulau itu, maka Indonesia bisa kalah dalam hal kepemilikan pulau. Hal ini tentunya tidak ingin kembali terjadi terhadap pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni yang berada di sekitar Selat Malaka.

Peran serta masyarakat perbatasan laut harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pulau-pulau terluar di perbatasan laut. Walaupun banyak pulau-pulau terluar di perbatasan yang tidak berpenghuni, tetapi masyarakat di pulau-pulau sekitarnya yang lebih luas dapat dilibatkan peran sertanya baik dalam hal menjaga keamanan perairan, perlindungan lingkungan terumbu karang dan hutan bakau, ataupun dalam aktivitas pembangunan ekonomi lainnya. Peran serta masyarakat perbatasan laut yang berkualitas akan terwujud dengan program-program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan peningkatan pengetahuan, khususnya dibidang kelautan dan perikanan.

4.2.3. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pulau-pulau terluar di wilayah Selat Malaka yaitu Pulau Berhala, Pulau Batu Mandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Palompong, Pulau Batu Berhanti dan Pulau Nongsa, merupakan pulau kosong tak berpenghuni. Walaupun demikian, pulau-pulau tersebut mempunyai peranan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disadari bahwa wilayah pulau-pulau terluar yang berbatasan

dengan negara lain adalah penanda batas teritorial Nusantara yang menjadi garis depan kedaulatan Indonesia dan merupakan pintu atau halaman dari keseluruhan wilayah negara yang paling mudah diakses dan paling rentan terhadap pengaruh dari luar. Baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, maupun yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Indonesia yang merupakan Negara kepulauan yang berwawasan nusantara, merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh, yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Untuk itu diperlukan usaha pemberdayaan yang baik dalam pemanfaatan pulau-pulau tersebut walaupun pulau itu hanya mempunyai luas 200 m², seperti Pulau Batu Berhanti. Dalam sambutannya saat mencanangkan program pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan *pulau kecil terluar sangat strategis karena beranda Negara paling depan yang langsung berhubungan dengan Negara luar. Harus diberi perhatian khusus dan perlindungan agar kasus Sipadan Ligitan tidak terulang.*¹⁶⁴

Perhatian khusus terhadap pulau terluar merupakan tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan Negara lain harus segera dilaksanakan. Pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan dan pemberdayaan di pulau-pulau terluar dalam rangka menjaga tetap utuhnya NKRI. Apabila tidak, tidak menutup kemungkinan pulau-pulau terluar yang pada umumnya kosong dan tidak berpenghuni akan diklaim pihak asing sebagai miliknya dan berusaha membangunnya. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau Wiry Putra Silalahi mengatakan bahwa, *pemerintah pusat harus segera merealisasikan*

¹⁶⁴ Badriah dan Wiguna, Presiden Canangkan Pemberdayaan Pulau Kecil terluar, dalam tempo interaktif tanggal 17 November 2006, diunduh dari <http://www.tempointeraktif.com> pada 11 Juli 2010, 12.30 wib.

*proyek pembangunan pulau terluar, karena dinilai penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Pulau terluar rentan diklaim negara asing, karena itu harus mendapat perhatian pemerintah daerah dan pusat, meski pulau tersebut berukuran kecil*¹⁶⁵. Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Surya Makmur Nasution mengungkapkan, *pemerintah harus memiliki strategi dalam menjaga pulau-pulau terdepan, jangan hanya terkonsentrasi pada sektor keamanan. Selanjutnya ditambahkan pengelolaan sektor pariwisata dapat mendorong peningkatan perekonomian di pulau terdepan tersebut. Peningkatan perekonomian dapat mendorong warga maupun aparat keamanan tinggal di pulau terdepan.*¹⁶⁶

Namun hingga saat ini, menurut Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Dr. Soen'an H. Poernomo, M.Ed, *potensi pulau terluar masih kurang tersentuh oleh pembangunan, dikarenakan letak geografis pulau yang pada umumnya jauh, juga karena paradigma pembangunan nasional selama ini masih cenderung kearah daratan daripada paradigma kelautan. Hal ini perlu pengelolaan secara baik dan berkelanjutan, karena keberadaan pulau kecil terluar terkadang lebih bernuansa politis.*¹⁶⁷ Demikian juga dikatakan Mustafa Abubakar bahwa *pulau-pulau diperbatasan yang lokasinya jauh, dengan aksesibilitas yang rendah dan sulit dijangkau, menyebabkan pulau-pulau kecil memiliki keterisolasian yang tinggi dan keterbelakangan pembangunan. Sementara itu perhatian pemerintah baik di pusat maupun daerah masih sangat rendah.*¹⁶⁸ Perlu disadari pula bahwa Indonesia mempunyai satu wawasan yang dapat menyatukan dan menjadi dasar peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan pulau terluar ini yaitu wawasan nusantara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang di dalamnya tersirat Wawasan Maritim hanya ada di dunia akademi saja dan

¹⁶⁵ Proyek pembangunan infrastruktur pulau terluar Kepri, Kamis, 27 Januari 2011, 15:35 diunduh dari <http://www.batamfm.com/event.php?id=7447>.

¹⁶⁶ Ibid

¹⁶⁷ <http://www.dkp.go.id/archives/c/34/1822/dkp-bertekad-mengembangkan-pulau-terluar/>

¹⁶⁸ Abubakar, Mustafa, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006, hal: 114.

tidak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat dari wawasan kontinental ini, konsep pembangunan nasional Indonesia berorientasi ke daratan, sehingga pembangunan kelautan terabaikan.¹⁶⁹

Untuk pemanfaatan dan pemberdayaan itu, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah haruslah mempunyai peran yang aktif. Dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab atas pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota dan pemerintah pusat mempunyai wewenang tanggung jawab terhadap pintu-pintu perbatasan. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam pemanfaatan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Adanya pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain sepatutnya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keamanan dan pengamanan nasional demi menjaga keutuhan NKRI, namun harus diperhatikan keadaan sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah perbatasan. Pulau-pulau terluar juga mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional dimana diperlukan adanya keseimbangan antara faktor peningkatan kesejahteraan (*prosperity factor*) dan faktor keamanan (*security factor*). Dalam mendayagunakan pulau-pulau terluar akan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik pada tataran global, regional maupun nasional yang akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek kebijakan di daerah pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada aspek-aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.

Apabila melihat kebelakang, dengan terjadinya kasus Sipadan dan Ligitan, hal itu terjadi karena kurangnya peran pemerintah dalam pemberdayaan kedua pulau tersebut. Sedangkan Malaysia secara terus-menerus berada di pulau tersebut, melakukan penguasaan efektif terhadap

¹⁶⁹ Martadiningrat, Y Solichien, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional, 8 December, 2009, 11:57, <http://www.yussufsolichien.com>

pulau tersebut, dan melakukan perlindungan serta pelestarian ekologis. Kejadian ini dapat terjadi kembali terhadap pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Negara Malaysia dan Negara Singapura apabila pemerintah tidak berperan aktif dalam pemanfaatan pulau-pulau terluar. Kawasan perbatasan antar negara merupakan kawasan yang rentan terhadap infiltrasi ideologi, ekonomi maupun sosial budaya dari negara lain, disisi lain kawasan perbatasan yang merupakan pulau yang tidak berpenghuni dihadapkan pada permasalahan yang sangat mendasar seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta minimnya infrastruktur terutama perhubungan. Keteringgalan dengan negara tetangga berbatasan secara sosial maupun ekonomi dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi kerawanan yang bersifat politis. Keterbelakangan dan kemiskinan akibat keterisolasian pulau-pulau kecil perbatasan, menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas, guna memperbaiki perekonomiannya. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat ke nagara tetangga.¹⁷⁰ Kita semua perlu menyadari perlunya mengelola pulau-pulau kecil terluar secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, serta mewujudkan berbagai kegiatan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat dengan memadukan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, serta pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan.

Faktor utama dan penting terkait kedaulatan negara adalah pengawasan efektif. Kunjungan berkala ke kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, meski tak berpenghuni harus dilakukan. Kehadiran nyata pemerintah di wilayah perbatasan mutlak adanya. Berpenghuni atau tidak, selama ada pengawasan berkala, tak perlu khawatir pencaplokan pulau oleh negara lain.

¹⁷⁰ Opcit.

Peran pihak pemerintah dalam pemberdayaan pulau terluar sangat dibutuhkan dikarenakan masih adanya upaya pihak Negara lain untuk mengklaim bahwa pulau tersebut masuk wilayah negaranya. Menurut Prof. Dr. Ono Kurnaen Sumadiharga,¹⁷¹ *puluhan pulau terluar di Indonesia saat ini perlu diamankan karena sangat berpeluang diambil alih pihak asing. Selanjutnya dikatakan, 92 pulau yang perlu diamankan itu lokasinya tersebar dari Aceh hingga Papua dan berada cukup jauh dari garis pantai wilayah yang berpenduduk serta sebagian belum memiliki nama, yang sangat jarang dikunjungi pejabat pemerintahan. Demikian juga beberapa pulau kecil yang berada di sekitar kepulauan Natuna, Kepri yang juga jarang ditempati. Akibat jauhnya lokasi dan jarang dikunjungi tersebut, 92 pulau itu sangat berpeluang diduduki dan direbut pihak asing. Awalnya mungkin hanya nelayan asing yang menyandarkan kapal, lalu menetap sekian lama. Setelah itu menancap bendera negaranya dan mengklaim jadi milik mereka. Untuk mengantisipasi hal-hal itu, pemerintah perlu melakukan penjagaan seperti menempatkan personil Angkatan Laut agar pulau-pulau itu tidak dipergunakan pihak asing. Jika kurang mampu, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar pulau-pulau itu dimanfaatkan seperti dijadikan tempat wisata. Apabila sudah ada kegiatan di pulau-pulau terluar itu, maka pihak mana pun tidak berani untuk melakukan kegiatan ilegal, termasuk mengklaimnya sebagai milik mereka. Pemerintah juga dapat memasukkan pihak asing untuk mengelola pulau-pulau itu. Namun harus ada perjanjian dulu yang tidak merugikan Indonesia dalam segala hal.*

Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan pembangunan di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan adalah dengan mengacu kepada Perpres No. 78 tahun 2005, yaitu¹⁷²:

¹⁷¹ 92 Pulau Di Indonesia Terancam Hilang, Minggu, 24 Mei 2009 | 13:36 WIB, http://www.surya.co.id/berita_terkini/92-pulau-di-indonesia-terancam-hilang.html diunduh Tanggal 17 Maret 2011, Pkl 01.34 WIB

¹⁷² Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, pada BAB II Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pasal 2.

- 1). Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
- 2). Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- 3). Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Presiden No 78 tahun 2005 menyebutkan bahwa pengelolaan pulau-pulau terluar harus mengandung prinsip Wawasan Nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan mengacu kepada tata ruang wilayah¹⁷³. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pengamanan dan peningkatan kehadiran Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatannya terhadap pulau-pulau terluar di perbatasan antar negara guna mewujudkan itikad sebagai pemilik kedaulatan yang sah dan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi penduduk yang berada di daerah perbatasan dan menegaskan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsepsi Wawasan Nusantara.

Peran pemerintah yang juga sangat penting yaitu berusaha dan berupaya untuk terus mengajukan klaim atas kepemilikan pulau-pulau yang tersebar di wilayah NKRI ke badan dunia PBB yaitu *United Nations Group of Experts on Geographical Names* dengan cara berusaha mendaftarkan nama pulau, karena dari 17.480 pulau, yang sudah terinventarisir baru berjumlah 7.349¹⁷⁴ pulau, sementara sisanya belum memiliki nama. Hal ini dilakukan untuk menguatkan kepemilikan atas pulau-pulau tersebut dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁷³ Ibid, pasal 3.

¹⁷⁴ BPN RI, *Tata Cara Kerja Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011*, Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu, 2010, hal : 2

Dalam upaya pengelolaan pulau-pulau terluar, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka, yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah juga harus berusaha dan berperan aktif untuk melaksanakan pembicaraan atau diplomasi mengenai status batas wilayah Negara. Diplomasi mengenai perbatasan ini, khususnya batas wilayah perbatasan laut yang ada di wilayah Selat Malaka, merupakan suatu upaya untuk menjamin kedaulatan pengelolaan dan pemberdayaan wilayah perbatasan. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, *yang paling utama, perundingan perbatasan maritim dengan negara-negara lain khususnya Malaysia harus segera dilaksanakan, karena ini menentukan beredarnya kapal nelayan dan pesawat.*¹⁷⁵ Sama halnya apa yang dikatakan Pakar Hukum Internasional Suhaidi bahwa *masalah batas wilayah Indonesia dengan batas Negara asing itu agar secepatnya ditentukan, sehingga dapat dengan mudah mengawasi dan tidak perlu khawatir akan dicaplok pihak luar.*¹⁷⁶

Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Agar dapat diakui sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat sebuah Negara membutuhkan wilayah yang batas-batasnya jelas dan diatur dengan kesepakatan yang dihormati kedua pihak. Hal ini perlu dilakukan karena konflik yang muncul di wilayah perbatasan, bahkan pada perbatasan yang sudah jelas status hukumnya, dipicu oleh persoalan sosial ekonomi.

¹⁷⁵ Kurniawan, Tri, Perlu Ada Operasi Pengawasan Laut di Perbatasan RI, Senin, 23 Agustus 2010 - 17:17 wib, dalam <http://news.okezone.com/>

¹⁷⁶ www.antara-sumbar.com, Rabu, 27 Mei 2009.

4.2.4. Pembangunan Berkelanjutan (Aspek Ekonomi, Lingkungan dan Perubahan Iklim).

Pemberdayaan pulau-pulau terluar di wilayah Selat Malaka ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Pemberdayaan tersebut harus memperhatikan pemenuhan untuk generasi selanjutnya. Dalam hal ini pemberdayaan yang berkelanjutan dimaksudkan bahwa harus menerapkan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang maupun masa depan secara harmonis.

Pengelolaan sumberdaya yang terdapat di pulau-pulau terluar seharusnya mempertimbangkan aspek perencanaan, bagaimana pemanfaatannya, pengawasan yang ketat, pengendalian dan harus ada upaya pelestarian. Menurut Worosuprojo, bahwa apabila dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, maka akan dapat menjamin keberlanjutan ekologi, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan, keberlanjutan sistem manajemen dan keberlanjutan teknologi.¹⁷⁷ Untuk itu maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa pengelolaannya harus mengutamakan pengelolaan sumberdaya yang dapat diperbaharui, dilaksanakan penghematan dan pelestarian sumberdaya alam beserta lingkungannya, merehabilitasi berbagai kerusakan sumberdaya alam dan ekosistem, mereklamasi lahan yang rusak, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan. Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang

¹⁷⁷Worosuprojo, Suratman. Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Spasial Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, makalah pidato pengukuhan guru besar UGM Yogyakarta, 2007.

telah disepakati dunia internasional yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun demikian, selain sumberdaya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Apabila kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan baik, maka berbagai manfaat pembangunan bagi kesejahteraan terus membaik dan bencana lingkungan maupun kerusakan sumberdaya alam dapat diminimalisir.

Dalam suatu pemberdayaan dikatakan bahwa kegiatan itu merupakan sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Apabila melihat kondisi pulau-pulau terluar di wilayah Selat Malaka, hanya ada dua pulau yang dimungkinkan untuk dilaksanakan pengembangan, yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa. Kedua pulau ini memiliki daya tarik untuk dilaksanakan kegiatan ekonomi, yang dapat meningkatkan kondisi pulau tersebut.

Menurut Muhadjir Effendy, Pengamat Politik dan Militer yang merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, *Dengan kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk*

pertahanan yang efektif untuk mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka. Kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus dan paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Perlu adanya perubahan radikal terkait pengamanan di pulau terluar RI dan garis perbatasan dengan negara lain. Pengamanan itu perlu dilakukan secepatnya, apalagi negara tetangga selama ini sudah berancang-ancang mendaku (klaim) sejumlah pulau terluar sebagai miliknya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita bisa kecolongan pulau tersebut, padahal beberapa pulau itu memiliki sejumlah potensi yang bisa meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi.¹⁷⁸

Kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk pertahanan efektif untuk mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka. Menurut Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, *kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus dan paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh departemen terkait seperti Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan departemen lain harus bersatu padu menghadirkan kedaulatan RI melalui kekuatan nonmiliter.¹⁷⁹*

Terbenturnya masalah biaya yang sangat besar yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi di pulau-pulau terluar, maka diperlukan kerjasama dengan pihak lain. Namun harus diatur dengan ketentuan dan kepastian hukum yang jelas sehingga tidak merugikan pihak Indonesia dikemudian hari. Pengembangan investasi Freddy Numberi mengatakan bahwa *investasi yang dilakukan di pulau-pulau kecil adalah langkah positif yang patut didukung. Alasannya, kehadiran investasi itu bukan hanya memberi*

¹⁷⁸ <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=9037>

¹⁷⁹ <http://www.antarane.ws.com/berita/1263016581/dephan-ambil-pendekatan-nonmiliter-di-pulau-terluar>, Sabtu, 9 Januari 2010.

peluang pemasukan devisa bagi negara, tetapi menggerakkan perekonomian di daerah dan mengurangi pengangguran. Investasi di pulau tersebut dapat menampung puluhan tenaga lokal dan member efek domino yang besar bagi perekonomian lokal dan nasional. Pola investasi tak semata-mata murni asing, tetapi ada yang bermitra dengan pengusaha lokal.¹⁸⁰ Hal yang sama juga disampaikan Herwindo, Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gapindo), bahwa diperlukan keterlibatan pemerintah dan investor loka dalam mengelola pulau kecil dan terluar. Keterlibatan investor dalam negeri lebih menjamin penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan masyarakat setempat. Pengembangan kawasan oleh investor dalam negeri akan memudahkan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pulau. Namun persoalan yang kerap dihadapi investor dalam negeri dalam mengelola pulau kecil terluar adalah minimnya jaringan pasar, sementara apabila dialihkan kepada investor asing, akan lebih kuat karena memiliki jaringan pasar yang baik dan dapat mengemas serta menjual potensi pulau dengan baik.¹⁸¹

Kekayaan sumberdaya alam laut pulau-pulau terluar di wilayah Selat Malaka dengan kualitas keindahan dan keasliannya berpotensi menjadi tujuan wisata seperti penyelaman, pemancingan ataupun marine eco-tourisme seperti yang dikembangkan di Pulau Berhala. Di samping itu wilayah pulau-pulau terluar di wilayah Selat Malaka juga mempunyai potensi wisata terrestrial yaitu wisata dengan pemanfaatan lahan daratannya. Seperti di Pulau Berhala, Pulau Iyu Kecil dan Pulau Nongsa yang memiliki pasir putih dan pemandangan yang masih asri ditambah adanya beragam flora dan fauna endemic yang ada di pulau tersebut. Dengan mempertimbangkan peran ekonomis dan fungsi ekologis serta potensi sumberdaya alam pulau-pulau tersebut maka kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat setempat dan berkelanjutan. Menurut

¹⁸⁰ Kompas, 13 Maret 2006.

¹⁸¹ <http://www.goblue.or.id/pemerintah-dorong-investasi-pulau-kecil>

Etty R Agoes bahwa pembangunan dan pengelolaan pulau-pualu kecil terluar harus berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan ataupun pemberdayaan suatu wilayah tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Hal ini sangat penting karena dengan adanya infrastuktur yang memadai akan dapat mendukung bekerjanya sistem sosial ekonomi agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah. Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi.

Menurut Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Bobby R Mamahit perlu dilaksanakan pembangunan di daerah-daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Bobby menambahkan, *pembangunan yang akan dilakukan Ditjen Perhubungan Laut dalam merealisasikan program pembangunan transportasi laut 2010, adalah dengan meningkatkan peran transportasi laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan-kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang ekonomi lainnya. Selanjutnya, meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi laut; meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis serta pembangunan fasilitas pelabuhan dan keselamatan pelayaran di daerah tertinggal dan belum berkembang; serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi laut dan kepelabuhanan di seluruh wilayah secara efektif dan efisien.*¹⁸²

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau Wirya Putra Silalahi mengatakan *Pembangunan infrastruktur itu, dapat membantu pemerintah daerah dan aparat keamanan mempertahankan pulau terdepan yang*

¹⁸² Trans Media, Majalah Kementerian Perhubungan RI, Edisi 01, 2010, hal: 15 – 16, diunduh dari http://www.dephub.go.id/files/media/file/transmedia/MASTER_FINAL%20Edisi%201.pdf

*berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Singapura dan Malaysia.*¹⁸³

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi Hankam dan Luar Negeri dari Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay mendesak Pemerintah untuk segera membangun fasilitas memadai di pulau-pulau terdepan Indonesia. Ia mengatakan *Pulau-pulau tersebut jangan dibiarkan kumuh atau tak dikelola, sehingga kasus seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terulang lagi (hanya karena RI dianggap pihak Mahkamah Internasional tak memberdayakannya). Maka kewajiban Pemerintah untuk segera mengisi pulau-pulau terdepan ini, bukan hanya dengan penempatan satuan-satuan khusus militer, tetapi dimungkinkan untuk menempatkan penduduk. Itulah sebabnya, lanjutnya, di sinilah pentingnya membangun infrastruktur atau membuka fasilitas-fasilitas khusus sesuai potensi daerah tersebut.*¹⁸⁴

Namun pembangunan sarana prasarana sampai saat ini masih belum terlaksana. Rencana pemerintah untuk membangun fasilitas di pulau terluar sampai saat ini masih terkendala masalah biaya dan banyaknya pulau yang harus diberdayakan. Apabila dilihat dari kedepan pulau yang berada di wilayah Selat Malaka, masih banyak yang perlu mendapat perhatian yang serius, terutama pulau-pulau yang hanya mempunyai mercusuar yang tidak berpenjaga. Seharusnya pulau-pulau terluar di wilayah Selat Malaka diberdayakan dengan mengelolanya sebaik mungkin dan dibangun sarana prasara yang baik. Kasus hilangnya Sipadan Ligitan karena pemerintah Indonesia tidak memberdayakan pulau tersebut dengan baik. Yang bisa dijadikan sebagai bukti pemberdayaan dan pengelolaan apabila di pulau tersebut ada penduduk sipil yang beraktivitas langsung di pulau tersebut. Untuk itu maka pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan

¹⁸³ Proyek pembangunan infrastruktur pulau terluar Kepri, Kamis, 27 Januari 2011, 15:35 diunduh dari <http://www.batamfm.com/event.php?id=7447>.

¹⁸⁴ Antara news, Sab, 26 Feb 2011 10.06 WIB, diunduh dari <http://id.berita.yahoo.com/paskalis-kossay-bangun-fasilitas-di-pulau-terdepan-20110225-190600-329.html>.

infrastruktur di pulau-pulau terluar yang berada di wilayah Selat Malaka sebagai bukti kepemilikan sah terhadap pulau dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sehingga masyarakat akan menetap di pulau-pulau tersebut.

Ketersediaan sumber air bersih, listrik dan adanya sarana telekomunikasi yang baik, sangat diperlukan dalam menarik minat masyarakat untuk mediami pulau-pulau terluar. Selain itu kemudahan sarana transportasi antar pulau sangat penting dalam meningkatkan ekonomi nantinya.

Adanya pengerukan pasir laut di Pulau Nipa dan sebagian kecil di Pulau Iyu Kecil pada masa lalu, menyebabkan rusaknya ekosistem sekitar pulau. Hal ini berdampak puahnya biota laut karena kekurangan unsure hara. Dengan demikian potensi perikanan juga menurun yang berdampak menurunnya pendapatan masyarakat yang biasa menggantungkan hidupnya dengan menangkap ikan di wilayah perairan sekitar pulau tersebut.

Dengan berlatar kejadian ini, maka pemberdayaan pulau-pulau terluar harus didasari oleh kesadaran bahwa dalam pemanfaatannya harus didasari dengan memperhatikan lingkungan ekosistem sekitar. Pembangunan yang berwawasan lingkungan mutlak dilaksanakan untuk mewujudkan keberlanjutan pemberdayaan di masa datang. Dengan demikian, akan memungkinkan pemenuhan kebutuhan yang saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk generasi akan datang. Pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di pulau-pulau terluar dilakukan dengan seefisien mungkin dan memperhatikan konservasinya. Sumberdaya alam adalah segala unsur alam, baik dari lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia. Yang berarti dapat memberikan manfaat yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pulau-pulau terluar.

Namun memang kenyataannya, apabila dalam pembangunan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar memerlukan upaya reklamasi, maka sebagian ekosistem sekitar pulau akan terganggu. Hal ini disebabkan, proses reklamasi memerlukan tempat untuk ditimbun dan digunakan untuk keperluan lain. Tetapi hal ini juga dapat diatasi dengan berusaha mengembalikan fungsi semula lingkungan dan ekosistem sekitar secara buatan. Misalnya dengan membuat dan mengembangbiakkan terumbu karang buatan.

Pemanasan global dewasa ini sudah berpengaruh besar terhadap perubahan iklim dunia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan sudah merasakan kehilangan 24 pulau akibat dari pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut sehingga dapat menyebabkan wilayah pesisir terendam, pulau-pulau kecil hilang karena tenggelam, erosi pantai dan abrasi, serta rusaknya infrastruktur yang ada di wilayah pesisir. Pada masa mendatang kehilangan pulau-pulau kecil bisa juga disebabkan oleh dampak pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang selanjutnya mempengaruhi kenaikan permukaan laut, sehingga pulau-pulau kecil terutama yang topografinya datar yang memiliki ketinggian rata-rata satu meter di atas permukaan laut akan menjadi sangat rentan, sehingga dapat tenggelam atau hilang secara fisik. Hilangnya pulau secara fisik didapat dari kecenderungan peningkatan suhu bumi sudah mulai terlihat sejak abad ke dua puluh, sedangkan peningkatan emisi karbon dioksida di Indonesia mulai mengalami peningkatan berarti sejak tahun 1949. Dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menghadapi dampak perubahan iklim yang kian parah, berupa krisis air, kekeringan, banjir, kekurangan pangan, berkurangnya daratan serta tenggelamnya ribuan pulau. Hal ini timbul akibat meningkatnya suhu rata-rata di Indonesia yang diproyeksikan akan mencapai 4,2 derajat Celsius pada tahun 2050 akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca

Dalam mengantisipasi pemanasan global dan perubahan iklim, pemerintah sudah berupaya untuk mengantisipasi dampak tersebut, terutama terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa semua pihak dapat berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau terluar yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diharapkan untuk pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian dan melihat kerugian yang ditimbulkan akibat pengelolaan yang dilakukan. Pada intinya adalah pengelolaan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara efektif dan terpadu. Dalam undang-undang ini juga dikatakan bahwa untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kegiatan mitigasi bencana terhadap kegiatan pengelolaan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk mengantisipasi kerusakan pulau yang parah, contohnya adalah Pulau Nipa, sudah dilaksanakan kegiatan reklamasi. Dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 dijelaskan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Disini jelas bahwa tujuan dari reklamasi tersebut adalah berupaya untuk memberikan manfaat dan nilai tambah terhadap pulau yang direklamasi. Hal ini dapat juga dilakukan terhadap pulau-pulau kosong diwilayah Selat Malaka yang mengalami abrasi dan tenggelam saat air pasang, seperti halnya yang terjadi pada Pulau Batu Berhanti dan Pulau Nongsa.

Pulau terluar sebagai pulau yang sangat strategis dalam penentu batas wilayah, memang seharusnya sudah dikelola sebaik mungkin. Antisipasi yang dilakukan dengan mengadakan reklamasi seharusnya dilaksanakan terhadap pulau-pulau yang rawan tenggelam dan pulau-pulau yang memiliki daratan

yang tidak luas. Pulau Batu Berhanti yang terdapat di Selat Malaka dengan kondisi terlihat hanya pada saat air laut surut, sedangkan pada saat air laut pasang, pulau ini akan hilang karena tenggelam. Untuk itu diperlukan upaya reklamasi oleh pemerintah agar Pulau Batu Berhanti tidak hilang. Dengan pelaksanaan reklamasi selanjutnya akan dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan perekonomian atau setidaknya sebagai tempat basis pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia di wilayah Selat Malaka. Apabila dilaksanakan reklamasi, akan dapat dimanfaatkan dengan membangun sarana prasarana yang dibutuhkan, sehingga dapat didiami sebagai status kepemilikan sah terhadap pulau tersebut.

4.2.5. Pertahanan dan Keamanan.

Apabila berbicara tentang pertahanan dan keamanan maka dikaitkan dengan ada tidaknya personil yang bertugas untuk mengembannya. Sebagai fungsi pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara, maka keberadaan pulau terluar sangatlah strategis karena merupakan penentu batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari delapan pulau terluar yang diangkat pada penelitian ini, hanya dua pulau yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa yang mendapat penjagaan aktif dari personil aparat keamanan dengan jumlah satu pleton. Untuk pulau Iyu Kecil, sudah terdapat pos penjagaan yang dijaga oleh lima personil TNI Angkatan Laut dari Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai karimun ditambah lima orang penjaga alat bantu navigasi. Untuk pulau yang lainnya hanya berupa patroli rutin dengan menggunakan sarana perahu tradisional, perahu bermesin tempel atau dengan kapal patroli kecil. Pengamanan pulau-pulau terluar yang sangat strategis ini dilaksanakan oleh Satgas Marinir Pam pulau Terluar. Personil yang ditugaskan, melaksanakan tugasnya selama enam bulan. Selain itu ditempatkan juga personil penjaga mercusuar dari Departemen Perhubungan. Pengamanan ini dilaksanakan selain untuk menjaga kedaulatan NKRI juga

untuk mengantisipasi kegiatan *illegal fishing*, *illegal logging*, *piracy*, *smuggling* dan kegiatan ilegal lainnya.

Berdasarkan data dari Mabes TNI AL, sebagai pembanding, untuk tahun 2010, sudah dilaksanakan beberapa operasi pengamanan perbatasan diantaranya operasi penyekatan laut Indonesia Malaysia selama 365 hari dengan kekuatan 853 Personel, 5 kapal perang, 2 pesawat patroli maritim, 2 tim pasukan khusus, 1 satuan setingkat kompi marinir dan 3 pangkalan TNI AL. Selain itu dilaksanakan patroli bersama Indosin (Indonesia-Singapura) dengan kekuatan 300 personil melibatkan 2 kapal perang, 3 kapal patroli, dan mengikutsertakan 2 pangkalan TNI AL. Patroli Malindo (Malaysia-Indonesia) dengan kekuatan 140 personil melibatkan 2 kapal perang, 1 pesawat patroli maritim dan 1 pangkalan TNI AL.¹⁸⁵ Untuk pengamanan pulau terluar, TNI AL menugaskan pasukan marinir dalam satgas pengamanan pulau terluar (Satgas Pam Pulau Terluar) dengan jumlah personil yang sudah dibagi untuk masing-masing pulau (Lihat pada tabel 4.1).

Tabel 4.1. Operasi Pengamanan Pulau Terluar oleh Satgasmar

No	Pulau	Jumlah Personil
1	Pulau Rondo	34 Personil
2	Pulau Berhala	34 Personil
3	Pulau Nipa	90 Personil
4	Pulau Fani	34 Personil
5	Pulau Bras	34 Personil
6	Pulau Fanildo	34 Personil
7	Pulau Rote	34 Personil

Sumber : Mabes TNI AL, 2010.

Pulau-pulau terluar yang berada di wilayah Selat Malaka masih mempunyai permasalahan di bidang pertahanan keamanan. Hal ini

¹⁸⁵Mabes TNI AL, *Batas Maritim Indonesia Dan Permasalahannya*, Makalah paparan Wakasal pada rapat dengar pendapat dengan DPD RI, 2010.

dikarenakan belum terselesaikannya permasalahan penetapan batas wilayah laut territorial dengan negara tetangga, terutama dengan Malaysia. Selain itu kondisi pulau-pulau terluar yang berada di wilayah Selat Malaka merupakan pulau-pulau perbatasan yang tidak berpenghuni dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta masih sangat sulit dijangkau. Kondisi yang demikian akan dapat menyebabkan permasalahan yang sangat kompleks dalam kaitannya dengan ancaman keutuhan wilayah NKRI. Oleh sebab itu diupayakan untuk menempatkan personil pengamanan yang menjaga pulau-pulau tersebut disamping membangun pilar-pilar monumental seperti mercusuar, pos-pos pengamanan dan prasasti serta kebutuhan sarana prasarana lainnya.

Dalam menjaga kedaulatan NKRI, khususnya keutuhan wilayah NKRI, maka ditempatkan aparat TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan pulau terluar. Menurut Panglima TNI Agus Suhartono, *Masalah perbatasan dan pulau terluar menjadi perhatian serius. Cara yang paling penting untuk menjaga yaitu dengan kehadiran pasukan penjaga perbatasan dan pengamanan pulau terluar di lokasi pulau-pulau tersebut. Keberadaan TNI merupakan sebagai bentuk kekuatan.¹⁸⁶ TNI mengutamakan penjagaan dan perlindungan terhadap daerah perbatasan dan pulau terluar sejalan dengan visi TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara. Daerah perbatasan dan pulau terluar menjadi prioritas dalam program pembangunan 5 tahun ke depan. Untuk mendukung program tersebut maka TNI akan memperkuat alutsista (alat utama sistem persenjataan) sebagai sarana pembangunan kekuatan.¹⁸⁷ Saat ini penjagaan di pulau-pulau terluar di wilayah Selat Malaka hanya dilaksanakan pada Pulau Berhala dan Pulau Nipa dengan menempatkan satuan tugas khusus pengamanan pulau terluar. Untuk melaksanakan pengamanan mereka juga dilengkapi persenjataan yang seadanya. Namun pihak TNI AL juga melaksanakan operasi pengamanan*

¹⁸⁶<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/10/10/brk,20101010-283648.id.html>, Minggu, 10 Oktober 2010.

¹⁸⁷<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/10/02/brk,20101002-282031>, Sabtu, 2 Oktober 2010.

perairan sekitar pulau, dengan melaksanakan operasi keamanan laut. Operasi yang dilaksanakan TNI AL menggunakan KRI yang beroperasi rutin di wilayah pulau-pulau perbatasan dan dengan pesawat udara patroli maritim. Namun dengan belum selesainya perjanjian perbatasan, masih juga ditemukan adanya pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh kapal perang Negara Malaysia maupun Singapura. Hal ini seperti terjadi di perairan Nongsa, kapal Singapura memasuki perairan Indonesia sejauh 4 mil dan kejadian kapal perang Malaysia memasuki perairan tanjung berakit sejauh 8 mil.¹⁸⁸

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beban yang agak sedikit lebih berat untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayahnya dibandingkan dengan negara yang wilayahnya didominasi oleh daratan. Perbatasan laut memiliki kerumitan tersendiri dalam pengelolaannya. Misalnya saja, jarak yang terlalu dekat dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura di Selat Malaka yang tidak lebih dari 200 mil dan pengawasan perbatasan yang tidak mudah karena berupa lautan menyebabkan perbatasan laut lebih rawan sengketa. Sedangkan laut dalam membutuhkan jaminan kepastian hukum yang tegas atau akan muncul perairan netral di dalam negara yang tentunya ini bukan kondisi yang cukup baik bagi keamanan sebuah negara.¹⁸⁹

Dalam menjaga keamanan laut banyak institusi yang berperan. Namun kesemuanya belum mempunyai koordinasi yang baik. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menegaskan *perlu adanya koordinasi antar institusi untuk melakukan operasi pengawasan laut, sehingga masing-masing stakeholder DKP, Angkatan Laut, Polairud, Kemenhub, Bea cukai dalam operasi pengawasan di laut harus ada kordinasi satu sama lain, harus ada informasi sehingga operasi tidak berjalan sendiri-*

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Dansatkamla Lantamal IV, Mayor Laut (P) Hariyo Purnomo di ruang Slog Armabar, 12 April 2011.

¹⁸⁹ Rachmawati, Iva, *Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI*, dalam Madu, Ludiro, et al, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal: 89.

*sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mencermati begitu banyak masalah klaim perbatasan Indonesia, Malaysia, maupun Singapura.*¹⁹⁰

Selain dengan mengerahkan militer, pertahanan dan keamanan di pulau terluar ditempuh dengan pertahanan non militer (nirmiliter). Pertahanan nirmiliter merupakan upaya untuk memobilisasi kekuatan nonmiliter di dalam menyelesaikan atau menjawab spektrum ancaman yang bersifat fisik maupun nonfisik. Pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan alternatif tanpa penggunaan militer dalam pertahanan yang selama ini lazim digunakan. Pertahanan nirmiliter berkisar pada suatu sifat kebijaksanaan pertahanan yang seluruhnya lain, yakni tidak didasarkan pada tindakan militer sebagai jalan akhir, tetapi dengan menggunakan dimensi yang seluruhnya lain. Batasan pertahanan nirmiliter adalah sebagai politik pertahanan dengan menggunakan perlawanan rakyat yang sudah dipersiapkan terlebih dulu guna melindungi kemerdekaan dan kedaulatan dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar. Ada beberapa alasan untuk mengembangkan pertahanan nirmiliter, di antaranya pertahanan militer dapat menghancurkan segala sesuatu yang akan dipertahankan, pertahanan militer hanya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan akibat yang ditimbulkan merupakan malapetaka bagi masyarakat. Pertahanan nirmiliter bertumpu pada kemampuan negara untuk mengembangkan segenap aspek kehidupan nasional secara cerdas dan berkarakter. Pada hakikatnya, pertahanan nirmiliter ditekankan pada kekuatan lain, selain kekuatan militer.¹⁹¹

Untuk itu saat ini pengamanan pulau terluar sudah mengikut sertakan instansi lain selain instansi militer, diantaranya Kelautan dan Perikanan, perhubungan, kehutanan, dan bea cukai. Namun instansi yang ditempatkan di pulau-pulau terluar hanya instansi perhubungan dan kelautan, yang menempati Pulau Berhala dan Pulau Nipa.

¹⁹⁰ Kurniawan, Tri, Perlu Ada Operasi Pengawasan Laut di Perbatasan RI, Senin, 23 Agustus 2010 - 17:17 wib, dalam <http://news.okezone.com/>

¹⁹¹ <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=6945>

Dalam suatu rapat koordinasi tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, yang dilaksanakan oleh BNPP, dijelaskan tentang arah dan kebijakan pembangunan pulau-pulau kecil terluar, khususnya yang menyangkut masalah pertahanan serta keamanan. Hal ini dikarenakan di pulau-pulau terluar, yang berada di kawasan perbatasan banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas ilegal dan pelanggaran hukum lintas batas. Untuk itu diberikan arah kebijakan untuk mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana keamanan laut. Sasaran dari arah kebijakan pemantapan pengamanan perbatasan antar negara dan pengembangan sarana dan prasarana adalah memperkuat pertahanan, keamanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan laut. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah membangun pos-pos keamanan lintas batas di pulau-pulau terluar, penegakan hukum di perairan perbatasan, melakukan koordinasi pemantauan keamanan antara Indonesia dengan negara tetangga, melakukan pemberdayaan masyarakat diperbatasan, dan pemberlakuan kegiatan patroli keamanan laut di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar secara kontinue.¹⁹²

Kesemua kebijakan tersebut sampai saat ini sudah dilaksanakan, namun masih belum secara maksimal. Dalam hal pembangunan pos-pos keamanan di pulau-pulau terluar, masih menempatkan pasukan pengamanan pulau yang terdiri dari pasukan TNI AL dan belum melibatkan pasukan dari angkatan lainnya. Dari segi peralatan, masih belum didukung peralatan yang memadai, seperti peralatan pantau teropong yang dilengkapi dengan infra merah untuk dapat memantau di malam hari dan juga masih belum disediakannya sarana komunikasi yang memadai. Dalam pelaksanaan koordinasi, pos-pos pengamanan hanya mengandalkan sarana radio, yang kemampuannya tidak maksimal. Dalam hal penegakan hukum di perairan perbatasan, juga masih dirasa kurang maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari perwira operasi

¹⁹²Makalah BNPP, Peran dan Kebijakan BNPP dalam Pengelolaan Batas Laut, Rakor Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07 April 2011

lanal Batam (dalam hal ini P. Nipa, Palompong, Batu Barantai, dan Nongsa), Yudi Priyatno, *bahwa dalam melaksanakan operasi masih dirasa kurangnya alat pendukung pengamanan/pengamatan dan terbatasnya dukungan patroli pengamanan.*¹⁹³ Selain itu kendala lain juga disampaikan Perwira operasi Lanal Tanjung Balai Karimun (P. Iyu Kecil dan Karimun Kecil), Agus Yunianto, *bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan dan posal tidak memiliki alat GPS (global positioning system) sehingga dalam melaksanakan kmla terbatas menggunakan boat patroli tidak bisa mengetahui dengan jelas posisi sektor patroli.*¹⁹⁴

Dalam melakukan koordinasi pemantauan keamanan antara Indonesia dengan negara tetangga, sampai saat ini sudah dilakukan koordinasi patroli keamanan bersama dengan negara Malaysia dengan nama Malsindo dan dengan negara Singapura dengan nama Indosin. Dengan adanya operasi bersama ini diharapkan kegiatan ilegal lintas negara dapat ditekan dan tidak terjadi lagi. Namun kerjasama ini tidak melakukan patroli pengamanan pulau-pulau terluar yang pada dasarnya mempunyai keyakinan sendiri akan luas wilayah teritori negara masing-masing. Hal ini masih memungkinkan terjadinya konflik tentang batas wilayah terutama wilayah teritorial laut yang sampai saat ini masih ada yang belum diselesaikan.

Pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar diperbatasan, masih dirasakan belum dilaksanakan secara terpadu. Peran serta masyarakat di pulau-pulau terluar harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pulau-pulau terluar di perbatasan laut. Walaupun banyak pulau-pulau terluar di perbatasan yang tidak berpenghuni, tetapi masyarakat di pulau-pulau sekitarnya yang lebih luas dapat dilibatkan peran sertanya baik dalam hal menjaga keamanan perairan, perlindungan lingkungan terumbu karang dan hutan bakau, ataupun dalam aktivitas pembangunan ekonomi lainnya. Peran serta masyarakat perbatasan laut yang berkualitas akan terwujud dengan

¹⁹³Wawancara via email, jawaban diterima tanggal 29 Maret 2011, pukul 12.38 WIB.

¹⁹⁴Wawancara via email, jawaban diterima tanggal 8 April 2011, pukul 14.17 WIB.

program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan peningkatan pengetahuan, khususnya dibidang kelautan dan perikanan.

Untuk kegiatan patroli keamanan laut di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar secara kontinu juga masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan masih kurangnya kehadiran kapal patroli milik Indonesia di wilayah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Dalam pengamatan dilapangan di wilayah pulau Nipa, yang berbatasan dengan Singapura, kehadiran kapal patroli masih belum maksimal. Sementara kehadiran kapal patroli milik negara Singapura secara kontinu dapat dipantau, sebanyak 3 kapal perharinya. Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsuddin, bahwa *penempatan personel TNI tidak harus di setiap jengkal tanah di wilayah perbatasan. Akan tetapi personel TNI yang ditempatkan untuk menjaga perbatasan memiliki kualitas, baik itu yang berkaitan dengan mobilitas wilayah laut, darat dan udara. Oleh karena itu, patroli-patroli yang dilakukan baik melalui operasional di laut dan di darat dimaksudkan untuk mengimbangi luas wilayah baik wilayah darat maupun wilayah laut kita.*¹⁹⁵ Memang banyak kendala yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan kehadiran fisik kapal baik kapal perang maupun kapal patroli. Selain armada yang kurang, juga dukungan biaya operasional (logistik maupun bahan bakar) yang dirasa tidak mencukupi untuk melakukan operasi. Selain itu belum tersedianya sarana pendukung di pulau-pulau terluar seperti sarana perbekalan logistik cair (BBM dan minyak lincir), dukungan sarana pemeliharaan kapal ataupun dukungan lainnya, yang merupakan kebutuhan penting untuk pelaksanaan operasi rutin di sekitar pulau terluar.

¹⁹⁵http://www.jurnas.com/news/2386/Kemenhan_Inventarisasi_Pulau_Terluar_/434/Nasional

BAB V

PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI, KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN

5.1 Strategi Pembangunan Wilayah

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan kata lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan seringkali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur atau fasilitas fisik yang dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang dapat diterima.¹⁹⁶

Pembangunan merupakan gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan serta pembangunan bangsa. Pembangunan merupakan perubahan menuju ke arah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban umat manusia¹⁹⁷. Pembangunan merupakan proses terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan institusional untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebagai suatu proses, pembangunan akan dapat bergerak maju melalui kekuatan *self sustaining process*, bukan hanya mengandalkan peran pemerintah

¹⁹⁶Ernan Rustandi, et al, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, edisi pertama, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009

¹⁹⁷Sugiharto, *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*, Medan, USU Press, 2006, hal: iv.

saja, melainkan tergantung pada “*innerwill*”, yakni proses emansipasi diri dari seluruh komponen masyarakat pada suatu negara. Ditinjau dari sudut proses, usaha pembangunan pada dasarnya adalah berupa peningkatan manfaat sumber daya dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan demikian merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Apabila mengambil istilah dari Todaro diartikan bahwa pada hakikatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, baik secara material maupun spiritual.¹⁹⁸

Pembangunan di Indonesia di masa yang lalu seringkali berpijak pada paradigma pembangunan yang menekankan pada efisiensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat. Bagi negara sedang berkembang, yang pendapatan rendah perekonomiannya dapat tumbuh dengan cara terlebih dahulu mengorbankan aspek pemerataannya. Oleh karena pada tahap awal ekonomi nasional didominasi oleh pemerintah, maka wajar apabila pemerintah lebih memusatkan perhatiannya untuk mengalokasikan sumberdaya pembangunan yang ada kepada sektor-sektor atau wilayah-wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, yang pada umumnya berlokasi di kawasan darat dan perkotaan. **Wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas utama bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.** Kondisi demikian akan mendorong timbulnya disparitas antar wilayah yang semakin melebar karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup berlimpah.¹⁹⁹

¹⁹⁸ *Ibid*, Sugiharto.

¹⁹⁹ Lihat dalam Wiranto, Tatag, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*, Makalah pada Sosialisai Nasional Program MFCDP, September, 2004.

Dalam profil pembangunan khususnya dalam bidang kelautan Indonesia, pemerintah telah menjabarkan ke dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu²⁰⁰: meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, meningkatnya peran sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan daya dukung konsumsi ikan, pemeliharaan serta kualitas lingkungannya dan peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa. Melihat dari profil pembangun tersebut maka pembangunan bidang kelautan dapat sebagai salah satu sumber daya yang dapat menciptakan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan dan juga dapat menjamin stabilitas keamanan.

Pembangunan wilayah ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu.²⁰¹ Pembangunan mempunyai makna suatu perubahan besar yang meliputi fisik wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang didukung oleh perubahan dan penerapan teknologi dan perubahan sistem tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pembangunan merupakan upaya manusia dalam mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan serta wilayahnya²⁰².

Direktur Wilayah Pertahanan Strahan, Kementerian Pertahanan, Laksma TH Susetyo mengatakan, *jika Indonesia kaya, bisa dibangun 5 pulau setiap tahun. Saat ini, pulau-pulau di Tanah Air tercatat 17.480 pulau. Jumlah itu bervariasi di setiap departemen. Pembangunan pulau kecil seperti Pulau Nipah saja, membutuhkan waktu setidaknya empat tahun. Berarti, membangun seribu pulau membutuhkan waktu yang lama sekali. Pembangunan yang memerlukan pergantian banyak generasi bangsa Indonesia. Untuk itu, pembangunan pulau-pulau, tidak bisa dibebankan hanya pada kementerian pertahanan. Seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah, harus bahu-membahu*

²⁰⁰ Supeno, Imam Budi, *Arti Penting Selat Malaka dan Selat Philip Bagi Indonesia*, Jakarta, Jagratara, 2009, hal: 29.

²⁰¹ Worosuprodjo, Suratman, *Mengelola Potensi Geografi Indonesia Untuk Pembangunan Wilayah Berkelanjutan* dalam Sugiharto, *Pembangunan Wilayah Berwawasan Lingkungan dan Kebencanaan*, Medan, USU Press, 2007.

²⁰² Soetaryono, R, *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, 1998.

membangun pulau. Pembangunan yang akan menjadi penguat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya bagi pulau-pulau terluar. Pembangunan wilayah perbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar, masih berjalan secara sektoral. Hasilnya pun belum dapat dilihat, dinikmati, dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Implementasi pembangunan, sampai saat ini belum menunjukkan hasil sesuai harapan masyarakat. Memang, arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar telah berubah, dari kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi ke dalam, menjadi pembangunan berorientasi keluar. Paradigma kebijakan tersebut diarahkan pada pengembangan wilayah perbatasan sebagai beranda negara, yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, terutama ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Walaupun begitu, daerah-daerah perbatasan masih tetap rentan terhadap berbagai masalah. Berdasarkan kenyataan, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, sebagian besar terisolasi dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya rendah. Berarti, pembangunan daerah perbatasan memerlukan simpul yang mampu secara efektif mengintegrasikan kebijakan dan implementasi di lapangan. Dengan begitu, pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau terluar dapat berjalan sinergis, fokus, dan sistematis. Untuk itu, pembangunan daerah terluar harus dilakukan secara lintas departemen. Begitu pula, pembangunan harus terkoordinasi dengan rapi dan baik dan menjadi prioritas. Keberhasilan pembangunan pulau-pulau terluar bakal memberikan dampak besar, bukan hanya di bidang keamanan wilayah, melainkan juga di bidang politik, ekonomi dan sosial.²⁰³

Dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni, khususnya yang berada di sekitar Selat Malaka, harus dilihat potensi yang ada di masing-masing pulau. Dengan melihat kondisi geografisnya, struktur pulaunya maupun sumberdaya alam yang ada, maka diharapkan dalam pembangunan di tiap-tiap pulau dapat seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Asdep Pertahanan

²⁰³Lihat dalam Membangun Pulau Terluar dalam <http://banjarmasin.tribunnews.com>, Sabtu, 1 Mei 2010 01:32 Wita

Wilayah BNPP, Rahman Ibrahim, bahwa *dalam pengelolaan wilayah pulau terluar, pulau-pulau tersebut harus mempunyai infrastruktur yang kuat. Adanya kemudahan orang untuk menuju kesana, dengan adanya sarana transportasi yang mudah, juga adanya dermaga yang memadai untuk bersandar. Pengembangan ekonomi kawasan di pulau-pulau terluar sangat diperlukan dan harus segera. Namun dalam pengembangan ekonomi, jangan sampai mengubah aset-aset ekonomi yang sudah ada disana. Misalnya di Mianggas, yang akan dibangun air strip, dengan konsekuensi 30% lahan yang saat ini ditanami kopra, akan hilang. Hal ini berdampak bagi petani disana kehilangan mata pencaharian mereka. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka akan dialihkan menjadi nelayan. Sanggupkah mereka berubah dari petani menjadi nelayan. Mengapa tidak mencari tempat lain seperti di dekat pantai dengan melaksanakan reklamasi seperti di pulau Bali. Untuk itu diperlukan tata ruang yang disesuaikan dengan karakteristik pulau-pulau terluar. Seperti di Pulau Nipa, sudah dibagi dalam kawasan fungsi pertahanan dan kawasan ekonomi. Dulu dibagi tiga, ekonomi, lingkungan dan pertahanan. Namun perkembangan terakhir, untuk Pulau nipa dibagi 2 kawasan yaitu kawasan ekonomi dan kawasan pertahanan. Untuk kawasan lingkungan sudah termasuk dalam program yang tidak diatur secara khusus, karena berjalan dengan sendirinya. Untuk pemberdayaan tata ruang di pulau-pulau kecil terluar berdasarkan UU no 27 tahun 2007. Diperlukan sarana dermaga, sumber listrik, sumber air dan infrastruktur lain seperti telekomunikasi. Ketersediaan peralatan yang mendukung pengawasan juga harus dilakukan, seperti ketersediaan sarana pantau (teropong IR).*²⁰⁴

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau, Wiryra Putra Silalahi mengatakan, *Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyediakan dana sekitar Rp3 triliun untuk pembangunan infrastuktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara asing. Salah satunya, digunakan untuk pembangunan pulau terdepan yang sebagian besar belum memiliki infrastruktur dan tidak berpenghuni. Pemerintah pusat harus segera merealisasikan proyek*

²⁰⁴ Wawancara dilaksanakan di gedung BNPP, Lt.4 pada tanggal 18 Mei 2011, 15:45

*pembangunan pulau terdepan tersebut, karena dinilai penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Badan Nasional Pengelola Perbatasan berencana membangun infrastruktur berupa pembangunan jaringan listrik, air, prasasti, mercusuar dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur itu, dapat membantu pemerintah daerah dan aparat keamanan mempertahankan pulau terdepan yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dikarenakan pulau terdepan rentan diklaim negara asing, karena itu harus mendapat perhatian pemerintah daerah dan pusat, meski pulau tersebut berukuran kecil.*²⁰⁵

Dalam pembangunan pulau-pulau terluar harus dilihat dan disesuaikan dengan tata ruang sehingga dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan dapat digunakakan sebagai potensi pangkalan pertahanan. Hal ini ditempuh agar supaya pemanfaatan pulau-pulau terluar dapat dilaksanakan sesuai dengan pembiayaan dan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan negara. Sehingga dalam proses pembangunannya dapat seefisien dan seefektif mungkin.

5.2 Pemberdayaan Ruang Negara sebagai Potensi Pertahanan.

Indonesia dengan sejumlah persoalan batas wilayah maritim yang belum selesai khususnya dengan Malaysia dan Singapura, berhubungan langsung dengan kedaulatan negara. Masalah seperti ini haruslah mendapat perhatian serius oleh pemerintah antara lain dengan melalui pendayagunaan fungsi pertahanan baik fungsi pertahanan militer maupun nirmiliter secara terintegrasi demi mencapai hasil yang maksimal. Khususnya terhadap pulau-pulau terluar, yang berfungsi sebagai penentu batas wilayah dalam hal penarikan batas wilayah NKRI harus secara instensif mendapatkan perhatian.

²⁰⁵ Lihat dalam *Proyek pembangunan infrastruktur pulau terluar Kepri*, dalam <http://www.batamfm.com>, Kamis, 27 Januari 2011 - 15:35.

Pemberdayaan ruang negara dilandaskan akan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dikatakan bahwa ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Sebagai kawasan strategis, pulau-pulau terluar diberdayakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan maupun dapat dijadikan potensi pertahanan. Kawasan strategis nasional adalah salah satu dasar klasifikasi penataan ruang, yang merupakan amanat dari undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang penyelenggaraannya bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang berlandaskan ketahanan nasional, serta harus memperhatikan pertahanan keamanan. Undang-undang ini mengamanatkan pula agar penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan diatur dengan peraturan pemerintah, demikian pula dengan undang-undang 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamanatkan tentang wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Instalasi dan tempat latihan militer adalah aset-aset pertahanan negara, lokasinya berada di darat, udara dan di laut kedaulatan dan yurisdiksi nasional.

Dari hasil tinjauan langsung dilapangan dan hasil wawancara dengan petugas pengaman pulau terluar maupun komandan pos yang ada di Pulau Berhala maupun Pulau Nipa dalam hal pengaman mereka memang menempati sektor yang sudah ditentukan yaitu menempati pulau-pulau tersebut sesuai dengan perintah yang ada. Namun kondisi yang tidak mendukung, menyebabkan petugas yang ada mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, khususnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan sarana telekomunikasi. Selain itu tidak tersedianya kapal patroli yang siap setiap saat di dermaga, menyebabkan mereka hanya menggunakan sekoci karet dengan mesin

tempel yang daya jangkau operasionalnya tidak maksimal dan dapat terkendala apabila menghadapi cuaca buruk.

Dalam memberdayakan pulau-pulau terluar sebagai wilayah pertahanan, menurut Rahman Ibrahim, Asdep Pertahanan Wilayah BNPP, *Bagaimana memberdayakan pulau-pulau terluar tersebut apabila dijaga dapat dikatakan pulau yang layak hidup bukan hanya pulau yang layak huni. Pulau itu harus dapat dijaga 24 jam secara terus menerus (nonstop), minimal ada manusia disana dan tidak akan mati disana, sehingga dephan dalam memerintahkan untuk menempati pulau tersebut, pulau tersebut harus bukan layak huni namun layak hidup dengan syarat harus mempunyai logistik yang kuat. Mungkin kalau ditanya petugas pengamanan di pulau nipa atau pulau-pulau lain yang menjadi primadona, mereka akan menjawab bahwa mereka kesulitan akan dukungan logistiknya. Nah bagaimana mengatasi hal ini, masukan yang ada disana adalah bagaimana dukungan logistiknya dapat terpenuhi dengan segera.*²⁰⁶

Beberapa kendala pengamanan terhadap pulau terluar dapat digambarkan seperti pengamanan pulau Nipa yang menjadi pulau primadona saat ini, sebagai gambaran, menurut Hajjah Aida Zulaikha Ismet, Anggota DPD RI, *Untuk pengamanan oleh pihak TNI, dirasakan masih kurang. Hal ini dikarenakan pengamanan oleh pihak TNI tidak didukung dengan kapal dan pesawat yang memadai, kondisinya menyedihkan, infrastruktur yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kondisi yang mereka butuhkan. Logistik yang selalu kurang hal ini dilihat dari konsumsi mereka yang hanya makan mie instan dalam memenuhi logistik mereka sehari-hari. Pengadaan kapal patroli yang sesuai peruntukannya harus dilaksanakan untuk mendukung peran pengamanan petugas penjaga keamanan pulau.* Kendala yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi. Beliau mengatakan *saat kunjungan dipulau Nipa, sarana komunikasi disana sangatlah minim. Saat saya berdialog dengan prajurit yang bertugas di daerah perbatasan, mereka mengeluhkan sarana telekomunikasi. Disana (pulau nipa), line yang ada hanya milik Singapura, yang*

²⁰⁶Wawancara dilaksanakan di gedung BNPP, Lt.4 pada tanggal 18 Mei 2011, 15:45.

*apabila digunakan sangatlah mahal, karena terkena roaming. Selain itu, apabila akan didukung adanya kapal patroli, harus juga didukung sarana operasionalnya, yaitu kebutuhan bahan bakarnya juga bagaimana merawat peralatannya.*²⁰⁷

Khususnya Pulau Nipa yang menjadi *pilot project* pengembangan pulau terluar, saat ini masih belum didukung dengan kapal patroli dan hanya menempatkan 64 personil pasukan marinir ditambah beberapa personil anggota TNI AL Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam. Dengan kondisi yang demikian, apabila dikaitkan dengan keberadaan pulau yang sangat strategis, maka ketersediaan kapal patroli maupun sarana penunjang yang lebih baik sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pengamanan pulau, khususnya wilayah kedaulatan NKRI.

Demikian juga dengan keberadaan pulau-pulau lainnya yang merupakan pulau terluar di sekitar Selat Malaka, sebagai pulau yang dijadikan titik dasar penentu wilayah teritorial Negara Indonesia, haruslah mendapatkan perhatian lebih, dalam hal pengamanan pulau. Sebagai pulau terluar dapat dijadikan benteng terluar dalam menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi saat ini dengan adanya pengamanan satuan tugas terbatas pulau terluar, dirasakan kedaulatan NKRI dapat terjamin. Dengan adanya personil di pulau terluar, yaitu petugas yang menjaga pulau, maka itu menunjukkan bahwa Negara Indonesia telah berusaha untuk menjadikan pulau-pulau terluar sebagai pulau strategis dan dijaga keberadaannya. Selain itu dilaksanakan patroli rutin disekitar pulau. Menurut KSAL, Soeparno, *TNI AL juga terus melakukan patroli rutin di pulau-pulau lain yang yang tidak dijaga secara permanen.*²⁰⁸ Demikian juga penempatan personil pos angkatan laut di pulau-pulau terluar yang tidak dijaga marinir, merupakan pemanfaatan ruang negara sebagai pertahanan negara.

²⁰⁷Dialog khusus Batam TV, 27 April 2011 tentang Peran DPD RI dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan.

²⁰⁸Lihat dalam TNI AL Janji Tak Ada Pulau Milik RI Yang Hilang Lagi, www.detiknews.com, Rabu, 12/01/2011 12:07 WIB

Apabila sudah dikuasai dan diberdayakan dengan baik, diharapkan bahwa nantinya apabila dalam penyelesaian batas wilayah, akan dapat dijadikan bukti yang kuat akan kepemilikan wilayah territorial yang diambil berdasarkan titik dasar dari pulau terluar. Menurut Rahman Ibrahim, *tidak ada kekhawatiran akan hilangnya pulau-pulau tersebut akan hilang, karena pemerintah Indonesia sudah mendaftarkan kepemilikan pulau-pulau tersebut ke badan dunia PBB. Walaupun dibiarkan sebenarnya pulau-pulau tersebut tidak akan berdampak hilangnya pulau karena diklaim milik negara lain. Dengan demikian penarikan batas wilayah sejauh 12 mil akan disetujui oleh negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. Namun memang ada klaim yang dilakukan Malaysia tentang wilayah laut yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia, seperti yang diklaim Malaysia di wilayah perairan pulau Bintan.*

Namun walaupun demikian, pengamanan yang intensif sangat diperlukan. Menurut Muhadjir Effendy Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), *bahwa pengamanan itu perlu dilakukan secepatnya, apalagi negara tetangga selama ini sudah berancang-ancang mendaku (klaim) sejumlah pulau terluar sebagai miliknya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, Indonesia bisa kecolongan.*²⁰⁹

Untuk pengamanan pulau terluar saat ini dilakukan pengamanan pulau-pulau kecil terluar, dilaksanakan dengan menghadirkan kekuatan laut dan udara serta pangkalan baik secara periodik dan terus menerus sepanjang tahun di seluruh wilayah yurisdiksi nasional Indonesia dengan prioritas perairan dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang dan rendah guna melindungi dari ancaman pemanfaatan pulau-pulau terluar dari kegiatan illegal dan mencegah hilangnya pulau yang disebabkan oleh berbagai faktor, disamping menimbulkan dampak penangkalan. Agus Suhartono, selaku Panglima TNI mengatakan, *pengamanan pulau terluar yang dilakukan oleh pihaknya (TNI) dibedakan menjadi dua macam, yakni pengamanan pulau terluar yang ada penghuninya dan tidak berpenghuni.*

²⁰⁹ Lihat dalam *Dephan Ambil Pendekatan Nonmilitar di Pulau Terluar*, Sabtu, 9 Januari 2010 12:56 WIB dalam <http://www.antarane.ws.com>

Penjagaan dan perlindungan terhadap daerah perbatasan dan pulau terluar sejalan dengan visi TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara. Prinsip dari pengamanan pulau terluar yang berada di wilayah perbatasan ialah tetap mempertahankan keberadaan pulau tersebut. Yang penting bagaimana caranya supaya pulau-pulau tersebut tetap terjaga dan tidak hilang baik secara ekonomis, politis dan fisik. Untuk yang pulau terluar yang tidak berpenghuni kita tempatkan pasukan dari Marinir jika pulau tersebut batu karang tidak berpenghuni maka tetap kita jaga yakni dengan menempatkan petugas patroli.²¹⁰ Menurut Kadispenal TNI AL, Tri Prasajo, upaya-upaya pengamanan terhadap pulau-pulau terluar oleh TNI AL selama ini telah ditempuh berbagai hal, antara lain gelar operasi pengamanan pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat udara patroli maritim, melaksanakan survey hidrografi untuk menetapkan batas wilayah negara di laut, operasi bakti surya bhaskara jaya sebagai wujud kepedulian dan peran TNI AL dalam mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, serta menempatkan pasukan marinir di pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni.²¹¹ Selain itu dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas pos pemantau TNI AL yang ada di pulau-pulau terluar. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :²¹²

- a. **Deteksi.** Deteksi dilaksanakan untuk menemukan obyek di laut dan udara di atasnya yang tidak dikenal atau dicurigai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.
- b. **Pengenalan / Identifikasi.** Pengenalan dilaksanakan untuk meng-identifikasi objek yang tidak dikenal atau dicurigai.
- c. **Penilaian.** Penilaian dilaksanakan untuk menentukan nilai informasi serta tingkat kepentingannya dipandang baik dari aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan.

²¹⁰ Lihat dalam *Tni AD dan AL Jaga Pulau Terluar*, dalam <http://antarajawabarat.com/>, Rabu, 26 Jan 2011.

²¹¹ Lihat dalam *TNI AL akan Tingkatkan Pengamanan Pulau Terluar dan Perairan Perbatasan dengan Negara Tetangga*, dalam www.tni.mil.id tanggal 24 Januari 2011.

²¹² Wawancara dengan Dan Posal Tokong Hiu (Iyu Kecil), Lettu Laut (P) Edvan, 29 April 2011, 11:23:16

- d. **Penerusan.** Penerusan informasi yang bersifat khusus perlu penanganan lebih lanjut secara cepat dan tepat.
- e. **Penindakan.** Penindakan dilaksanakan bagi pelanggar dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penindakan penghancuran dilaksanakan atas perintah Panglima Komando Armada Kawasan dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- f. **Komando.** Komando dilakukan untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai tindakan yang dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya.

Pulau-pulau kecil terluar merupakan *base point* batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga, keberadaan pulau-pulau terluar tersebut apabila tidak diberi perhatian secara khusus dapat berpotensi konflik dan akan mengganggu Ketahanan Nasional, sehingga eksistensinya perlu dipertahankan karena merupakan wujud dari kedaulatan negara. Kurang tepatnya pengelolaan yang dilakukan menimbulkan kerawanan akan hilangnya pulau-pulau tersebut seperti yang sudah pernah terjadi. Untuk itu perhatian yang khusus dan intens sangat diperlukan dalam pengelolaan pulau-pulau terluar bukan hanya kepada pulaunya saja tetapi juga perlu perhatian khusus terhadap personil yang menjaga pulau tersebut salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan personil yang melaksanakan pengamanan di pulau-pulau terluar lebih dari personil yang lain yang tidak bertugas disana.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai macam kekayaan alamnya dan terletak di wilayah yang sangat strategis, baik dari sisi ekonomi, politik dan keamanan, Indonesia memiliki keunggulan alamiah yang tidak dimiliki negara lain, sehingga menjadi perhatian banyak negara. Namun, hal tersebut membuat Negara Indonesia merasa bangga saja dengan keunggulan itu karena dibaliknya ada kerawanan-kerawanan yang mengancam. Sejarah telah membuktikan tentang ketertarikan pihak lain terhadap keunggulan yang dimiliki Indonesia, dengan melakukan penguasaan terhadap wilayah bangsa ini selama berabad-abad guna mengambil sumber daya yang dimiliki, sehingga perlu

kekuatan pertahanan yang tangguh guna mengatasi, mencegah/menangkal berbagai gangguan dan ancaman dari pihak lain. Namun, yang menjadi permasalahan utamanya adalah sudahkah segenap masyarakat dan komponen sipil mempunyai visi atau pandangan yang sama terhadap pertahanan (yang merupakan komponen integral dari keamanan), dan sudahkah melibatkan seluruh komponen tersebut didalam perumusan rencana dan pelaksanaannya. Karena kenyataannya banyak sekali komponen bangsa ini yang belum mengetahui mengenai pertahanan itu sendiri, terutama dari sebagian besar kalangan sipil. Sehingga, menurut Chalis Wahyono, *Analisis Madya Dephan RI, tidak heran bila pembangunan sistem pertahanan kita sampai saat ini bagai pasien kronis, tanpa adanya dukungan yang paripurna, karena ketidaktahuan terhadap pemahaman pertahanan.*²¹³ Sistem pembangunan yang tidak terintegrasi satu sama lainnya menjadi katalis yang memperburuk situasi, bila diperhatikan dengan seksama, dengan mudah dilihat bagaimana kinerja sebagian besar komponen pemerintah yang melakukan perencanaan dengan berjalan sendiri-sendiri dan menurut versi masing-masing kementerian/departemennya dalam pengelolaan pulau-pulau terluar. Karena untuk membangun sistem pertahanan yang baik, harus memiliki perencanaan yang sangat baik dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam suatu negara dan berjalan seiring dengan pembangunan sektor lainnya. Menurut Chalis, *bila kita berbicara tentang pertahanan, maka didalamnya secara sederhana dapat diartikan sebagai cara bertahan dan cara menangkal terhadap kemungkinan adanya gangguan atau hambatan, bahaya atau ancaman (pencurian, pemaksaan kehendak/pengaruh, bencana, dll) yang akan terjadi di lingkungan kita dengan menggunakan segala potensi yang kita miliki.*

Dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar sebagai potensi pertahanan tentunya tidak terlepas dari seberapa besar pengetahuan untuk mengetahui bagaimana sistem pertahanan yang baik, selanjutnya seberapa banyak alokasi dana yang dimiliki untuk membangun sistem itu, dan sudahkah semuanya mempunyai kesamaan pandangan dan dukungan terhadap sistem yang akan

²¹³Lihat dalam *Kedaulatan Wilayah dan Kapabilitas Pertahanan Indonesia*, dalam Jurnal Yudhagama, volume 31 No. 1, Maret 2011

dikembangkan di tempat tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan konflik dikemudian hari terhadap sistem yang diterapkan. Sudahkan terbangun komunikasi yang baik dan konstruktif para stake-holder yang ada di lingkungan sekitar, guna mendukung ide pelaksanaan sistem pertahanan di lingkungannya sehingga masyarakat pun akan mendukung upaya pembangunan pertahanan. Karena seberapa bagus pun suatu sistem yang dikembangkan bila tidak mendapatkan dukungan seluruh komponen masyarakat dan stake-holder, maka hal ini akan menjadi kesia-siaan belaka, misalnya mereka mungkin saja akhirnya mendukung upaya kita karena sistemnya bagus, namun mereka merasa enggan untuk melaksanakan pengembangan dan merawatnya karena mereka tidak merasa dilibatkan sejak awal terhadap perencanaannya.

Dalam Lampiran poin 4, Peraturan Presiden (Perppres) No. 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Keamanan Nasional Indonesia dirumuskan sebagai suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹⁴ Cakupan konsep keamanan nasional Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia terdiri dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Secara umum pengertian keamanan nasional mencakup hal-hal yang berkaitan dengan jaminan terselenggaranya kepentingan utama nasional (*national vital interest*) dan stabilitas nasional.²¹⁵ Secara garis besar, keamanan kepentingan utama nasional meliputi keamanan wilayah, penduduk, nilai-nilai bangsa, sumberdaya alam dan buatan. Selanjutnya menurut Wahyono, keamanan nasional mempunyai fungsi-fungsi utama, yaitu pertahanan negara, keamanan dalam negeri atau *internal security* yang juga dapat mencakup penegakan kedaulatan selain penegakan hukum dan ketertiban (*law and order*), keamanan publik yang berkaitan dengan keamanan umum dalam kehidupan masyarakat dan *human security*.

²¹⁴ Lihat dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pada lampiran tentang Landasan Pertahanan Negara, poin kelima, dapat didownload di http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PERPPRES/PERPPRES_2008_7_KEBIJAKAN%20UMUM%20PERTAHANAN%20NEGARA.pdf.

²¹⁵ Wahyono S.K, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta, Teraju, Edisi Revisi, April 2009.

Dengan adanya pengamanan di pulau-pulau terluar dan digunakan sebagai wilayah pertahanan dengan menempatkan personil yang sesuai dengan kondisi wilayah sekitar pulau yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai, maka apabila terdapat tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perairan sekitar pulau akan dapat dengan cepat diatasi. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran batas wilayah oleh negara lain akan dengan cepat terpantau dan dapat dilakukan tindak pencegahan ataupun dapat melakukan pengusiran dengan cepat karena sudah memasuki wilayah NKRI. Namun bila dilihat dari jumlah personil dan sarana yang ada (Tabel 5.1) maka, pengamanan pulau-pulau terluar sampai saat ini masih dirasakan kurang memadai.

Pulau	Satgas Pam Marinir	Personil Pos AL	Non Militer	Sarana Patroli
Berhala	34 Personil	Tidak ada	2 Personil	Perahu karet
Batu Mandi	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Iyu Kecil	Tidak Ada	5 Personil	5 Personil	Perahu pancung
Karimun Kecil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Nipa	64 Personil	5 Personil	Tidak Ada	Perahu karet
Palompong	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Batu Berhanti	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Nongsa	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Tabel 5.1 Rekapitulasi personil pengamanan dan sarana di pulau terluar

Sumber : Diolah dari hasil penelitian dilapangan dan berdasarkan data Analisa Daerah Operasi dari narasumber.

Dari tabel terlihat bahwa dari delapan pulau, yang sudah dijaga secara efektif hanya 3 pulau, dan itupun tidak dilengkapi dengan kapal patroli yang bisa berlayar dan berpatroli di laut, di wilayah Selat Malaka. Apabila dalam suatu waktu terjadi tindakan ilegal ataupun kegiatan kejahatan di sekitar pulau, maka personil yang berjaga di pulau-pulau tersebut tidak akan mampu

menyelesaikannya, karena tidak tersedianya sarana untuk melakukan kegiatan pencegahan.

Untuk mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keamanan dan potensi pertahanan, maka ditempuh beberapa kebijakan, yaitu:²¹⁶

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan laut. Untuk mendukung upaya pengamanan di laut diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Keterbatasan pos pengamanan, khususnya yang berada di pulau-pulau terluar perbatasan di sekitar selat Malaka dan fasilitasnya menjadi kendala bagi efektifnya pengamanan wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu perlu ditingkatkan penyediaan fasilitas pengamanan laut, seperti pos penjagaan TNI AL/Marinir di wilayah-wilayah strategis, seperti Pulau Nipa dan Pulau Berhala, dilengkapi dengan kapal patroli dengan peralatan navigasi yang canggih, adanya alat komunikasi yang memadai dan bila perlu dilengkapi dengan pesawatintai maritim.
- b. Upaya peningkatan personel pengamanan terbatas di wilayah-wilayah strategis di perbatasan laut. Pengamanan perbatasan laut di wilayah nusantara memerlukan gelar pasukan yang proporsional. Luasnya bentang perbatasan laut dan persoalan yang dihadapi selama ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Untuk merealisasikan operasi ini maka dukungan peningkatan anggaran militer menjadi penting dalam rangka meningkatkan kemampuan alat utama sistem persenjataan TNI guna mendukung pengamanan perbatasan negara.
- c. Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga. Sebagai negara maritim dan negara kepulauan dengan segala kompleksitasnya yang dihadapi, rasanya sulit untuk menghadapi dan menangani kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas negara secara unilateral. Karena dimensi pelaku dan

²¹⁶ Makalah BNPP, *Peran dan Kebijakan BNPP dalam Pengelolaan Batas Laut*, Rakor Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07 April 2011

sasaran dari kejahatan ini adalah bersifat lintas negara. Kegiatan ilegal lintas batas yang sering terjadi di kawasan perbatasan laut adalah human trafficking, smuggling, illegal trading, illegal fishing, sea piracy dan sebagainya. Untuk menangani masalah ini perlu dilakukan kerjasama yang melibatkan aparat keamanan, baik militer maupun polisi, antara negara yang berbatasan. Kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan antara lain adalah patroli bersama pengamanan perbatasan laut, tukar-menukar informasi intelijen dan sebagainya.

5.3 Partisipasi Masyarakat untuk Kepentingan Ekonomi.

Persoalan wilayah perbatasan bisa jadi sudah identik dengan aspek pertahanan. Namun saat ini persoalan di wilayah terluar juga melibatkan aspek ekonomi. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpusat disini adalah bahwa adanya peran serta masyarakat dalam memanfaatkan pulau-pulau tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mereka maupun digunakannya sumberdaya yang ada di pulau-pulau tersebut untuk mendukung kegiatan masyarakat tersebut. Sekretaris Komisi I DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution mengungkapkan, *pemerintah jangan hanya terkonsentrasi pada sektor keamanan dalam pengelolaan pulau terluar. Pengelolaan sektor pariwisata dapat mendorong peningkatan perekonomian di pulau terluar tersebut. Peningkatan perekonomian dapat mendorong Warga maupun aparat keamanan tinggal di pulau terluar.*²¹⁷

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan untuk menangani persoalan perbatasan negara, bukan hanya berfokus kepada aspek pertahanan semata. Persoalan ekonomi di wilayah tersebut juga perlu digarisbawahi. Lebih lanjut dikatakan bahwa *persoalan perbatasan tidak hanya soal pertahanan saja. Disparitas ekonomi wilayah itu juga tidak boleh dilupakan. Begitu juga dengan*

²¹⁷Lihat dalam *Proyek pembangunan infrastruktur pulau terluar Kepri*, dalam <http://www.batamfm.com>, Kamis, 27 Januari 2011 - 15:35.

*transnasional crime. Selama ini kita telah mulai mengelola pulau-pulau terluar. Menkopolkam Djoko Suyanto juga mengatakan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau terluar mendapat prioritas. Pulau yang menjadi prioritas utama adalah yang bersinggungan langsung dengan batas negara lain. Pulau-pulau yang berada terluar didahulukan pengelolaannya. Biar memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai pertahanan. Sedangkan yang tidak berhubungan langsung seperti pulau yang berkaitan jauh dengan Afrika misalnya, menjadi prioritas kedua.*²¹⁸ Demikian juga Din Syamsudin berpendapat bahwa mendukung Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan, melalui pendekatan kesejahteraan dengan mempercepat pembangunan sektor perekonomian. Daerah perbatasan membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang, bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mempermudah dan mengontrol wilayah NKRI.²¹⁹

Indonesia pernah dikejutkan dengan dijadikan Pulau Jemur menjadi tujuan wisata sebuah travel perjalanan di Malaysia, yang dijadikan tujuan wisata bahari.²²⁰ Padahal, lokasi Pulau Jemur berada pada lokasi terdalam dari Pulau Batamandi yang merupakan pulau terluar NKRI. Ini menunjukkan bahwa pihak lain dalam hal ini Malaysia masih berusaha untuk melakukan pemanfaatan pulau-pualu terluar Indonesia yang kenyataannya memang berlokasi yang terisolir dan jauh dari pantauan. Sebenarnya ada patroli rutin yang dilakukan oleh petugas navigasi dan petugas TNI AL pangkalan Angkatan Laut Dumai, namun masih tetap dijadikan tujuan wisata. Pulau Jemur dijadikan dan diklaim sebagai daerah tujuan wisata Malaysia karena memiliki potensi keindahan alam. Sementara pemerintah Indonesia belum memanfaatkan Pulau Jemur secara maksimal. Menurut Alex Retraubun, mantan Dirjen kelautan, Peisisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Malaysia menjadikan Pulau Jemur sebagai daerah tujuan wisata, artinya pulau*

²¹⁸Lihat *Persoalan Perbatasan Bukan Hanya Aspek Pertahanan*, dalam http://www.detiknews.com/read/2010/09/01/050342/1432380/10/persoalan_perbatasan_bukan_hanya_aspek_pertahanan, Rabu, 01/09/2010 05:03 WIB

²¹⁹Lihat dalam *Pemerintah Abaikan Penjajaan Teritorial NKRI*, dalam <http://sinarpagine.com/2011/01/pemerintah-abaikan-penjajaan-teritorial-nkri>, 6 Januari 2011.

²²⁰Lihat *Pulau Jemur Diklaim Jadi Obyek Wisata Malaysia*, dalam <http://www.antarane.com/berita/>, Senin, 31 Agustus 2009 17:05 WIB.

*itu memiliki potensi. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah Indonesia kurang memiliki perhatian terhadap pulau-pulau terluar. Kesalahannya adalah bahwa pemerintah kurang memiliki perhatian terhadap pulau-pulau terluar, padahal pulau-pulau terluar tersebut juga memiliki potensi yang luar biasa. Dengan memiliki 92 pulau terluar yang memiliki potensi untuk dikembangkan, walaupun berada dilokasi yang isolasinya sangat tinggi, namun pemerintah harus mengembangkan potensi ekonomi yang ada di pulau terluar dengan membangun infrastruktur dan sarana prasarana pariwisata, seperti resort. Apabila dimanfaatkan, bias menjadi kekuatan ekonomi, masyarakat setempat tambah sejahtera dan PAD bertambah tinggi.*²²¹

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Tantowi Yahya menegaskan bahwa, *wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar itu harus dibangun, wilayah itu harus menjadi jendela Indonesia. Selain warning kepada negara tetangga bahwa itu adalah wilayah kita, juga sekaligus sebagai pintu masuk bagi wisatawan asing yang akan memberikan devisa bagi negara. Wilayah perbatasan kita sangat luas dan pulau-pulau terluar juga sangat banyak, dan itu sumber pemasukan negara jika pemerintah benar-benar serius menanganinya*²²²

Untuk pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Nongsa, Pulau Karimun Kecil, sering digunakan nelayan yang berada di dekat pulau-pulau tersebut, sebagai tempat transit atau berlindung apabila mereka terhalang atau terkendala cuaca buruk dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Pulau Berhala yang dijadikan tempat wisata oleh penduduk lokal, demikian juga Pulau Nongsa, menjadi masukan tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pulau tersebut untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dengan menawarkan jasa yaitu menyewakan perahu-perahu untuk mengantarkan wisatawan menuju pulau yang dijadikan tempat wisata. Selain itu untuk pulau Berhala dan Pulau Karimun

²²¹Lihat dalam *Pemerintah Abaikan Pulau Terluar*, dalam www.detiknews.com, Kamis, 3 September 2009, pukul 12.50 WIB.

²²²Lihat dalam *Diplomasi Harus Dipertajam Setajam Silet*, <http://www.harianpelita.com>, Senin 31 Januari 2011, 22:04

Kecil, dijadikan tempat beristirahat bagi nelayan serta dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan air tawar selama mereka melaksanakan aktivitasnya. Sedangkan untuk Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Palompong, Pulau Batu Berantai, yang merupakan pulau karang yang tidak memiliki sumberdaya yang berasal dari pulau sendiri, hanya dijadikan patokan batas dalam melakukan aktivitas mencari ikan oleh masyarakat sekitar.

Menurut Abdul Rivai Raas, *Variabel ekonomi itu pemberdayaannya tidak semua ada, karena pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Walaupun mempunyai sumberdaya, tapi secara ekonomi tidak dapat diukur. Sumberdaya yang adapun, bukan merupakan sumberdaya yang ada di pulau-pulau yang tidak berpenghuni tersebut, namun sumberdaya yang terdapat disekitar pulau. Jadi yang perlu diberdayakan adalah sumberdaya yang ada disekitar pulau untuk dapat memberdayakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni maka yang dilaksanakan adalah memberdayakan potensi-potensi yang ada, yaitu sumberdaya alam, masyarakat sekitar pulau, pemerintah setempat, untuk dapat memanfaatkan pulau tidak berpenghuni tersebut.*²²³

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan pulau-pulau terluar yang terisolir tidak lepas kaitannya dengan keberadaan investor yang berminat mengelola pulau-pulau tersebut. Namun jaranagnya minat investor menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan potensi ekonomi di pulau-pulau terluar yang sulit dijangkau karena ketiadaan sarana transportasi yang cukup memadai. Menurut Alex Retraubun, *tidak mudah tidak mudah mengundang investor ke tempat-tempat terpencil karena kurangnya fasilitas dan membutuhkan biaya yang besar untuk membangun objek wisata. Maka jika ada investor yang mau mengembangkan pulau di daerah terpencil harus disambut dengan baik. Jarang ada investor Indonesia yang mau membangun objek wisata di daerah terpencil karena tidak mau berlama-lama tinggal di tempat sepi, jauh dari perkotaan. Selain itu objek wisata terpencil harus mempunyai jaringan yang baik untuk*

²²³Wawancara tanggal 21 Mei 2011.

*mendatangkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di objek wisata kepulauan, lingkungan alam sangat terjaga, karena yang dijual adalah keindahan lingkungan di sekitar pulau dan di dalam air. Para investor akan berusaha menjaga lingkungan sekitarnya, dan di beberapa daerah justru bekerjasama dengan penduduk setempat. Untuk itu diperlukan pembahasan secara menyeluruh terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan investasi di pulau-pulau kecil. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan investasi karena lahan di sebuah pulau tidak bisa diperlakukan sama seperti lahan di daratan.*²²⁴

Walaupun Indonesia tidak menghadapi konflik perbatasan yang serius berupa bentrokan bersenjata dengan negara-negara tetangga, namun sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, yang masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum. Bahkan terkadang terjadi sejumlah insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik yang dilakukan oleh pihak sipil seperti nelayan dan pelanggar lintas batas sipil lainnya, sampai kepada aparat pemerintah atau keamanan masing-masing negara. Kondisi yang demikian menjadikan wilayah perbatasan terkendala untuk dapat dikembangkan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada karakteristik wilayah perbatasan yang nota bene seharusnya memiliki intensitas tinggi dalam arus lalu lintas, manusia, barang dan jasa. Karena tanpa adanya kepastian hukum akan batas wilayah masing-masing negara, akan sulit untuk membangun suatu kerjasama antar aparat berwenang pengelola perbatasan. Hal seperti inilah yang kadangkala dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan lintas negara. Yakni dengan memanfaatkan kelemahan kerjasama antar aparat serta adanya *grey area* yang menjadi sengketa perbatasan.

²²⁴Lihat dalam Suara Pembaruan, *Jangan Berlebihan Tangani Investor di Pulau-pulau Kecil*, tanggal 7 Maret 2006

5.4 Peran Pemerintah yang Responsif terhadap Pulau Terluar.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan dikuatkan dengan adanya beberapa payung hukum, yaitu berbagai peraturan perundangan nasional yang terkait dengan pengelolaan perbatasan Negara, antara lain UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional, UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Terluar. Perundang-undangan tersebut mengupayakan percepatan pembangunan terhadap kawasan yang terdapat di sisi terluar dari wilayah negara atau kawasan perbatasan. Namun kalo ditelaah isinya, ternyata belum menyentuh aspek perbatasan laut.

Dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional dijelaskan bahwa RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Tujuan dari undang-undang tentang RPJP Nasional ini adalah 1). Untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik

antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan 5) **Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.**²²⁵

Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *'inward looking'* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolasi dan sulit dijangkau, diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya serta belum banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui perpres No.12 tahun 2010, sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab utama untuk mengelola perbatasan dengan *leading sector* Kementerian Dalam Negeri. Dimana dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan sejumlah instansi pemerintah lainnya seperti; Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan

²²⁵Lihat dalam bagian penjelasan UU nomor 17 tahun 2007.

Hak Asasi Manusia, Keuangan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Kehutanan, bertanggungjawab dalam menjalankan lembaga ini. Bahkan BNPP juga beranggotakan Menteri Koordinator Politik, hukum dan keamanan, serta Menko Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua dari BNPP. Dengan terlibatnya sejumlah kementerian dalam lembaga ini diharapkan tidak menjadikan BNPP sebagai lembaga koordinatif yang justru tidak memiliki kemampuan dalam menggerakkan alur koordinasi dan implementasi kebijakannya. Karena fungsi koordinatif dari BNPP atas sejumlah instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola perbatasan diragukan dapat terimplementasikan dalam tataran operasional. Mengingat terdapatnya berbagai instansi yang selama ini merupakan *stake holder* bidang perbatasan kerap kali kesulitan dalam melakukan koordinasi satu sama lain. Hal ini antara lain diakibatkan oleh tumpang tindihnya penanggungjawab persoalan perbatasan, yang seharusnya dapat di definisikan dan dibagi tanggungjawabnya secara jelas berdasarkan pada ruang lingkup kerja masing-masing instansi.

Menurut Sekretaris BNPP Sutrisno, *peran pemerintah melalui BNPP ini berusaha melakukan penegasan perbatasan dengan cara membangun pulau-pulau terluar, dan ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, terutama di kecamatan terdepan. Kita akan membangun berbagai infrastruktur di sana, tetapi tetap mengacu pada kearifan lokal. Infrastruktur yang akan dibangun BNPP adalah meliputi jalan, pelabuhan, pasar tradisional, penyediaan listrik dan pengembangan ekowisata dan sektor perikanan bagi kawasan perbatasan yang memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga.*

Selanjutnya dijelaskan oleh Gamawan Fauzi selaku ketua BNPP, bahwa *ada 6 (enam) program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BNPP tahun 2011 ini, yaitu:*

(1) *Penegasan batas wilayah negara baik di darat maupun di laut serta peresmian Pos Lintas Batas (PLB) negara. Perundingan dengan negara tetangga, khususnya untuk penetapan batas darat, akan kembali diintensifkan dengan difasilitasi Kementerian Luar Negeri.*

- (2) *Penajaman program dan kegiatan prioritas di masing-masing kecamatan dan pulau-pulau kecil terluar sebagai lokasi prioritas (Lokpri). BNPP bersama Bappenas telah berhasil menetapkan 111 Lokpri untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mulai tahun 2011 – 2014.*
- (3) *Pengintegrasian rencana kebutuhan pengelolaan/pembangunan batas wilayah negara dengan kawasan perbatasan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dalam forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Sesuai kesepakatan dengan Bappenas, bahwa pada Musrenbang Nasional akan dibuka "desk perbatasan" sebagai "clearing house" dokumen perencanaan antar pemangku kepentingan.*
- (4) *Dilibatkannya kalangan dunia usaha (private sectors) untuk mengelola kawasan perbatasan.*
- (5) *Pembangunan pos lintas batas negara, baik yang bersifat internasional maupun tradisional.*
- (6) *Pembangunan berbagai sarana dan prasarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diperbatasan negara mempergunakan anggaran tugas pembantuan BNPP, antara lain meliputi: pembangunan poros penghubung antar desa/kampung dengan jalan utama, pembangunan sarana air bersih dan pembangunan talud penahan gelombang laut di pulau kecil terluar. Disamping itu, juga didukung penyiapan sarana dan prasarana kerja bagi lembaga pengelola perbatasan negara di daerah.*

Namun peran pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan perbatasan, khususnya terhadap pulau-pulau terluar di sekitar selat Malaka, mendapat tanggapan dari anggota DPD RI. Menurut Aida Zulaikha Ismet, *pemberdayaan pulau-pulau terluar diperbatasan khususnya di wilayah batam, pemerintah pusat harus nya melihat apa yang diperlukan daerah dalam mengelola dan membangun perbatasan. Juga adanya ego sektoral yang sangat berlebihan. Perlu dilakukan program-program pengelolaan perbatasan yang efektif dan tepat guna, Pemerintah pusat jangan memukul rata program-program pengelolaan perbatasan, karena masing-masing perbatasan mempunyai*

*karakteristik yang berbeda. Misalnya saja saat ini, semua program pengelolaan perbatasan disamaratakan dalam hal anggaran, padahal perbatasan laut berbeda dengan perbatasan darat. Harus dilihat perbedaan karakteristik tiap-tiap perbatasan. Untuk pengelolaan perbatasan diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan mengesampingkan ego sektoral.*²²⁶

5.5 Aktualisasi Konsepsi Ketahanan Nasional

Posisi Indonesia terletak dipersimpangan jalan politik dan perdagangan dunia, membentang panjang dari Timur ke Barat serta melebar dari Utara ke Selatan. Posisi ini menempatkan Indonesia, secara geopolitik, menjadi penting bagi kawasan regional dan global, serta secara geostrategi, menjadikan Indonesia teramat vital bagi pertahanan negara-negara kawasan dan global untuk mengawal kepentingan nasionalnya masing-masing.

Di sisi Indonesia, geopolitik dituangkan dalam suatu doktrin nasional yang disebut wawasan nusantara dengan politik luar negeri yang bebas aktif, dan geostrategi diwujudkan menjadi suatu konsep ketahanan nasional (kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan). Dengan letak geografis yang sangat spesifik dan terdiri dari beribu pulau, maka dalam menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar dibutuhkan ketahanan nasional yang memadai.

Ketahanan Nasional yang merupakan suatu kondisi yang stabil dari Bangsa Indonesia sehingga dapat selalu bertahan dan menjadikan Bangsa Indonesia dapat melangsungkan kehidupan bernegaranya serta dapat mewujudkan

²²⁶Dialog khusus Batam TV, 27 April 2011 tentang Peran DPD RI dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan.

tujuan nasionalnya yaitu memberikan rasa aman bagi warga negaranya dan memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Bila dikaitkan dengan pendapat Wan Usman bahwa ketahanan Nasional bagi dua sisi mata uang, yaitu sisi kesejahteraan dan keamanan, maka pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau terluar khususnya yang tidak berpenghuni sedapat mungkin dilakukan dengan melihat kedua aspek tersebut. Disamping sebagai tempat pertahanan yang mendukung keamanan wilayah kedaulatan negara juga sedapat mungkin dapat menciptakan dan berdampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar pulau tersebut.

Kedaulatan wilayah Negara Indonesia mulai terusik ketika lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dan masuk dalam wilayah Negara Malaysia. Dengan lepasnya kedua pulau tersebut tidak menutup kemungkinan Negara tetangga ini dan lainnya akan berusaha untuk mendapatkan lebih daripada itu. Kedaulatan atas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai panjang 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, luas perairan sekitar 3.205.908 Km², luas laut teritorial sekitar 300.000 Km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.707.092 Km², panjang garis pantai 81.290 Km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 Km², dapat diganggu oleh negara tetangga apabila tidak dijaga keutuhannya.

Untuk menjaga kedaulatan itu, ditempuh berbagai macam cara, yaitu selain dengan jalur politik dengan diplomasi, militer dengan konsep pertahanannya, maka juga ditempuh dengan mengatualisasikan konsep Ketahanan Nasional Indonesia. Dimana dikatakan bahwa Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar sehingga dapat membuat kehidupan bangsa Indonesia tetap teratur dan stabil.²²⁷ Untuk mewujudkan ini maka ditempuh upaya untuk mencapai tujuan sejahtera dan aman,

²²⁷Wan Usman, *Konsepsi Ketahanan Nasional Sebagai Ilmu Pengetahuan dan Penerapannya Untuk Pembangunan*, makalah dalam round table discussion, Lemhannas, 15 Mei 2008.

karena hakekat dari ketahanan nasional itu sendiri merupakan kesejahteraan dan keamanan yang merupakan dua sisi mata uang.

Selain itu diperlukan penyusunan dan pengembangan pandangan geopolitik wawasan nusantara (*Archipelagic Outlook*) dan implementasinya berupa geostrategi ketahanan nasional (*National Resilience*). Pandangan tersebut secara bertahap terus dikembangkan ke dalam konteks yang lebih luas berupa wawasan regional dan ketahanan regional. Karakteristik geografi dan demografi Indonesia mengisyaratkan bahwa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional juga harus terus ditumbuhkembangkan kepada setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karenanya terus diupayakan peningkatan pemahaman dan implementasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di daerah, terutama di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Namun kendala yang dihadapi apabila dikaitkan dengan pengelolaan pulau-pulau terluar, maka Ketahanan Nasional harus diwujudkan dengan peningkatan kesejahteraan dan keamanan. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola pulau-pulau terluar ditujukan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Namun sampai saat ini memang masih mengalami berbagai kendala yaitu dengan minimnya anggaran untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam masalah pengelolaan pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau terluar di sekitar Selat Malaka, masih belum dilaksanakan di setiap pulau. Hanya Pulau Berhala dan Pulau Nipa yang sudah mendapat perhatian lebih. Hal ini harusnya juga berdampak terhadap meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pulau-pulau tersebut. Namun, dilihat dari letak pulau-pulau terluar yang jauh, maka hanya sedikit yang bisa dirasakan masyarakat sekitar.

Dalam pengaktualisaian Ketahanan Nasional, sudah ditempatkan pos-pos keamanan di pulau-pulau terluar (Pulau Berhala dan Pulau Nipa). Walaupun dengan sarana yang minim, namun diharapkan sudah dapat menunjukkan peran aktif pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Indonesia. Selain itu

ditempuh juga pendekatan ekonomi dengan disusunnya beberapa program oleh BNPP, yaitu:²²⁸

- a. Mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini ditempuh dengan penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga. Pengembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerjasama dengan negara tetangga. Karena itu upaya-upaya kerjasama harus dilakukan dan dipermudah prosedurnya. Disamping itu peran pemerintah daerah juga harus diperluas dalam kerjasama dengan pemerintah lokal pada negara tetangga.
- b. Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi. Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada terutama sumberdaya lokal. Sumberdaya ini berupa sumberdaya manusia dan juga sumberdaya alam. Pembangunan di wilayah ini harus disesuaikan dengan daya dukung alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan kawasan perbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan juga akses menuju pulau-pulau kecil terluar masih dirasakan sangat sulit. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sarana dan prasarana seperti peningkatan sarana dan prasarana perhubungan ldi sepanjang perbatasan laut dan sarana prasaran wilayah lainnya, penyediaan energi listrik, penyediaan sarana telekomunikasi, penannganan pintu-pintu arteri dari pusat pertumbuhan yang dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari karena kondisi alamnya yang sangat indah, membangun dermaga-dermaga kecil di pulau-pulau yang pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang, sehingga kapal mudah untuk bersandar.

²²⁸Data diberikan saat wawancara dengan Asdep Pertahanan Wilayah BNPP, Ir. Rahman Ibrahim pada tanggal 18 Mei 2011 di Gedung BNPP, komplek IPDN lantai 4.

Dengan berbagai usaha tersebut diharapkan dapat tercapainya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan di pulau-pulau yang berdekatan dengan pulau-pulau terluar. Ketahanan nasional dapat diwujudkan apabila unsur keamanan dan kesejahteraan sudah dipenuhi. Ketahanan nasional yang merupakan konsepsi untuk menumbuhkan kemampuan yang dapat membangun kekuatan nasional dan memperkuat posisi negara dalam lingkungan pergaulan dunia, melalui cara-cara damai yang menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam hubungan antar negara, dapat dicapai apabila dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan memperhatikan potensi yang ada dan dilakukan dengan secara terus menerus serta tidak lupa memperkuat potensi pertahanan di pulau-pulau terluar tersebut.

5.6 Tabel Rangkuman Pendapat Nara Sumber.

No	Faktor Yang Diamati	Jenis Data	Sumber Data	Pendapat Nara Sumber
1.	Strategi Pembangunan Wilayah	Primer dan Sekunder, dengan wawancara dan observasi literatur	Kemenhan, Asdep BNPP, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pulau-pulau, tidak bisa dibebankan hanya pada kementerian pertahanan, harus dilakukan secara lintas departemen. Pembangunan harus terkoordinasi dengan rapi dan baik serta menjadi prioritas. - Pembangunan daerah perbatasan memerlukan simpul yang mampu secara efektif mengintegrasikan kebijakan dan implementasi di lapangan - Pengelolaan wilayah pulau terluar, pulau-pulau tersebut harus mempunyai infrastruktur yang kuat. Pengembangan ekonomi kawasan di pulau-pulau terluar sangat diperlukan dan harus segera. Pemerintah pusat harus segera merealisasikan proyek pembangunan pulau terdepan tersebut, karena dinilai penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. - Pembangunan infrastruktur, dapat membantu pemerintah daerah dan aparat keamanan mempertahankan

				pulau terdepan yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Dikarenakan pulau terdepan rentan diklaim negara asing, karena itu harus mendapat perhatian pemerintah daerah dan pusat, meski pulau tersebut berukuran kecil.
2.	Pemberdayaan Ruang Negara sebagai Potensi Pertahanan.	Primer dan sekunder diperoleh dari wawancara dan observasi literatur	Asdep BNPP, Anggota DPD RI, Ketua DPRD Kepri, Mabes TNI AL, Dansatgas PAM Pulau Terluar	<ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan pulau-pulau terluar harus dapat dijaga 24 jam secara terus menerus. - Untuk pengamanan oleh pihak TNI, dirasakan masih kurang. Hal ini dikarenakan pengamanan oleh pihak TNI tidak didukung dengan kapal dan pesawat yang memadai, kondisinya menyedihkan, infrastruktur yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan - Apabila akan didukung adanya kapal patroli, harus juga didukung sarana operasionalnya, yaitu kebutuhan bahan bakarnya juga bagaimana merawat peralatannya. - Upaya-upaya pengamanan terhadap pulau-pulau terluar oleh TNI AL selama ini telah ditempuh berbagai hal, antara lain gelar operasi pengamanan pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat udara patroli maritim, melaksanakan survey hidrografi untuk menetapkan batas wilayah negara di laut, operasi bakti Surya Bhaskara Jaya sebagai wujud kepedulian dan peran TNI AL dalam mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, serta menempatkan pasukan marinir di pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni
3.	Partisipasi Masyarakat untuk Kepentingan Ekonomi	Primer dan sekunder	Komisi I DPRD Kepri, Kemenhan, Kemenpolhuk an, Dosen Pembimbing, Komisi I DPR.	<ul style="list-style-type: none"> - pemerintah jangan hanya terkonsentrasi pada sektor keamanan dalam pengelolaan pulau terluar. Peningkatan perekonomian dapat mendorong warga maupun aparat keamanan tinggal di pulau terluar. - Untuk menangani persoalan

				<p>perbatasan negara, bukan hanya berkebutan kepada aspek pertahanan semata. Persoalan ekonomi di wilayah tersebut juga perlu digarisbawahi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulau-pulau yang berada terluar didahulukan pengelolaannya. Biar memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai pertahanan. - Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar itu harus dibangun. Selain warning kepada negara tetangga, juga sekaligus sebagai pintu masuk bagi wisatawan asing yang akan memberikan devisa bagi negara. - Variabel ekonomi itu pemberdayaannya tidak semua ada, karena pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Walaupun mempunyai sumberdaya, tapi secara ekonomi tidak dapat diukur. Sumberdaya yang adapun, bukan merupakan sumberdaya yang ada di pulau-pulau yang tidak berpenghuni tersebut, namun sumberdaya yang terdapat disekitar pulau. Jadi yang perlu diberdayakan adalah sumberdaya yang ada disekitar pulau untuk dapat memberdayakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni maka yang dilaksanakan adalah memberdayakan potensi-potensi yang ada, yaitu sumberdaya alam, masyarakat sekitar pulau, pemerintah setempat, untuk dapat memanfaatkan pulau tidak berpenghuni tersebut.
4.	Peran Pemerintah yang Responsif terhadap Pulau terluar	Sekunder diperoleh dari observasi situs dan berbagai literatur	Ketua BNPP, Sekretaris BNPP, Anggota DPD RI	<ul style="list-style-type: none"> - peran pemerintah melalui BNPP berusaha melakukan penegasan perbatasan dengan cara membangun pulau-pulau terluar, dan ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, terutama di kecamatan terdepan. Infrastruktur yang akan dibangun BNPP adalah meliputi jalan, pelabuhan, pasar tradisional, penyediaan listrik dan pengembangan ekowisata dan sektor

				<p>perikanan bagi kawasan perbatasan yang memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan berbagai sarana dan prasarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diperbatasan negara mempergunakan anggaran tugas pembantuan BNPP, antara lain meliputi: pembangunan poros penghubung antar desa/kampung dengan jalan utama, pembangunan sarana air bersih dan pembangunan talud penahan gelombang laut di pulau kecil terluar. Disamping itu, juga didukung penyiapan sarana dan prasarana kerja bagi lembaga pengelola perbatasan negara di daerah. - pemberdayaan pulau-pulau terluar diperbatasan, pemerintah pusat harusnya melihat apa yang diperlukan daerah dalam mengelola dan membangun perbatasan. Perlu dilakukan program-program pengelolaan perbatasan yang efektif dan tepat guna, Pemerintah pusat jangan memukul rata program-program pengelolaan perbatasan, karena masing-masing perbatasan mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbatasan laut berbeda dengan perbatasan darat. Harus dilihat perbedaan karakteristik tiap-tiap perbatasan. Untuk pengelolaan perbatasan diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan mengesampingkan ego sektoral.
5.	Aktualisasi Konsepsi Ketahanan Nasional	Sekunder diperoleh dari observasi literatur	BNPP, Wan Usman	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan Nasional bagai dua sisi mata uang, yaitu sisi kesejahteraan dan keamanan, maka pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau terluar khususnya yang tidak berpenghuni sedapat mungkin dilakukan dengan melihat kedua aspek tersebut. Disamping sebagai tempat pertahanan yang mendukung keamanan wilayah kedaulatan

				<p>negara juga sedapat mungkin dapat menciptakan dan berdampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar pulau tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup - Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi. - Peningkatan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar.
--	--	--	--	---

Tabel 5.2. Rangkuman Pendapat Nara Sumber.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.

6.1.1 Dari gambaran kondisi fisik pulau dengan melihat sumberdaya alam yang ada maupun potensi dari masing-masing pulau, apabila tanpa melalui proses lanjutan seperti reklamasi dan sebagainya maka Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Palompong dan Pulau Batu Berhanti adalah pulau yang tidak berpenghuni yang tidak dapat didayagunakan dalam konteks ekonomi, tetapi dapat didayagunakan dalam konteks politik ataupun konteks pertahanan dan keamanan. Pulau Berhala, Pulau Nipa, dan Pulau Nongsa adalah pulau yang dapat didayagunakan dalam konteks ekonomi, tetapi pulau-pulau ini juga dapat mendukung dalam hal pertahanan. Pulau-pulau ini dapat dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata ataupun potensi ekonomi yang lain. Khusus untuk pulau Nipa sebagai *pilot project* sudah didatangkan investor yang akan melakukan pengelolaan yang nantinya akan digunakan sebagai pangkalan pengisian miyak bagi kapal-kapal yang lego jangkar di sekitar Pulau Nipa. Pulau-pulau terluar itu semua adalah merupakan pulau yang dijadikan patokan dalam menentukan batas wilayah RI. Oleh karena itu pulau-pulau ini harus dipelihara kesinambungannya. Meskipun pulau-pulau terluar ini ada yang tenggelam pada saat pasang, namun dengan kondisi historis dan setelah didaftarkan kepada PBB, tidak akan hilang dan tidak mempengaruhi simbol-simbol kedaulatan. Setelah dievaluasi, dari kedelapan pulau terluar ini, terdapat 3 pulau yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi ekonomi namun secara keamanan semua pulau. Dari kedelapan pulau, terdapat satu pulau yang mempunyai potensi konflik yaitu pulau berhala, namun ketujuh pulau lainnya tidak mempunyai masalah yang besar karena masih dalam wilayah teritorial indonesia yang sudah cukup kuat.

6.1.2 Pulau-pulau kecil terluar sangat vital dalam penentuan batas wilayah Indonesia yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara Indonesia. Pulau terluar masih belum diberdayakan secara maksimal. Dilihat dari sedikitnya fasilitas yang terdapat di pulau tersebut. Aksebilitas yang masih sulit dan lokasi yang jauh menjadi kendala dalam pemberdayaan ekonomi di pulau-pulau terluar tersebut. Dikarenakan pulau-pulau terluar memiliki daratan yang tidak begitu luas, maka dalam pemberdayaan tersebut menjadi kendala juga. Upaya untuk mewujudkan kehadiran secara fisik dan pengelolaan terkendala dengan kondisi alamnya yang tidak layak huni dikarenakan tidak terdapatnya kandungan sumber daya air tawar serta ruang hidup yang tidak cukup.

6.1.3 Dalam hal pertahanan dan keamanan, masih kurangnya sarana pertahanan pendukung. Jumlah personil penjaga perbatasan di pulau terluar dirasakan masih kurang. Dengan tidak terdapatnya fasilitas kapal patroli di pulau tersebut, maka akan terasa penjagaan pulau hanya sebagai pengawas kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Malaka. Sementara patroli kapal perang Singapura dilaksanakan setiap hari dengan menggunakan 3 kapal perang.

6.1.4 Peran pemerintah pusat maupun daerah walaupun sudah dilaksanakan dengan upaya maksimal, masih dirasa kurang. Hal ini berdasarkan penjelasan nara sumber yang berada langsung di pulau-pulau terluar dan hanya melihat bahwa perhatian pemerintah hanya melaksanakan pendataan pulau, dan belum menyentuh pemberdayaan pulau baik ekonomi, politik maupun hankam secara maksimal.

6.2 Saran

6.2.1 Pulau-pulau terluar yang berada diperbatasan harus dikelola secara terpadu dalam satu badan yang memiliki otoritas khusus (BNPP), sehingga pembangunan pulau-pulau terluar yang berada wilayah perbatasan dapat

direncanakan secara terintegrasi antar berbagai bidang secara komprehensif dalam suatu master plan. Selain itu harus mempercepat pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional serta membangun satuan TNI yang cukup untuk dipadukan dengan kekuatan nir-militer setempat dalam rangka menjaga wilayah perbatasan dari segala bentuk ancaman.

6.2.2 Untuk pengamanan pulau-pulau terluar, agar dilengkapi dengan sarana yang lebih baik. Penyediaan teropong pantau yang menggunakan inframerah sangat diperlukan dalam rangka mengamati kejadian di wilayah perairan sekitar pulau pada malam hari. Selain itu keberadaan kapal patroli di pulau-pulau yang sudah memiliki dermaga sangat diperlukan sebagai efek penggentar bagi pelaku tindak kejahatan yang akan berbuat kejahatan di wilayah kedaulatan Indonesia dan juga sebagai penggentar bagi negara lain yang berusaha memasuki wilayah perairan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.2.3 Meningkatkan semangat kebangsaan masyarakat di sekitar pulau-pulau terluar perbatasan dengan meningkatkan taraf kehidupan ke tingkat yang lebih baik dan meningkatkan kehadiran pemerintah agar mereka merasa lebih dekat dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Mustafa, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*, Jakarta, Kompas, 2006.
- Agoes, Etty R, *Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara dalam Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis UI Ke 53*, Jakarta, FHUI, 2003.
- Amirsyah Sahl, *Metodologi Penelitian*, Materi Perkuliahan, PKN Universitas Indonesia, 2009
- Aziz, J Iwan, et al, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta, PT Gramedia, 2010.
- BPN RI, *Tata Cara Kerja Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011*, Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu, 2010
- Budisantoso, *Peran Ketahanan Nasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta, Lemhanas, 1995.
- Chambers, Robert, *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press, 1995.
- Connie, Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Darmono, Bambang, et al, *Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta, Sekreatariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010
- Ife, Jim, *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*, Australia, Longman, 1995.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma, 2007.
- Kamaludin, L. M, *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*, Malang, UMM, 2005.

- Kartasasmita, Ginanjar, *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah pidato pada Peringatan Hari Jadi ke-28 Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 1996.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Makalah pada sarasehan DPD Golkar Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 1997
- Kartikasari, Wahyuni, *Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut, Kumpulan Karangan*, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1985.
- Lee G. Cordner, *The Spratly Islands Dispute And The Law Of The Sea Ocean Development & International Law*, Journal Ocean Development & International Law, Volume 25, Issue 1, Taylor & Francis, 1994
- Madu, Ludiro, et al, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Mabes TNI AL, *Batas Maritim Indonesia Dan Permasalahannya*, Makalah paparan Wakasal pada rapat dengar pendapat dengan DPD RI, 2010.
- Markas Besar TNI Angkatan Laut, *Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya dan Pokok-Pokok Pikiran TNI Angkatan Laut Tentang Keamanan Di Laut*, Jakarta, Mabes TNI AL, 2002.
- Markas Besar TNI Angkatan Laut, *Pulau-Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Dishidros TNI AL, 2003.
- Markas Besar TNI Angkatan Laut, *Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Jawatan Hidro-Oceanografi TNI AL, 2006
- Midgley, James, *Community Participation, Social Development, And The State*, Methuen & Co.Ltd, 11 New Fetter Lane, London, 1986.
- Nainggolan, Poltak Partogi, *Batas Wilayah Dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta, Tiga Putra Utama, 2004.
- Narayan, Deepa, *Empowerment and Poverty Reduction*, Washington DC, The World Bank, 2002.

- Numberi, Freddy, *Perubahan Iklim, Implikasinya Terhadap Kehidupan Di Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta, Fortuna, 2009.
- Pranaka, AMW, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS, 2002.
- Prasetyono, Teo Tri, *Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terluar Indonesia*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009
- Ras, Abdul Rivai, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik, Sudut Pandang Indonesia*, Jakarta, APSINDO, 2001.
- Rappaport, J, *Studies in Empowerment: Introducing to the Issue, Prevention In Human Issue*, USA, 1987.
- Rustandi, E, et al, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, edisi pertama, Jakarta, Yayasan Obor Indoensia, 2009
- Soetaryono, R, *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, 1998.
- Sugiharto, *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*, Medan, USU Press, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2011
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- Suharto, Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung, Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997.
- Sumarsono, S, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sunardi, RM, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, Jakarta, PT Kuarternita Adidarma, 2004.
- Sunit Agus dan Sri Whayuni, *Integrasi Pelayanan Sosial Sebagai Upaya Pemberdayaan Penduduk Miskin di Pedalaman Pesisir*, Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2008.

- Supeno, Imam Budi, *Arti Penting Selat Malaka dan Selat Philip Bagi Indonesia*, Jakarta, Jagratara, 2009
- Supriyatno, Budi, *Manajemen Tata Ruang*, Tangerang, CV. Media Berlian, 2009
- Suyatno, *Globalisasi, Perbatasan Indonesia-Malaysia Dan Local Governance*, dalam *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Tan, Mely G, *Perempuan dan Pemberdayaan dalam Kumpulan Karangan tentang Perempuan*, Program Studi Kajian Wanita, Pascasarjana UI, 1997.
- Tarigan, R, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pangkajian Ketahanan Nasional UI, 2003.
- Wan Usmam, *Konsepsi Ketahanan Nasional Sebagai Ilmu Pengetahuan dan Penerapannya Untuk Pembangunan*, makalah dalam round table discussion, Lemhannas, 15 Mei 2008.
- Wahyono S.K, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta, Teraju, 2009.
- Wahyono, *Geopolitik Dan Geostrategis RI Untuk PJPT II Dalam Rangka Implementasi Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional*, Kertas Karya Perorangan, Lemhanas, 1991.
- Wiranto, Tatag, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*, Makalah pada Sosialisai Nasional Program MFCDP, September, 2004.
- Worosuprodjo, Suratman, *Mengelola Potensi Geografi Indonesia Untuk Pembangunan Wilayah Berkelanjutan* dalam Sugiharto, *Pembangunan Wilayah Berwawasan Lingkungan dan Kebencanaan*, Medan, USU Press, 2007.

Undang-Undang, PP, Perpres, Keppres

United Nations Convention on the Law of the Sea 82 (UNCLOS 82)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2004-2009
- Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan antara Malaysia dan Indonesia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

Internet:

Andi Iqbal Burhanuddin, *Ambalat dan Pemberdayaan Pulau Perbatasan*, <http://kendariekspres.com>, Rabu 10 juni 2009.

Badriah dan Wiguna, *Presiden Canangkan Pemberdayaan Pulau Kecil terluar*, dalam tempo interaktif tanggal 17 November 2006, diunduh dari <http://www.tempointeraktif.com>.

Jahi, Amri, *Pemberdayaan: Dari Teori Ke Praktek*, diunduh dari Eeqbal.blogspot.com hari Jumat, tanggal 27 Maret 2009.

Kurniawan, Tri, *Perlu Ada Operasi Pengawasan Laut di Perbatasan RI*, Senin, 23 Agustus 2010 - 17:17 wib, dalam <http://news.okezone.com/>

Martadiningrat, Y Solichien, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*, 8 December, 2009, 11:57, <http://www.yussufsolichien.com>.

Mulyawan, Iwan, *Konsep Wilayah dan Pusat Pertumbuhan Pengembangan Wilayah*, <http://moeljawan.blogspot.com/2010/03/konsep-wilayah-dan-pusat-pertumbuhan.html>.

Rusdi, Siswanto, *Catatan Kecil Hari Nusantara*, diunduh dari www.kompas.com hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010.

Saifullah, Muhammad, *12 Pulau Terluar Indonesia Rawan Picu Konflik* <http://news.okezone.com>, , diunduh dari [okezone.com](http://news.okezone.com) hari Selasa, 29 Desember 2009.

Sismarni, *Teori Partisipasi Dalam Dinamika Sosial*, <http://Ippbi-fiba.blogspot.com/2008/03>.

Suburi, Juni, *Konsepsi Bela Negara Dan Ancaman Keutuhan Wilayah Kedaultan RI*, dalam <http://belanegarari.wordpress.com>, 22 April 2009.

Sudarmadji, *Pembanguna Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*, Publishet June 04, 2008 dalam <http://geo.ugm.ac.id>.

<http://aj-belajar.blogspot.com/2011/02/defenisi-partisipasi-masyarakat.html>.

<http://antarajawabarat.com/>, *TNI AD dan AL Jaga Pulau Terluar*, Rabu, 26 Januari 2011.

<http://banjarmasin.tribunnews.com>, Sabtu, 1 Mei 2010

<http://buletin.penataanruang.net/> edisi Januari-Februari 2009, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Uninhabited_islands

<http://geomatika.its.ac.id/archives/pulau-pulau-terluar-dan-batas-nkri/>, published 18 Januari 2006.

<http://id.berita.yahoo.com/paskalis-kossay-bangun-fasilitas-di-pulau-terdepan-20110225-190600-329.html>.

<http://jeperis.wordpress.com/2009/02/05/desain-penelitian-kualitatif/>

<http://my.opera.com/andikosutanmancayo/blog/2006/12/07illegal-logging>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/02/23/0565795/> Perpres Pengelolaan Daerah Perbatasan Akhirnya Terbit, Selasa, 23 Februari 2010.

<http://perpustakaan.bappenas.go.id>, *Ribuan Pulau di Indonesia Akan Tenggelam*, 15 Oktober 2002.

<http://serdangbedagaikab.go.id>

<http://sinarpaginews.com/2011/01> pemerintah-abaikan-penjajaan-teritorial-nkri, 6 Januari 2011.

<http://strahan.dephan.go.id/ditjakstra/doktrin.pdf>

<http://www.antaraneews.com/berita/1263016581/dephan-ambil-pendekatan-nonmiliter-di-pulau-terluar>, Sabtu, 9 Januari 2010.

<http://www.antaraneews.com/berita/>, *Pulau Jemur Diklaim Jadi Obyek Wisata Malaysia*, Senin, 31 Agustus 2009

<http://www.babylon.com/definition/Uninhabited>

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/11/time/131632/idnews/865313/idkanal/10>.

<http://www.detiknews.com/read/2010/09/01/050342/1432380/10/persoalan-perbatasan-bukan-hanya-aspek-pertahanan>, Rabu, 01/09/2010

<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=9037>

<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7237>, *Pengamanan Pulau Terluar RI Butuh Dana Rp. 3 Triliun*.

<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=6945>

<http://www.dkp.go.id/archives/c/34/1822/dkp-bertekad-mengembangkan-pulau-terluar/>

<http://www.harianpelita.com>, *Diplomasi Harus Dipertajam Setajam Silet*, Senin 31 Januari 2011

<http://www.perpustakaan.lapan.go.id/jurnal>.

http://www.surya.co.id/berita_terkini/92-pulau-di-indonesia-teracam-hilang.html

<http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T73T3AT9SDTSANNIM>, *Ribuan Pulau di Indonesia Akan Tenggelam*, 8 Oktober 2008.

www.antara-sumbar.com, Rabu, 27 Mei 2009

www.batamfm.com/event.php?id=7447, Proyek pembangunan infrastruktur pulau terluar Kepri, Kamis, 27 Januari 2011, 15:35

www.dephub.go.id/files/media/file/transmedia/MASTER_FINAL%20Edisi%201.pdf

www.deplu.go.id/pages/News.aspx?IDP=38&I=id, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2003

www.detiknews.com, *TNI AL Janji Tak Ada Pulau Milik RI Yang Hilang Lagi*, Rabu, 12/01/2011

[www.detiknews.com / read / 2010 / 02 / 18 / 220757 / 1302455 / 10 / Amankan Pulau Terluar Polri Akan Bentuk Border Management](http://www.detiknews.com/read/2010/02/18/220757/1302455/10/AmankanPulauTerluarPolriAkanBentukBorderManagement).

www.detiknews.com, *Pemerintah Abaikan Pulau Terluar*, Kamis, 3 September 2009

www.garisdepannusantara.org.

www.goblue.or.id/pemerintah-dorong-investasi-pulau-kecil

www.jurnas.com/news/2386/Kemenhan_Inventarisasi_Pulau_Terluar_/434

www.karangasemproperty.com

www.koraninternet.com, *Pemerintah Harus Tunjukkan Jaga Pulau Terluar*, Rabu, 27 Mei 2009.

[www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=a6jI1zR6t\(Y%3D...59...](http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=a6jI1zR6t(Y%3D...59...)

www.privateislandsonline.com

www.tandef.net, *12 Pulau Terluar Rentan Diambil Negara Asing.*

www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/10/10/brk,20101010-283648.id.html.

www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/10/02/brk,20101002-282031.id.html .

www.tni.mil.id, *TNI AL akan Tingkatkan Pengamanan Pulau Terluar dan Perairan Perbatasan dengan Negara Tetangga*, 24 Januari 2011

Jurnal, Majalah, Media Televisi dan Media Surat Kabar

Batam TV, Dialog khusus, *Peran DPD RI Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan*, 27 April 2011

Forum Hukum, *Hubungan Antara Penegakan Hukum Di Laut Dan Ketahanan Nasional*, vol 4 No. 4-07, Jakarta, Diskumal Cilangkap, 2007.

Investor Daily, *Peringatan Hari Nusantara ke-11 Tahun 2010: Peran Transportasi Laut Dalam Perwujudan Wawasan Nusantara*, Senin 13 Desember 2010.

Jurnal Yudhagama, *Kedaulatan Wilayah dan Kapabilitas Pertahanan Indonesia*, volume 31 No. 1, maret 2011

Kompas, *Ribuan Pulau di Indonesia Akan Tenggelam* Selasa, 15 Oktober 2002.

Kompas, *Pihak Asing Kelola 10 Pulau Kecil*, Senin, 13 Maret 2006

Makalah BNPP, *Peran dan Kebijakan BNPP dalam Pengelolaan Batas Laut*, Rakor Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Kepulauan Riau, 7 April 2011

Suara Pembaruan, *Jangan Berlebihan Tangani Investor di Pulau-pulau Kecil*, tanggal 7 Maret 2006.

Tabel 1.1. Daftar Pulau Indonesia yang sudah lepas dari NKRI.

No.	Nama pulau	Perairan	Perbatasan dengan	Penyebab Lepas
1.	Sipadan	Laut Sulawesi	Malaysia	Sengketa kepemilikan, Putusan MI milik Malaysia sejak tahun 2002
2.	Ligitan	Laut Sulawesi	Malaysia	Sengketa kepemilikan, Putusan MI milik Malaysia sejak tahun 2002
3.	Kambing (Atauro)	Selat Wetar	Timor Timur	Menjadi milik Timor Timur semenjak Timor Timur merdeka tahun 1999
4.	Yako	Selat Wetar	Timor Timur	Menjadi milik Timor Timur semenjak Timor Timur merdeka tahun 1999

Sumber: Markas Besar TNI Angkatan Laut, *Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Jawatan Hidro-Oseanografi TNI AL, 2006, hal : 1

Tabel 1.2. Daftar Pulau Indonesia yang hilang secara fisik.

No.	Nama pulau	Kabupaten	Provinsi	Penyebab
1.	Gosong Sanjai	Singkil	N.A.D	Tsunami
2.	Karang Linon Kecil	Singkil	N.A.D	Tsunami
3.	Karang Linon Besar	Singkil	N.A.D	Tsunami
4.	Pusung	Langkat	Sumatera Utara	Abrasi
5.	Mioswekel	Biak Numfor	Papua	Abrasi
6.	Urbinasi	Biak Numfor	Papua	Abrasi
7.	Kiakepo	Jayapura	Papua	Abrasi
8.	Lereh	Karimun	Kepulauan Riau	Tambang Pasir/Abrasi
9.	Terumbu Daun	Karimun	Kepulauan Riau	Tambang Pasir/Abrasi
10.	Tikus	Karimun	Riau	Tambang Pasir/Abrasi
11.	Inggit	Karimun	Riau	Tambang Pasir/Abrasi
12.	Begonjai	Karimun	Riau	Tambang Pasir/Abrasi
13.	Kikis	Kep Mentawai	Sumatera Barat	Abrasi
14.	Sijaujau	Kep Mentawai	Sumatera Barat	Abrasi
15.	Lawandra	Nias	Sumatera Utara	Abrasi
16.	Laut	Selayar	Sulawesi Selatan	Abrasi
17.	Niankin	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	Abrasi
18.	Ubi Besar	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Abrasi
19.	Ubi Kecil	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Abrasi
20.	Nirwana	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Tambang untuk bandara
21.	Dapur	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Abrasi
22.	Payung Kecil	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Abrasi
23.	Ayer Kecil	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Abrasi
24.	Nyamuk Kecil	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Abrasi

Sumber: Freddy Numberi, *Perubahan Iklim: Implikasinya Terhadap Kehidupan Di Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta, Fortuna, 2009, hal: 60 – 62.

Tabel 1.3. Daftar Pulau Terluar Indonesia beserta Titik Koordinat.

No.	Nama pulau	Koordinat titik terluar	Perairan	Wilayah administrasi	Berbatasan dengan
1.	Alor	8°13'50" LS, 125° 7'55"BT	Selat Ombai	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur	Timor Leste
2.	Ararkula	5° 35' 42" LS, 134° 49' 5"BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
3.	Asutubun	8° 3' 7" LS, 131° 18' 2"BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
4.	Bangkit	1° 2' 52" LU, 123° 6' 45"BT	Laut Sulawesi	Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara	Filipina
5.	Barung	8° 30' 30" LS, 113°17'37" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Jember, Jawa Timur	Australia
6.	Batarkusu	8° 20' 30" LS, 130°49'16" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
7.	Batek	9° 15'30" LS, 123°59'30" BT	Laut Sawu	Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Timor Leste
8.	Batu Bawaikang	4° 44'46" LU, 125° 29'24"BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
9.	Batu Berhanti	1° 11' 6" LU, 103° 52' 57"BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
10.	Batu Goyang	7° 57' 1" LS, 134° 11' 38"BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
11.	Batu Kecil	5° 53'45" LS, 104° 26'26" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Lampung Barat, Lampung	India
12.	Batu Mandi	2° 52' 10" LU, 100° 41' 5"BT	Selat Malaka	Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau	Malaysia
13.	Benggala	5° 47' 34" LU, 94° 58' 21"BT	Samudra Hindia	Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam	India
14.	Bepondi	0° 23' 38" LS, 135° 16' 7" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Biak Numfor, Papua	Palau
15.	Berhala	3° 46' 38" LU, 99° 30' 3"BT	Selat Malaka	Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara	Malaysia
16.	Bras	0° 55' 57" LU, 134°20'30" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Biak Numfor, Papua	Palau
17.	Budd	0° 32' 8" LU, 130° 43' 52"BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat	Palau
18.	Damar	2° 44' 29" LU, 105° 2'46" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
19.	Dana (Ndana)	11° 0'36" LS, 122° 52'37" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Australia
20.	Dana	10° 50'0" LS, 121°16'57" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Australia

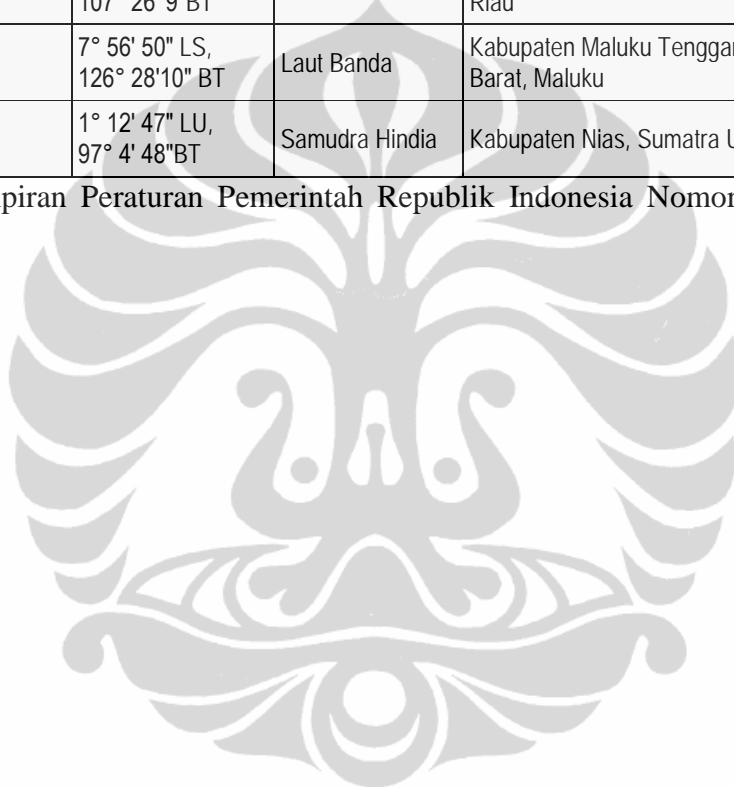
21.	Deli	7° 1' 0" LS, 105° 31' 25"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Pandeglang, Banten	Australia
22.	Dolangan	1° 22' 40" LU, 120° 53' 4"BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Malaysia
23.	Enggano	5° 31' 13" LS, 102° 16' 0"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu	India
24.	Enu	7° 6' 14" LS, 134° 31' 19"BT	Laut Arafuru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
25.	Fani	1° 4' 28" LU, 131° 16' 49"BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat	Palau
26.	Fanildo	0° 56'22" LU, 134°17'44" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Biak Numfor, Papua	Palau
27.	Gosong Makasar	3° 59'25" LU, 117°57'42" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur	Malaysia
28.	Intata	4° 38' 38" LU, 127° 9' 49"BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
29.	Iyu Kecil	1° 11' 30" LU, 103° 21' 8"BT	Selat Malaka	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	Malaysia
30.	Jiew	0° 43' 39" LU, 129° 8' 30"BT	Laut Halmahera	Halmahera, Maluku Utara	Palau
31.	Kakarutan	4° 37' 36" LU, 127° 9' 53"BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
32.	Karang	7° 1' 8" LS, 134° 41' 26"BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
33.	Karaweira	6° 0' 9" LS, 134° 54' 26"BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
34.	Karimun Kecil	1° 9' 59" LU, 103° 23' 20"BT	Selat Malaka	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	Malaysia
35.	Kawalusu	4° 14' 6" LU, 125° 18' 59"BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
36.	Kawio	4° 40' 16" LU, 125°25'41" BT	Laut Mindanao	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
37.	Kepala	2° 38' 42" LU, 109° 10' 4"BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
38.	Kisar	8° 6' 10" LS, 127° 8' 36"BT	Selat Wetar	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
39.	Kolepon	8° 12' 49" LS, 137° 41' 4" BT	Laut Aru	Kabupaten Merauke, Papua	Australia
40.	Kultubai Selatan	6° 49' 54" LS, 134° 47'14" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
41.	Kultubai Utara	6° 38' 50" LS, 134° 50' 2" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
42.	Laag	5° 23' 14" LS, 137° 43' 7"BT	Laut Aru	Irian Jaya Timur, Papua	Australia

43.	Larat	7° 14' 26" LS, 131°58'49" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Australia
44.	Leti	8°14' 20" LS, 127°37' 50" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
45.	Liki	1° 34' 26" LS, 138°42' 7" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Jayapura, Papua	Papua Nugini
46.	Lingian	0° 59'55" LU, 120°12'50" BT	Selat Makasar	Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Malaysia
47.	Liran	8°3' 50" LS, 125° 44' 0"BT	Selat Wetar	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
48.	Makalehi	2° 44' 15" LU, 125° 9' 28"BT	Laut Sulawesi	Kab. Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
49.	Mangkai	3° 5' 32" LU, 105° 35' 0"BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
50.	Mangudu	10° 20' 8" LS, 120° 5' 56"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	Australia
51.	Manterawu	1° 45'47" LU, 124° 43' 51" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara	Filipina
52.	Manuk	7° 49'11" LS, 108°19'18" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Australia
53.	Marampit	4° 46' 18" LU, 127° 8' 32"BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
54.	Maratua	2° 15'12" LU, 118°38' 41" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	Malaysia
55.	Marore	4° 44' 14" LU, 125°28'42" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
56.	Masela	8° 13' 29" LS, 129°49'32" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
57.	Meatimiarang	8° 21' 9" LS, 128° 30' 52"BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
58.	Mega	4° 1' 12" LS, 101° 1' 49"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu	India
59.	Miangas	5° 34' 2" LU, 126° 34' 54"BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
60.	Miossu	0° 20' 16" LS, 132° 9' 34"BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat	Palau
61.	Nipa	1° 9' 13" LU, 103° 39' 11"BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
62.	Nongsa	1° 12' 29" LU, 104° 4' 47"BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
63.	Nusakambangan	7° 47' 5" LS, 109° 2' 34"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	Australia
64.	Panambulai	6° 19' 26" LS,	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara,	Australia

		134°54'53" BT		Maluku	
65.	Panehan	8° 22' 17" LS, 111°30'41" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	Australia
66.	Pelampong	1° 7' 44" LU, 103° 41' 58"BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
67.	Raya	4° 52' 33" LU, 95° 21' 46"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam	India
68.	Rondo	6° 4' 30" LU, 95° 6' 45"BT	Samudra Hindia	Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam	India
69.	Rusa	5° 16' 34" LU, 95° 12' 7"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam	India
70.	Salando	1° 20'16" LU, 120°47'31" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Malaysia
71.	Salaut Besar	2° 57' 51" LU, 95° 23' 34"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam	India
72.	Sambit	1° 46' 53" LU, 119° 2' 26"BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	Malaysia
73.	Sebatik	4° 10' 0" LU, 117° 54' 0"BT	Selat Makasar	Kab. Nunukan, Kaltim	Malaysia
74.	Sebetul	4° 42'25" LU, 107°54'20" BT	Laut China Selatan	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Vietnam
75.	Sekatung	4° 47' 45" LU, 108° 1' 19"BT	Laut China Selatan	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Vietnam
76.	Sekel	8° 24' 24" LS, 111°42'31" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	Australia
77.	Selaru	8° 10' 17" LS, 131° 7' 31"BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Australia
78.	Semiun	4° 31' 9" LU, 107° 43' 17"BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
79.	Sentut	1° 2' 52" LU, 104° 49' 50"BT	Selat Singapura	Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau	Malaysia
80.	Senua	4° 0' 48" LU, 108° 25' 4"BT	Laut China Selatan	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
81.	Sibarubaru	3°17' 48" LS, 100° 19'47" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat	India
82.	Simeuleuceut	2° 31' 47" LU, 95° 55' 5"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam	India
83.	Simuk	0° 5' 33" LS, 97° 51' 14"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Nias, Sumatra Utara	India
84.	Sinyaunyu	1° 51' 58" LS, 99° 4' 34"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat	India
85.	Sophialouisa	8° 55' 20" LS, 116° 0' 8"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Australia

86.	Subi Kecil	3°1' 51" LU, 108° 54' 52"BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
87.	Tokong Belayar	3° 27' 4" LU, 106° 16' 8"BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
88.	Tokong Malang Biru	2° 18' 0" LU, 105° 35' 47"BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
89.	Tokong Nanas	3° 19' 52" LU, 105° 57' 4"BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
90.	Tokongboro	4° 4' 1" LU, 107° 26' 9"BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
91.	Wetar	7° 56' 50" LS, 126° 28'10" BT	Laut Banda	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
92.	Wunga	1° 12' 47" LU, 97° 4' 48"BT	Samudra Hindia	Kabupaten Nias, Sumatra Utara	India

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002



Tabel. 1.4. Pulau-Pulau Terluar Tidak Berpenduduk Di Sekitar Selat Malaka

No.	Nama Pulau	Koordinat Titik Terluar	Kondisi Pulau	Berbatasan Dengan
1.	Berhala	3° 46' 38" LU, 99° 30' 3" BT	- Luas 148.000 m ² . - Masuk wilayah administrasi Serdang Bedagai, Sumatera Utara - Pulau dengan kontur tanah berbukit	Malaysia
2.	Batu Mandi	2° 52' 10" LU, 100° 41' 5" BT	- Luas 200 m ² . - Masuk wilayah administrasi Rokan Hilir, Riau - Merupakan pulau karang	Singapura
3.	Iyu Kecil	1° 11' 30" LU, 103° 21' 8" BT	- Luas 20.000 m ² . - Masuk wilayah administrasi Karimun, Kepulauan Riau. - Pulau dengan struktur berbukit batu	Malaysia dan Singapura
4.	Karimun Kecil	1° 9' 59" LU, 103° 23' 20" BT	- Luas 7.890.000 m ² . - Masuk wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau - Pulau dengan struktur tanah berpasir.	Malaysia dan Singapura
5.	Nipa	1° 9' 13" LU, 103° 39' 11" BT	- Luas 600.000 m ² . - Masuk wilayah Batam, kepulauan Riau. - Pulau dengan struktur tanah berpasir.	Singapura
6.	Palompong	1° 7' 44" LU, 103° 41' 58" BT	- Luas 230.000 m ² . - Masuk wilayah administrasi Kota Batam, Kepulauan Riau - Pulau dengan struktur tanah berpasir.	Singapura
7.	Batu Berhanti	1° 11' 6" LU, 103° 52' 57" BT	- Luas 2.800 m ² . - Masuk wilayah administrasi Kota Batam, Kepulauan Riau - Pulau yang terbentuk dari batuan karang	Singapura
8.	Nongsa	1° 12' 29" LU, 104° 4' 47" BT	- Luas 77.000 m ² . - Masuk wilayah administrasi Kota Batam, Kepulauan Riau - Pulau dengan struktur tanah berpasir.	Singapura

Sumber : diolah dari www.Garis Depan Nusantara.org

Wawancara dengan Ir. Rahman Ibrahim, M.Sc, 18 Mei 2011, pukul 15:45:26, di Gedung BNPP, Kampus IPDN Lantai 4.

1. Pulau-pulau terluar, dalam hal ini pulau-pulau yang berada di sekitar Selat Malaka, mempunyai peranan strategis dalam penentuan batas wilayah teritorial Indonesia dengan negara tetangga. Pulau-pulau tersebut seharusnya mendapat perhatian dalam hal pemberdayaan, sehingga dapat mempunyai nilai lebih dari segi ekonomi maupun pertahanan. Mohon pendapat Bapak mengenai hal ini.

Bagaimana memberdayakan pulau-pulau terluar tersebut apabila dijaga dapat dikatakan pulau yang layak hidup bukan hanya pulau yang layak huni. Pulau itu harus dapat dijaga 24 jam secara terus menerus (nonstop), minimal ada manusia disana dan tidak akan mati disana, sehingga dephan dalam memerintahkan untuk menempati pulau tersebut, pulau tersebut harus bukan layak huni namun layak hidup dengan syarat harus mempunyai logistik yang kuat. Mungkin kalau ditanya petugas pengamanan di pulau nipa atau pulau-pulau lain yang menjadi primadona, mereka akan menjawab bahwa mereka kesulitan akan dukungan logistiknya. Nah bagaimana mengatasi hal ini, masukan yang ada disana adalah bagaimana dukungan logistiknya dapat terpenuhi dengan segera.

2. Dengan adanya satuan pengamanan pulau terluar, dari pasukan Marinir TNI AL, namun sarana prasarana di pulau-pulau tersebut masih dirasa kurang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini.

Pulau-pulau tersebut harus mempunyai infrastruktur yang kuat. Adanya kemudahan orang untuk menuju kesana, dengan adanya sarana transportasi yang mudah, juga adanya dermaga yang memadai untuk bersandar. Pengembangan ekonomi kawasan di pulau-pulau terluar sangat diperlukan dan harus segera. Namun dalam pengembangan ekonomi, jangan sampai mengubah aset-aset ekonomi yang sudah ada disana. Misalnya di Mianggas, yang akan dibangun air strip, dengan konsekuensi 30% lahan yang saat ini ditanami kopra, akan hilang. Hal ini berdampak bagi petani disana kehilangan mata pencaharian mereka. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka akan dialihkan menjadi nelayan. Sanggupkah mereka berubah dari petani menjadi nelayan. Mengapa tidak mencari tempat lain seperti di dekat pantai dengan melaksanakan reklamasi seperti di pulau Bali. Untuk itu

diperlukan tata ruang yang disesuaikan dengan karakteristik pulau-pulau terluar. Seperti di Pulau Nipa, sudah dibagi dalam kawasan fungsi pertahanan dan kawasan ekonomi. Dulu dibagi tiga, ekonomi, lingkungan dan pertahanan. Namun perkembangan terakhir, untuk Pulau nipa dibagi 2 kawasan yaitu kawasan ekonomi dan kawasan pertahanan. untuk kawasan lingkungan sudah termasuk dalam program yang tidak diatur secara khusus, karena berjalan dengan sendirinya. Untuk pemberdayaan tata ruang di pulau-pulau kecil terluar berdasarkan UU no 27 tahun 2007. Diperlukan sarana dermaga, sumber listrik, sumber air dan infrastruktur lain seperti telekomunikasi. Ketersediaan peralatan yang mendukung pengawasan juga harus dilakukan, seperti ketersediaan sarana pantau (teropong IR).

3. Bagaimana pendapat Bapak tentang pulau-pulau terluar saat ini apabila melihat kejadian hilangnya Sipadan dan Ligitan.

Sebenarnya tidak ada kekhawatiran akan hilangnya pulau-pulau tersebut akan hilang, karena pemerintah indonesia sudah mendaftarkan kepemilikan pulau-pulau tersebut ke badan dunia PBB. Walaupun dibiarkan sebenarnya pulau-pulau tersebut tidak akan berdampak hilangnya pulau karena diklaim milik negara lain. Dengan demikian penarikan batas wilayah sejauh 12 mil akan disetujui oleh negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. Namun memang ada klaim yang dilakukan Malaysia tentang wilayah laut yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia, seperti yang diklaim Malaysia di wilayah perairan pulau Bintan.

Diakhir wawancara penulis diberikan makalah BNPP sebagai bahan masukan dan referensi untuk memperkaya penulisan tesis ini.

Wawancara via email, jawaban diterima pada tanggal 28 Maret 2011 dari Mayor Laut (P) Yudi Priyatno (bihansadayu@yahoo.com), Pasops Lanal BTM

1. Pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain merupakan pulau terluar kepulauan Indonesia. Pulau-pulau terluar tersebut pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. Namun kalau dilihat kenyataannya saat ini, pulau-pulau terluar tersebut masih belum diberdayakan dengan baik oleh Negara Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak?

P. Nipa. Pada dasarnya kita telah menyadari arti pentingnya pemberdayaan Pulau Nipa sebagai salah satu pulau terluar yang tidak berpenghuni. Oleh karena itu pembangunan di Pulau Nipa secara bertahap telah dilaksanakan dan terus berlanjut. Demikian pula dengan masalah pengamanan di Pulau Nipah yang semakin ditingkatkan dengan menambah jumlah personil Marinir pengamanan pulau terluar

2. Persoalan wilayah perbatasan bisa jadi sudah indentik dengan aspek pertahanan. Namun persoalan di wilayah terluar juga melibatkan aspek ekonomi. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan untuk menangani persoalan perbatasan negara, bukan hanya berkuat kepada aspek pertahanan semata. Persoalan ekonomi juga perlu digarisbawahi. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara dalam menanggapi hal ini, khususnya pemberdayaan ekonomi di pulau-pulau kosong (tidak berpenghuni) seperti pulau Nipa, dan lainnya?

Upaya pemberdayaan dan pemanfaatan Pulau Nipa sudah cukup baik dan berkembang pesat. Terbukti dengan maraknya pembangunan sarana dan prasarana baik di bidang ekonomi maupun upaya penangkalan & menjaga keutuhan NKRI.

3. Ada beberapa instansi yang terlibat dalam pengamanan garis perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga (TNI AL, Polri, Bea Cukai, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan). Tetapi tetap tidak semua perbatasan bisa dijaga oleh aparat, mengingat jumlah sumber daya dan

alutsista yang tidak sebanding dengan panjang garis perbatasan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Apakah sudah dirasa cukup atau perlu integrasi dalam pengamanan perbatasan laut?

TNI-AL sangat berperan aktif dalam penjagaan dan pengamanan Pulau Nipa dalam bentuk adanya POSAL yang diawaki personel Lanal Batam. Selain itu personel Marinir BKO Kodam sebagai pengamanan Pulau terluar.

4. Melihat kondisi di lapangan, bahwa dalam pengamanan pulau terluar, personel TNI ditempatkan di pulau-pulau terluar (P. Berhala dan P Nipa serta sebagian anggota TNI AL di P. Iyu Kecil) tanpa dilengkapi dengan kapal patroli sendiri. Bagaimana Bapak menanggapi kendala ini? Bagaimana kondisi keamanannya, tindak kejahatan ataupun kegiatan ilegal lainnya.

Kendala yang dihadapi :

- a. Kurangnya alat pendukung pengamanan / pengamatan.*
- b. Terbatasnya dukungan patroli pengamanan.*
- c. Tidak tersedianya bahan makanan, yang harus didukung dari Lanal Batam.*
- d. Terbatasnya air bersih.*

Pada awalnya tingkat tindak kejahatan di perairan Selat Malaka sangat tinggi. Namun sejak tahun 2005 yang lalu telah diselenggarakan gelar operasi militer besar-besaran yang melibatkan tiga Negara pantai di daerah tersebut (Indonesia, Singapura, dan Malaysia) sehingga tingkat tindak kejahatan berhasil ditekan dengan sangat signifikan hingga saat ini.

Dengan pemberdayaan pulau-pulau terluar di perairan Selat Malaka semacam ini tentu saja akan membawa dampak positif terhadap penjagaan kedaulatan dan pemeliharaan keamanan di perairan. Apabila pulau-pulau tersebut diberdayakan dengan baik, maka dapat mendukung secara langsung maupun tidak langsung upaya pengamanan daerah

perbatasan. Sebagai contoh, kemungkinan dibangunnya pangkalan-pangkalan yang berdaya guna dan memiliki fasilitas sandar yang lengkap bagi KRI-KRI yang tengah beroperasi di wilayah tersebut.

5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap wilayah pulau-pulau terluar tersebut? Apakah ada aturan khusus mengenai hal ini?

Dengan optimalisasi segala potensi yang dimiliki oleh seluruh jajaran TNI-AL, seperti halnya LANAL-LANAL yang dapat mengoperasikan unsur-unsur lautnya untuk berpatroli dalam rangka pam perbatasan. Termasuk juga segala aktifitas pengamanan oleh KRI-KRI yang beroperasi di sana dan senantiasa akan menjaga kedaulatan dan keamanan perairan. Hal ini diimplementasikan dengan banyaknya gelar operasi militer dari jajaran TNI AL maupun jajaran TNI lainnya yang terfokus di wilayah pulau-pulau terluar.

6. Mohon saran tentang pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni, khususnya pulau-pulau yang berada di sekitar Selat Malaka.

Agar pulau-pulau terluar yang dimiliki oleh RI yang saat ini tak ubahnya seperti beranda luar dari NKRI betul-betul diberdayakan sebagai asset nasional yang sangat vital untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pangkalan-pangkalan pendukung operasi militer di wilayah perbatasan. Dengan diberdayakannya pulau-pulau terluar tentu juga akan memperkuat ketahanan nasional yang selama ini seringkali diusik-usik oleh berbagai pihak dalam kaitannya dengan garis batas Negara.

Wawancara via email, jawaban diterima pada tanggal 8 April 2011 dari Kapten Laut (P) Agus Yuniarto (provost48@yahoo.com), Pasops Lanal TBK

1. Pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain merupakan pulau terluar kepulauan Indonesia. Pulau-pulau terluar tersebut pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. Namun kalau dilihat kenyataannya saat ini, pulau-pulau terluar tersebut masih belum diberdayakan dengan baik oleh Negara Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak?

Pendapat saya mengenai Pulau terluar yaitu Pulau Iyu kecil dan Pulau Karimun kecil yang berbatasan dengan Negara tetangga dalam hal ini Negara Malaysia pengawasannya sudah cukup baik meskipun dengan sarana dan prasarana yang minim dan terbatas. Selain itu letak Pulau Iyu kecil juga berada pada pertemuan arus dari Selat Malaka dan Selat Singapura yang menyebabkan gelombang di perairan tersebut cenderung relatif besar, sehingga hal ini menyebabkan akses menuju Pulau juga sedikit sulit dengan sarana angkutan laut berupa kapal kecil dengan mesin motor tempel bertenaga kecil.

2. Persoalan wilayah perbatasan bisa jadi sudah indetik dengan aspek pertahanan. Namun persoalan di wilayah terluar juga melibatkan aspek ekonomi. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan untuk menangani persoalan perbatasan negara, bukan hanya berkuat kepada aspek pertahanan semata. Persoalan ekonomi juga perlu digarisbawahi. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara dalam menanggapi hal ini, khususnya pemberdayaan ekonomi di pulau-pulau kosong (tidak berpenghuni) seperti pulau Nipa, dan lainnya?

Menurut pendapat saya mengenai pemberdayaan dan pemanfaatan pulau terluar selama ini sudah ada upaya yang dilaksanakan, namun demikian intensitas dan keseriusan penanganan masih sangat minim dan tidak terorganisir baik dari Pemerintah maupun dari pihak Pemda sendiri.

Kebanyakan yang telah dilaksanakan hanya pengumpulan data-data tanpa ada realisasi untuk pemberdayaan dan pemanfaatan pulau tersebut.

3. Ada beberapa instansi yang terlibat dalam pengamanan garis perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga (TNI AL, Polri, Bea Cukai, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan). Tetapi tetap tidak semua perbatasan bisa dijaga oleh aparat, mengingat jumlah sumber daya dan alutsista yang tidak sebanding dengan panjang garis perbatasan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Apakah sudah dirasa cukup atau perlu integrasi dalam pengamanan perbatasan laut?

Selama ini TNI AL sudah cukup berperan aktif dalam penjagaan dan pengamanan pulau-pulau terluar, karena setiap hari personel TNI AL dalam hal ini personel Posal Iyu kecil selalu melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta kamla terbatas di wilayah pulau tersebut. Selain itu pihak TNI AL juga mengerahkan kekuatan unsur-unsur KRI dan pesawat udara untuk berpatroli dan memantau keadaan pulau-pulau tersebut.

4. Melihat kondisi di lapangan, bahwa dalam pengamanan pulau terluar, personel TNI ditempatkan di pulau-pulau terluar (P. Berhala dan P Nipa serta sebagian anggota TNI AL di P. Iyu Kecil) tanpa dilengkapi dengan kapal patroli sendiri. Bagaimana Bapak menanggapi kendala ini? Bagaimana kondisi keamanannya, tindak kejahatan ataupun kegiatan ilegal lainnya.

Kendala-kendala di lapangan yang sering kita temui yaitu selain gelombang yang relatif besar juga cuaca yang tidak menentu, selain itu ada banyak lagi kendala yang kita temui antara lain:

- a. *Sinyal operator selular lebih dominan sinyal operator Malaysia daripada operator lokal, sehingga sangat menghambat anggota Pos untuk melaksanakan kordinasi cepat via handphone.*
- b. *Penerangan di Posal masih menumpang pada generator suar yang hanya hidup pada malam hari karena terbatasnya BBM untuk*

operasional mesin genset. Sedangkan pada siang hari menggunakan solar cell yang kemampuannya juga terbatas.

- c. Teropong yang dimiliki oleh Posal rata-rata sudah dalam kondisi yang kurang bagus baik teropong siang maupun malam.*
- d. Tidak memiliki GPS sehingga dalam melaksanakan kmla terbatas menggunakan boat patroli tidak bisa mengetahui dengan jelas posisi sektor patroli.*

Untuk tingkat kejahatan di sekitar pulau Iyu kecil dan Karimun kecil sangat minim dan boleh dikatakan tidak ada, walaupun ada hanya sebatas perselisihan wilayah penangkapan ikan di antara kelompok nelayan tradisional yang belum bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan karena sifatnya hanya perselisihan antara kelompok nelayan.

5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada yang menjadi prioritas pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar (dalam wilayah pengawasan Bapak)?

Kaitannya dengan pemberdayaan pulau-pulau terluar untuk pulau Iyu kecil relatif sulit untuk diberdayakan karena pulau tersebut merupakan pulau karang yang tidak berpenghuni, berbeda dengan pulau Karimun kecil yang merupakan pulau dengan memiliki hutan lindung dan ada beberapa KK yang tinggal di pulau tersebut meskipun sifatnya nomaden. Sehingga masih memungkinkan untuk diberdayakan untuk membantu pengamanan pulau maupun pemberdayaan ekonomi dan wisata bahari.

6. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap wilayah pulau-pulau terluar tersebut? Apakah ada aturan khusus mengenai hal ini?

Pengamanan Pulau-pulau kecil terluar dilaksanakan dengan menghadirkan kekuatan laut dan udara serta pangkalan baik secara periodik dan terus menerus sepanjang tahun di seluruh wilayah yurisdiksi

nasional Indonesia dengan prioritas perairan dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang dan rendah guna melindungi dari ancaman pemanfaatan pulau-pulau terluar dari kegiatan illegal dan mencegah hilangnya pulau yang disebabkan oleh berbagai faktor, disamping menimbulkan dampak penangkalan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. **Deteksi.** *Deteksi dilaksanakan untuk menemukan obyek di laut dan udara di atasnya yang tidak dikenal atau dicurigai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.*
- b. **Pengenalan / Identifikasi.** *Pengenalan dilaksanakan untuk meng-identifikasi objek yang tidak dikenal atau dicurigai.*
- c. **Penilaian.** *Penilaian dilaksanakan untuk menentukan nilai informasi serta tingkat kepentingannya dipandang baik dari aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan.*
- d. **Penerusan.** *Penerusan informasi yang bersifat khusus perlu penanganan lebih lanjut secara cepat dan tepat.*
- e. **Penindakan.** *Penindakan dilaksanakan bagi pelanggar dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penindakan penghancuran dilaksanakan atas perintah Panglima Komando Armada Kawasan dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.*
- f. **Komando.** *Komando dilakukan untuk memimpin, meng-koordinasikan dan mengendalikan berbagai tindakan yang dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya.*

7. Mohon saran tentang pemberdayaan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni, khususnya pulau-pulau yang berada di sekitar Selat Malaka.

Pulau-pulau kecil terluar merupakan Base Point batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga, keberadaan pulau-pulau terluar tersebut apabila tidak diberi perhatian secara khusus dapat berpotensi

konflik dan akan mengganggu Ketahanan Nasional, sehingga eksistensinya perlu dipertahankan karena merupakan wujud dari kedaulatan negara. Kurang tepatnya pengelolaan yang dilakukan menimbulkan kerawanan akan hilangnya pulau-pulau tersebut seperti yang sudah banyak terjadi. Untuk itu perhatian yang khusus dan intens sangat diperlukan dalam pengelolaan pulau-pulau terluar bukan hanya kepada pulau-pulau saja tetapi juga perlu perhatian khusus terhadap personil yang menjaga pulau-pulau tersebut salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan personil yang melaksanakan pengamanan di pulau-pulau terluar lebih dari personil yang lain yang tidak bertugas disana.

